



**PROFIL PRAKTIK PELEPAS UANG
(RENTENIR) DALAM MASYARAKAT TRANSISI
Studi Kasus di Kartasura Kabupaten Sukoharjo**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

KHUDZAIFAH DIMYATI, S.H.

Pembimbing :

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

1997

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan bersujud dan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Sang Juru Pembawa Terang dan sumber segalanya, serta berkat berusaha dan kepasrahan kepada-Nya, penyusunan tesis ini telah dapat diselesaikan. Penyelesaian tesis ini bukanlah akhir segalanya, akan tetapi merupakan awal dari pergulatan keilmuan. Sesungguhnya, ilmu pengetahuan apapun yang diupayakan manusia hanya sedikit menyingkap kekayaan ilmu-Nya, yang tidak akan pernah habis untuk di kaji. Manusia kehabisan kosa kata untuk mengungkapkan dan mengkaji kebesaran ilmu-Nya.

Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, H. Ahmad Dimyati yang kini bermukim di sebuah desa Sirau, Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas dan Ny. Sukiyah Dimyati, yang telah dipanggil pulang kealam abadi, belum sempat penulis memberikan pembalasan atas segala yang telah diterimanya; kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan.

Kepada pembimbing saya yang sangat terhormat, Prof.Dr. Satjipto Rahardjo, S.H, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga, atas kesediaan membimbing saya,

sementara beliau disibukkan oleh tugas yang selalu menyertainya. Kepada keluarga pembimbing saya yang telah turut berkorban agar saya dapat bimbingan yang sebaik-baiknya, dengan ini saya ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kepada Prof. A. Malik Fadjar, MSc, saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga, karena beliau telah memberikan kesempatan yang luas untuk melanjutkan studi program pascasarjana. Kepada Bapak Drs.H.Dochak Latif, selaku Rektor saat ini, saya ucapkan terima kasih atas biaya-biaya yang telah diberikan dalam rangka penyelesaian studi ini.

Kepada Prof. Purwahid Patrik, Ketua Program Magister Ilmu Hukum, saya tujukan pula ucapan terima kasih atas bimbingannya selama saya menuntut ilmu. Juga tidak lupa ucapan terima kasih ini saya tujukan kepada yang terhormat; Prof. Soehardjo, SS. S.H, Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, S.H, Prof.Dr. Dimyati Hartono, S.H, Prof.Dr. Sumantoro, Prof.Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H, Prof. Suhardi (almarhum), Dr.I.S. Susanto, S.H, Dr. Esmi Warrasih Pujirahayu, S.H,M.S, Prof. Dr.Isti Sutomo, Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Prof.Dr.Gunawan Setiardja, Prof. Sudjarwo, Dr.Miyasto, Dr. Mumpuni Martoyo, S.H, Drs.Wiratno, MEc, Eko Soponyono, S.H,M.H, dari beliau-beliaulah saya mendapat bimbingan.

Tidak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, saya tujukan kepada Bapak Harun, S.H, M.S, dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang selalu memberi semangat agar tesis ini segera diselesaikan. Kepada sahabat-sahabat saya satu kontrakan di Semarang, H.Moediyono, Haryanto dan Hartanto terima kasih atas kekompakannya selama ini.

Kepada kakak saya, Mas Zub, Mas Slamet, Mas Bardani, mba Yatun, mba Chafsoh Mas Muchdar, serta adik-adik saya, Endang dan Agus terima kasih atas dukungannya untuk melanjutkan kuliah di pascasarjana. Akhirnya, ucapan terima kasih saya tujukan kepada Ny. Nur Afiah, dan Ananda Dimas Permata, orang yang selama ini mendampingi saya dalam suka dan duka.

Semarang, 4 Februari 1997

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Definisi Operasional.....	15
B. Pendekatan.....	16
BAB. II. PERBINCANGAN TEORI TENTANG PELEPAS UANG (RENTENIR) DALAM MASYARAKAT.....	18
A. Asal Usul Sosial Pelepas Uang.....	18
B. Masyarakat Yang Berubah.....	23
C. Strategi Pembangunan Pedesaan.....	31
D. Tipologi Institusi Finansial Informal.....	39
BAB III. DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN.....	43
A. Keadaan Geografi dan Penduduk.....	43
B. Struktur Sosial.....	49
C. Perkembangan Ekonomi.....	64
BAB IV. PROFIL PRAKTIK PELEPAS UANG (RENTENIR) DALAM MASYARAKAT TRANSISI.....	81
A. Sumber-Sumber Perkreditan Formal.....	81
B. Praktik Pelepas Uang.....	102
B.1. Karakteristik Pelepas Uang.....	106
B.2. Citra Universal Pelepas Uang.....	111
B.3. Legitimasi Budaya Pelepas Uang.....	113
C. Mekanisme Transaksi Kredit.....	114
C.1. Tingkat Suku Bunga.....	119
C.2. Tata Cara Penagihan.....	120
C.3. Jangkauan Pelayanan.....	121

	D. Pelepas Uang Dalam Perspektif Hukum.....	122
	E. Aspek Sosial Budaya Pelepas Uang.....	132
	F. Pelepas Uang dan Perkembangan Ekonomi.....	141
	G. Sikap Masyarakat Terhadap Perkreditan Formal dan Informal.....	143
	H. Analisis Lembaga Perkreditan.....	150
BAB	V. PENUTUP.....	156
	A. Kesimpulan.....	156
	B. Saran-saran.....	161

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR SKEMA

Skema 1: Prosedur Pinjaman pada Badan Kredit Kecamatan.....	91
Skema 2: Struktur Organisasi Badan Kredit Kecamatan Kartasura.....	92

DAFTAR RAGAAN

Ragaan 1: Pentahapan Evolusi Masyarakat menurut Parsons.....	25
Ragaan 2: Penjajaran Nilai-nilai.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1:	Penduduk dalam Kelompok Umur dan Kelamin Kelurahan Kartasura tahun 1996.....	46
Tabel 2:	Mata Pencaharian Penduduk Kartasura (Bagi Umur 10 tahun kebawah) tahun 1996....	47
Tabel 3:	Macam-macam Kredit, Jangka Waktu, Bunga dan Tabungan.....	95
Tabel 4:	Perkembangan Badan Kredit Kecamatan Kartasura Dati II Sukoharjo antara tahun 1993 - 1995.....	97

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Metode lengkap yang digunakan dalam penelitian
2. Lampiran 2 : Ijin Penelitian

ABSTRAK

Terdapat tiga esensi permasalahan dalam tesis yang berjudul: "PROFIL PRAKTIK PELEPAS UANG (RENTENIR) DALAM MASYARAKAT TRANSISI, Studi Kasus di Kartasura Kabupaten Sukoharjo". Permasalahan tersebut: pertama, tentang profil pelepas uang yang banyak diminati masyarakat, dibandingkan program kredit bunga murah dari pemerintah. Kedua, mekanisme transaksi kredit antara pelepas uang dengan nasabahnya sehingga menimbulkan ketergantungan, dan ketiga, pelepas uang dalam perspektif hukum.

Terdapat dua karakteristik profil pelepas uang. Pertama, mereka yang terang-terangan melakukan aktivitasnya, dan memiliki segmen pasar terutama pedagang-pedagang kecil, para bakul di pasar dan di rumah-rumah penduduk. Kedua, mereka sembunyi-sembunyi dalam melakukan aktivitasnya, hanya orang-orang yang dikenal secara baik dan dapat dipercaya yang dapat dijadikan sebagai debitur. Nasabahnya terutama pedagang yang memiliki omset modal puluhan juta rupiah. Ketergantungan nasabah terhadap rentenir terletak pada persoalan budaya ekonomi masyarakat. Perilaku ekonomi rentenir berkaitan dengan budaya lokal. Dalam praktik mereka selalu membangun citra diri lewat penguatan kapital budaya (*cultural capital*). Hal inilah yang tidak dimiliki oleh institusi perkreditan formal, yang lebih cenderung bersikap birokratis. Dalam masyarakat transisi, suatu masyarakat yang tengah mengalami perubahan nilai menuju masyarakat yang berorientasi pada pasar, maka kebutuhan akan uang tunai menjadi mendesak. Dalam masyarakat yang demikian itulah, peranan rentenir menjadi penting sebagai pemasok dana bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Ikatan batin yang dekat antara rentenir dengan nasabah membuat urusan mekanisme transaksi kredit menjadi sangat mudah dan cepat, serta angsurannya yang dirasakan tidak ketat. Meski bunga yang dibebankan kepada nasabah cukup tinggi, tetapi mereka membayar kredit itu sebagai kewajiban sosial mereka. Meskipun dorongan-dorongan kebutuhan ekonomi sebagai basis terjadinya transaksi pelepas uang dan nasabahnya, akan tetapi dalam praktik, transaksi tersebut diwarnai oleh kompleksitas jalin menjalin faktor-faktor sosial ekonomi.

Secara yuridis, terdapat larangan terhadap aktivitas pelepas uang atau rentenir, seperti terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelepas uang, yakni *Geldscheiters Ordonantie*, tanggal 12 September 1938, S.1938 - 523 atau Undang-Undang Riba, yaitu *Woeker Ordonantie*, S.1938 - 524. Akan tetapi, secara sosiologis aktivitas rentenir tetap saja berlangsung di Kartasura tidak ada tanda-tanda surut, bahkan memperlihatkan mobilitas yang tinggi.

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup seluruh lapisan masyarakat pedesaan. Salah satu tantangan berat yang dihadapi dalam pembangunan pedesaan adalah masih banyaknya anggota masyarakat pedesaan yang belum terjangkau oleh berbagai kebijaksanaan,¹ baik karena alasan-alasan fisik lokasional, struktural serta ekonomi politik. Sementara itu, salah satu karakteristik umum yang melekat dalam masyarakat pedesaan Indonesia adalah permodalan yang lemah. Permodalan merupakan unsur yang esensial dalam upaya mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan itu sendiri. Kekurangan modal ini sangat membatasi ruang gerak aktivitas usahanya, yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan. Dengan pemilikan dana yang terbatas,² sementara kekurangan modal ini tidak mudah diperoleh, telah

1. Lihat Mubyarto, *Mempercepat Pewujudan Keadilan Sosial Melalui Pengembangan Sistem Kredit Pedesaan*, dalam Mubyarto dan Edy Suandi Hamid (Penyunting) *Kredit Pedesaan Di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 1986, hlm.143.

2. Lihat, Edy Suandi Hamid, *Rekaman dari Seminar*, dalam Mubyarto dan Edy Suandi Hamid (Penyunting), *Kredit Pedesaan Di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 1986, hlm.3.

membuat semakin sulitnya usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan itu dengan cepat.

Dari sisi lain, di daerah pedesaan banyak pihak yang telah beroperasi menawarkan permodalan atau dana, yang dapat diperoleh dengan mudah, seperti dari para pelepas uang dan pengijon. Institusi pelepas uang informal ternyata sangat populer³ dikalangan masyarakat pedesaan. Penduduk pedesaan, dengan jaminan harta benda yang dimilikinya, dapat dengan cepat memperoleh dana dari kreditur perorangan, kerumah penduduk yang membutuhkan. Akan tetapi, pinjaman dari kreditur perorangan ini hanya mengatasi kesulitan dana untuk sementara waktu, artinya kenikmatan hutang yang diperolehnya hanya dirasakan sesaat. Sebab, dengan meminjam dari sumber kredit perorangan, kebanyakan penduduk pedesaan justru terjerat kesulitan baru yang bukan tidak mungkin malah menjadi lebih rumit.

Upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan antara lain diwujudkan dengan kebijakan perkreditan yang termanifestasikan dalam institusi finansial formal. Kredit dapat dikatakan sebagai alat

3. Lihat, Heru Nugroho Sugiarto, *The Embeddedness of Money, Moneylenders and Moneylending in Javanese Town, A Case Study of Bantul - Yogyakarta Special Province*, Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doctor der Sozial- wissenschaften an der Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld, 1993, hlm.53.

yang penting⁴ bagi petani-petani kecil, pedagang dan pengrajin untuk membantu pertambahan pendapatan mereka.

Lembaga kredit pedesaan dan pengembangannya merupakan salah satu alat kebijaksanaan strategis untuk semakin menjangkau kelompok yang belum beruntung, yang sering disebut kelompok lemah, golongan miskin atau anggota masyarakat yang masih tercecceh. Keikutsertaan kelompok ini dalam perekonomian desa yang senantiasa berkembang, merupakan salah satu prasyarat bagi peningkatan kehidupannya dan martabat serta kualitas⁵ sebagai warga bangsa.

-
4. Jennifer Alexander dan Paul Alexander, *Finance and Credit in A Rural Javanese Market: An Antropological Perspective*, Prepared for Conference on Financial Research in Indonesia, sponsored by Directorate of Domestic Monetary Affairs of the Departement of Finance/HIID, Held Cipanas, West java 25-27 August 1985.
 5. Dalam Kamus A.S Hornby: *Oxford Student's Dictionary of American English* (Oxford University Press, 1983), maka terbaca bahwa "quality", adalah *degree or grade excellence* (tingkat kesempurnaan), *godddness or worth* (nilai), *characteristics of a person or thing* (karakteristik seseorang atau suatu barang). Martabat dan kualitas manusia dapat ditinjau dari segi agama, medis, sosiologi, ekonomi, politis maupun hukum. Dalam perspektif sosiologis misalnya, kualitas manusia tergantung kepatuhannya pada tuntutan-tuntutan dan adat kebiasaan masyarakatnya, sementara dari perspektif ilmu hukum kualitas manusia ditentukan oleh tingkat kesadaran hukumnya. Selanjutnya lihat, C.F.G Sunaryati Hartono, *Konsep Martabat dan Kualitas Manusia Menurut Hukum*, dalam Sofian Effendi, Sjafrin Sairin, M.Alwi Dahlan, (penyunting) *Membangun Martabat Manusia, Peranan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993, hlm.182-183.

Kendatipun penyaluran kredit pedesaan hanyalah merupakan salah satu cara untuk membantu kelompok miskin di pedesaan untuk meningkatkan pendapatan, akan tetapi berdasarkan penelitian⁶, dan pengalaman banyak negara, kredit pedesaan merupakan cara yang cukup efektif, karena bersamaan dengan berkembangnya ekonomi uang. Kelompok penduduk desa yang tak beruang selalu akan *tercecer* dalam proses komersialisasi. Dengan kata lain, proses pembangunan pedesaan hampir selalu berarti proses komersialisasi, dan proses komersialisasi ini menyangkut peningkatan penggunaan modal uang.

Program kredit pedesaan agar dapat membantu meningkatkan pendapatan, harus dapat dimanfaatkan bagi usaha-usaha yang produktif. Dari perspektif lain, lembaga kredit pedesaan harus dapat membantu melepaskan penduduk desa yang berpendapatan rendah dari ikatan-ikatan para pelepas uang yang sangat merugikan.

Dari hasil survai kredit atas 450 petani peserta Bimas di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1971/1972, terdapat 313 petani (70%) yang pendapatannya lebih kecil dari pengeluaran, sehingga mereka lari ke *pengijon*.⁷ *Pengijon* ini mampu menolong penduduk desa

6. Mubyarto, *loc.cit*, hlm.144.

7. Mubyarto, *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983, hlm.122.

dengan memberikan kredit yang mudah, cepat dan tepat, tetapi tidak murah. Tidak murah karena rata-rata tingkat bunganya adalah 28% perbulan atau 336% per tahun.⁸

Meskipun nampak dari perhitungan bahwa tingkat bunga rata-rata tinggi, akan tetapi hal ini tidak membuat jera. Hal tersebut disebabkan penduduk desa tidak pernah menghitung tingkat bunga secara demikian. Bagi mereka yang penting adalah ada tidaknya cara atau kemampuan untuk membayar kembali pinjaman tersebut.

Sementara itu, hasil kerja dari lembaga kredit formal di daerah pedesaan dengan berbagai jenis pinjaman yang ditawarkannya, belum mencapai sasaran yang diharapkan. Hasil kerja dari lembaga kredit formal ini masih belum efektif,⁹ kendati dari perspektif efisiensi sudah cukup baik. Padahal, jika misi dari kredit pedesaan itu adalah untuk membantu permodalan penduduk agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, maka seharusnya aspek efektivitas yang lebih menonjol, kendati juga tetap tidak mengabaikan sama sekali aspek efisiensinya.

Pendirian lembaga perkreditan yang *didrop* dari atas dengan pola pengelolaan serta konsep dari atas, tanpa melihat situasi, kondisi dan budaya, merupakan faktor

8. Ace Partadiredja, *Kredit Pedesaan: Sistem Ijon*, dalam Sajogyo (Penyunting), *Perekonomian Desa*, Obor - YAE, 1982, hlm.217.

9. Edy Suandi Hamid, *loc cit*, hlm.4.

yang menyebabkan aspek efektivitas dari lembaga kredit tersebut belum terwujud. Jangkauan serta nasabahnya juga terbatas. Hal ini terjadi karena pola kerja dari pengelola badan kredit itu terbawa oleh birokrasi.¹⁰ Mereka bersifat menunggu, dan menerapkan berbagai peraturan dan persyaratan secara *ketat dan kaku*,¹¹ seperti yang dituntut oleh prinsip perbankan modern.¹²

Prosedur yang berbelit-belit, persyaratan administratif yang menjengkelkan, jaminan kekayaan yang harus tersedia untuk mendapatkan kredit, serta lokasi lembaga kredit yang jauh dari tempat tinggal penduduk desa, telah menjadi pembatas bagi penduduk desa untuk memanfaatkan jasa lembaga kredit formal yang disponsori oleh pemerintah. Walaupun dari segi tingkat bunga, badan kredit pedesaan ini relatif murah, tetapi adanya faktor-faktor

10. Dalam membuat pertimbangannya pejabat menemukan suatu dilema karena jika terlalu tunduk dengan undang-undang, secara populer disebut birokratis. Lihat, Martin Elbrow, *Birokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989, hlm.47.
11. Salah satu segi bentuk yang demikian itu adalah terdapatnya kepastian dalam norma-normanya, sedangkan segi yang lain memperlihatkan kekakuan. Kepastian hukum memanglah banyak disebabkan oleh karena sifat kekakuan bentuk pengaturan ini, selanjutnya lihat, Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1983, hlm.57.
12. Lihat, Munir Fuadi, *Hukum Bisnis, Dalam Teori dan Praktek*, Buku Kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.135.

pembatas sebagaimana disebut diatas, menyebabkan bunga murah itu tidak terlalu menjadi perangsang bagi penduduk untuk meminjam di lembaga kredit formal. Bahkan tidak jarang tingkat bunga yang murah itu menjadi lebih tinggi¹³ manakala penduduk pedesaan itu memperhitungkan banyaknya waktu, tenaga dan ongkos yang dikeluarkannya guna mengurus untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga kredit formal itu.

Lembaga kredit formal tersebut oleh masyarakat pedesaan dianggap kalah atraktif dengan institusi finansial informal yang menjamur dalam aktivitas pelepas uang. Institusi finansial informal ini berkembang selain karena perkembangan pasar, juga sebagai reaksi terhadap sulitnya aturan-aturan kredit formal yang disediakan oleh institusi finansial formal. Fasilitas yang disediakan oleh institusi ini banyak dimanfaatkan oleh lapisan bawah yang pada umumnya kurang berpendidikan dan kurang mengetahui regulasi perbankan.¹⁴ Sulit sekali untuk melacak kembali data statistik yang berkaitan dengan berapa besar jumlah pelepas uang informal yang beroperasi di pedesaan saat ini. Kesulitan ini mengacu pada sifat aktivitas pelepas

13. Edy Suandi Hamid, *loc cit*, hlm.5.

14. Gunawan Sumodiningrat, *Peranan dan Prospek Perkredit-tan Rakyat Dalam Rangka Kebijakan PAKTO*. Makalah Seminar, 6 Januari 1990, Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.

uang itu yang tergolong dalam "*ekonomi gelap*", sehingga para ekonom dan ilmuwan sosial tidak banyak memperhitungkannya.

Tingkat bunga yang sangat tinggi dalam pasar kredit informal di daerah pedesaan di negara-negara sedang berkembang sering diinterpretasikan sebagai sebuah ekspresi keterbelakangan, baik dalam literatur ekonomi maupun sosiologi pembangunan. Aktivitas pelepas uang yang mempunyai *etos kerja* menghasilkan "*keuntungan sebanyak mungkin*", disinyalir sebagai penyebab jatuhnya para petani atau pedagang kecil ke dalam perangkap utang.¹⁵ Hal tersebut yang mendatangkan situasi "*perhambaan bunga*", kendatipun kehidupan mereka dalam kondisi *subsisten*.¹⁶ Suasana seperti ini diduga diciptakan oleh pelepas uang dengan cara memelihara *ketergantungan*

15. Situasi tersebut agaknya diciptakan oleh pelepas uang dengan cara memelihara hubungan baik dengan nasabah sehingga jalinan utang tetap terpelihara. Strategi yang ditempuh dengan transaksi: "*Interest for ever and capital never*", artinya pengembalian kapital dapat berjangka lama asal bunga dibayar setiap waktu angsuran, merupakan salah satu cara untuk melanggengkan hubungan tersebut. Hubungan kedua pihak dengan demikian cenderung bersifat eksploitatif. Lihat Michael Lipton, *Agricultural Finance and Rural Credit in Poor Countries*, dalam *World Development*, Vol. 4, No. 7, 1976, hlm. 547.

16. Ilustrasi yang lebih jelas mengenai masyarakat yang hidup dalam kondisi *subsistensi*, lihat, James Scott, *The Moral Economy of The Peasant, Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*, diterjemahkan Hasan Basari, Jakarta: LP3ES, 1981, hlm.19-49.

nasabah terhadapnya sehingga utang tetap berlangsung.

Beberapa dekade yang lalu, kebijakan kredit dibidang pertanian telah dicanangkan, yakni untuk mengatasi ketergantungan petani terhadap pelepas uang, meningkatkan produktivitas dan mengintegrasikan sektor pertanian dengan pasar. Kebijakan pemerintah yang ditempuh misalnya pelayanan kredit dengan bunga murah melalui *Bank Rakyat Indonesia, Badan Kredit Kecamatan, Badan Perkreditan Rakyat, Lumbung Pitih Nagari* dan sebagainya, yang sasarannya adalah lapisan masyarakat bawah di pedesaan.¹⁷ Akan tetapi, kredit pemerintah yang ditawarkan tersebut kadang-kadang terancam gagal¹⁸ mencapai target karena pelepas uang dengan bunga yang relatif tinggi lebih populer daripada kredit pemerintah.

Hasil penelitian yang dilakukan *Mintoro* tahun 1977 di enam desa DAS (Daerah Aliran Sungai) Cimanuk, membuktikan bahwa ternyata sebagian besar dari petani kecil

17. Edy Suandi Hamid, *loc cit*, hlm.6.

18. Sebuah penelitian di desa Cepogo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara memperlihatkan, bahwa pelaksanaan program kredit dapatlah dikatakan belum berhasil. Dalam pelaksanaan Kredit Usaha Tani (KUT) selama beberapa musim, jumlah nasabah yang menunggak diatas 20 persen, sehingga pinjaman pada musim-musim berikutnya terpaksa tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan Kredit Candak Kulak misalnya, sejak tahun 1988 terpaksa dihentikan karena banyaknya nasabah yang macet mengembalikan pinjaman. Selanjutnya lihat, M. Musiyam dan Khudzaifah Dimiyati, *Bank Titil dan Perekonomian Desa*, dalam *Suara Merdeka*, Senin, 10 Agustus 1992, hlm.6.

dilayani oleh sumber-sumber kredit informal seperti pengijon dan rentenir.¹⁹ Sementara itu penelitian yang dilakukan Colter tahun 1984, di beberapa desa di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sulawesi memperlihatkan, bahwa 34,5 persen dari responden yang terlibat dengan kredit, hanya 15 persen yang berhubungan dengan kredit formal, sedangkan 19 persen terlibat dengan perkreditan informal.²⁰

Institusi finansial formal ternyata dalam memberikan pinjamannya menggunakan prinsip-prinsip perbankan, kurang fleksibel, prosedur administrasi yang berbelit-belit, penggunaan dana yang diawasi secara ketat dan memerlukan waktu relatif lama untuk menunggu cairnya kredit.

Masyarakat pedesaan itu sendiri tidak terbiasa dengan budaya administrasi, sehingga merasa enggan apabila harus mengurus prosedur administrasi yang rumit, yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Dengan tingkat penghasilan mereka, kadang-kadang memerlukan pinjaman dalam waktu cepat untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Dalam situasi seperti itu, mereka terpaksa

19. Mintoro, Abunawan. 1977. et.al. *"Aspek-Aspek Kelembagaan dalam Pembangunan Pertanian"*. Bogor: Survey Agronomi. hlm. 14.

20. Colter, Yusuf M. 1984. *Masalah Perkreditan dalam Pembangunan Pertanian*, dalam Faisal Kasryno (penyunting), *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*, hlm. 10.

meminjam pada sumber-sumber kredit informal, yang biasanya melayani pinjaman kapan saja, dimana saja, dan berapa saja yang diminta peminjam. Sementara kredit pemerintah yang ditawarkan kadang-kadang terancam gagal mencapai target karena pelepas uang dengan bunga relatif tinggi lebih populer dari pada kredit resmi.

Secara rasional, kenyataan ini merupakan *paradoks-bunga* dari pelepas uang yang tinggi yang tidak dapat dienyahkan melalui program kredit bunga murah sehingga banyak pengamat meletakkan persoalan pada adanya "*anti-modernization tradisionalism*"²¹ dari petani kecil yang sebenarnya argumen ini tidak dapat dipertahankan lagi. Persoalannya bukanlah terletak pada apa yang diintroduksi oleh program pembangunan, seperti program kredit bersifat modern (menggunakan pertimbangan rasional) dan kebiasaan petani merupakan manifestasi dari tradisionalisme, namun mempertanyakan mengapa justru pelepas uang informal lebih populer daripada program kredit bunga murah dari pemerintah.

Ada dua alasan mengapa hal itu bisa terjadi.²² Pertama, argumen yang melihat bahwa pelepas uang pada

21. Lihat, Heru N. Soegiarto dan Vidhyandika Moeljiarto, *Debitur Potensial di Pedesaan Jawa, Kasus Penerimaan Masyarakat terhadap Aktivitas Pelepas Uang*, dalam *Prisma*, Nomor 9 Tahun 1994, LP3ES, Jakarta, hlm. 60.

22. *Ibid*

khususnya dan institusi informal pada umumnya lebih bersifat atraktif daripada institusi formal. Pelepas uang beroperasi secara *luwes*, karena sering menjadikan hubungan bisnisnya bersifat personal dengan nasabah, sedangkan bank-bank formal karena tidak dikenal secara personal, maka kadang-kadang *anonim* bagi masyarakat desa. *Luwes* disini menunjukkan aktivitas cara praktik mereka yang mencoba memahami kondisi nasabah dengan periode waktu tagihan yang kadangkala tidak ketat. Kedua, pelepas uang dapat mengatasi *problem kepercayaan*, bagi masyarakat desa yang belum begitu tahu tentang sistem legal. Mereka tidak mengetahui transaksi berdasarkan *hukum*, tetapi transaksi kredit dijalankan hanya dengan kepercayaan kedua belah pihak dan hal ini sesuai dengan kebiasaan masyarakat.²³

Keadaan inilah yang menjadi persoalan dalam setiap pembangunan masyarakat desa, yakni adanya *dualisme* kebudayaan yang kadang-kadang sulit dihapuskan dan menjelma dalam *dualisme finansial*.²⁴ Kalangan ilmuwan banyak

23. Dengan kata lain hubungan-hubungan serta kontak-kontak antara para anggota masyarakat dilaksanakan dengan suatu pola tertentu, selanjutnya lihat, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986, hlm.33.

24. Bandingkan dengan pendapat J.H. Boeke, tentang *ekonomi dualistis*, dalam *Prakapitalisme di Asia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983, hlm.9-20; mengenai teori perekonomian dualistis J.H. Boeke, juga dapat

mengajukan usul bagaimana menghapus dualisme finansial tersebut, baik dengan pelaksanaan kredit bunga murah dari pemerintah untuk menekan laju operasi pelepas uang, ataupun berupaya mengintegrasikan dualisme tersebut ke dalam satu wadah yang disebut *The new view of rural financial markets*.²⁵ Walaupun bentuk konkrit sistem keterkaitan itu hingga saat ini masih dicari secara eksperimental, tetapi langkah maju telah dilakukan dengan mengaitkan bank resmi dengan kelompok swadaya masyarakat. Eksperimen di Indonesia telah dilakukan dengan mewujudkan kerjasama finansial antara Bank Indonesia dengan beberapa kelompok swadaya masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh kelompok swadaya masyarakat tersebut adalah memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat lapisan bawah dan mendidik mereka untuk menabung.²⁶

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, yang pada intinya bertujuan menekan praktik pelepas uang informal

...Continued...

dilihat dalam Yahya Muhaimin, *Bisnis dan Politik, Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950 - 1980*, Jakarta: LP3ES, 1991, terutama hlm. 56-57.

25. Dale W. Adams dan Dauglas H. Graham, *The Study of Financial Dualism Dates Back to Hla Myint*, dalam *Economic Theory and Underdevelopment Countries*, Oxford University Press, 1971, hlm.315.

26. Hans Dieter Seibel, *The Role Of Self-help Promoting Institution in Rural Finance, The Example of Indone-sia*, Makalah disampaikan dalam *Chief Executive Conference on Banking with Self-help Groups*, Kunming, Cina, 15 - 16 Oktober 1990.

sehingga lapisan bawah tidak terjebak dalam jeratan *lintah darat*, namun profesi tersebut tetap beroperasi di pedesaan, tidak ada tanda-tanda surut dan bahkan dalam berbagai kondisi dan lingkungan berkembang sejalan dengan aktivitas ekonomi. Untuk itu, membahas secara *thick discription*²⁷ fenomena pelepas uang di pedesaan sangat penting dalam upaya untuk menemukan kebijakan finansial di pedesaan yang sesuai dan diarahkan pada kelompok lapisan bawah yang relatif banyak membutuhkan kredit.

Dari uraian sebagaimana dipaparkan diatas, diajukan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah profil pelepas uang (rentenir) di Kartasura, sehingga dalam praktik lebih banyak diminati masyarakat desa dibandingkan program kredit bunga murah dari pemerintah ?
2. Bagaimanakah mekanisme yang dilakukan dalam transaksi kredit antara pelepas uang (rentenir) sehingga menimbulkan ketergantungan para nasabah di pedesaan ?
3. Dalam perspektif hukum, apakah secara substansial pelepas uang memperoleh legitimasi dalam melaksanakan aktivitasnya ?

27. Mengambil istilah dari Clifford Geertz dalam *The Interpretation of Cultures*, Basic Books, 1973, diterjemahkan oleh Fransisco Budi Hardiman, Yogyakarta: Kanisius, 1992, hlm. 6. *Thick discription* merupakan upaya menjelaskan suatu fenomena sosial dengan jelas, ringkas dan padat.

Penelitian ini berusaha memperoleh kejelasan mengenai profil pelepas uang (rentenir) yang melakukan aktivitasnya di kawasan pedesaan. Pilihan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya tidak terlepas dari pertimbangan karakter masyarakat yang akan diteliti. Hal-hal yang berkaitan dengan metoda penelitian dalam tesis ini tersaji dalam lampiran 1.

A. Definisi Operasional

Dalam rangka untuk mempersamakan persepsi serta menghindari perbedaan interpretasi, berikut ini dijelaskan beberapa pengertian pokok yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Istilah *profil*, lebih menekankan pada sketsa biografis, tentang wajah dari seseorang.²⁸ Dalam hubungan ini lebih mendeskripsikan pada penampilan dan sepak terjang seseorang dalam suatu aktivitas tertentu. Sedangkan istilah *praktik*, mengacu pada perilaku secara nyata²⁹ dalam realitas sosial.

Sementara itu, istilah *pelepas uang* atau *moneylenders* yang terkenal dengan sebutan *rentenir*,

28. Lihat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.702.

29. *Kamus Bahasa Indonesia*, *ibid*, hlm.698.

menurut Dale W. Adams,³⁰ adalah individu yang memberikan pinjaman kredit berjangka pendek, tidak menggunakan jaminan yang pasti, bunga relatif tinggi dan selalu berupaya melanggengkan hubungan kredit dengan nasabahnya. Profesi ini sebagian besar beroperasi di pasar-pasar desa atau juga berkunjung dari rumah ke rumah, secara aktif.

Masyarakat transisi atau transisional, sebagaimana dikemukakan Heru N. Soegiarto,³¹ merupakan masyarakat yang sedang mengalami perubahan nilai, dari sistem pertanian tradisional yang berorientasi pada *subsistensi*, menuju masyarakat yang berorientasi pada pasar.

B. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosiologis (socio legal research)*.³² Artinya, pendekatan ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-

30. Dale W. Adams, "Taking a Fresh Look at Informal Financial, dalam *Economics and Sociology Occasional Paper No. 1592*, Study in Rural Finance Serie, July, 17, 1989, Agriculture Finance Program, Departement of Agricultural Economics and Rural Sociology, The Ohio State University, hal. 2-3.

31. Heru N. Soegiarto, *loc cit*, hlm.68.

32. Lihat, Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.35.

aspek hukumnya, serta mencoba menjelajahi realitas empirik dalam masyarakat. Dalam hubungan ini, karakteristik khusus dari analisis-analisis di dalam sosiologi hukum mencoba untuk menghubungkan antara hukum dan perilaku sosial.³³

33. Adam Padgorecki dan Christopher J. Whelan, (ed), *Sociological Approaches To Law*, diterjemahkan oleh Rnc. Widyarningsih dan G.Kartasaputra, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm.272.

BAB II

PERBINCANGAN TEORI TENTANG PELEPAS UANG (RENTENIR) DALAM MASYARAKAT

Suatu teori merupakan seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.¹ Batasan diatas mengandung tiga hal. *Pertama*, sebuah teori adalah seperangkat proposisi yang terdiri atas konstruk-konstruk yang terdefinisikan dan saling terhubung. *Kedua*, teori menyusun antarhubungan seperangkat variabel (konstruk) dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomen-fenomen yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu. *Ketiga*, suatu teori menjelaskan fenomen.

A. Asal Usul Sosial Pelepas Uang

Pelepas uang atau sering disebut dengan *rentenir*, merupakan perkembangan dari hutang piutang yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pada tataran ini, *pelepas uang* sudah merupakan salah satu bentuk profesi bagi pemilik modal untuk dapat mengembangkan modalnya dengan

1. Lihat, Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1970, hlm.14.

mendapat bunga. Obyek dari pelepas uang pada umumnya berupa uang, dan berlaku diantara anggota masyarakat, baik antar famili maupun tetangga atau atas dasar kepentingan masing-masing pihak.

Aktivitas pelepas uang yang hidup dalam masyarakat, merupakan profil dari praktik perkreditan yang dikelola secara individual yang tidak terorganisasi dan pada umumnya mempunyai pengaruh yang kurang baik terhadap peminjamnya.² Hal ini disebabkan untuk sebagian karena bunganya yang tinggi, yang harus dibayar dari penghasilan yang sangat kecil, sedangkan yang lainnya karena terlalu sering terjadi bahwa kepentingan pemberi kredit mengharuskannya untuk terus mengikat penerima kredit dengan hutang kepadanya, dengan demikian melanggengkan ketergantungan ekonominya.

Pada dasarnya, aktivitas perkreditan yang dikelola pelepas uang dapat dikategorikan sebagai sektor informal yang bergerak untuk mencari bunga, dan sifat pelepas uang itu tergolong dalam pekerjaan *ekonomi gelap*.³ Inilah salah satu karakteristik dari negara-negara dunia ketiga,

2. Lihat, Sumitro Djojohadikusumo, *Kredit Rakyat Dimasa Depresi*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm.24.

3. Heru N. Soegiarto, *loc cit*, hlm.56.

sebagaimana dilukiskan *Robert P. Clark*⁴ dalam bukunya *Power and Policy in the Third World*, yang mengungkapkan salah satu laporan pemerintah di kota *Lima*, Peru, tahun 1987, yang memperkirakan bahwa sepertiga dari angkatan kerja kota telah memasuki *ekonomi gelap*. Meskipun begitu, apa yang diketahui oleh semua orang adalah pedagang-pedagang yang bergerak di sektor informal tersebut beroperasi secara ilegal.

Sementara itu, *Hernando De Soto*,⁵ juga mengungkapkan keberhasilan peran sektor informal di Peru selama empat puluh tahun terakhir ini. Aktivitas sektor informal telah menjadi tempat bagi 48 persen penduduk Peru, yang giat dalam perekonomian dan 61,2 persen jam kerja diabdikan pada kegiatan-kegiatan informal yang memberikan sumbangan sebesar 38,9 persen pada produk domestik bruto (PDB) yang tercatat dalam neraca pendapatan negara. Diperkirakan, aktivitas sektor informal akan terus berkembang, dan pada tahun 2000 akan menghasilkan 61,3 persen dari PDB yang tercatat dalam neraca pendapatan. Sementara itu peranan sektor informal dibidang keuangan sebagaimana pengamatan empirik, yang

4. Lihat, *Robert P. Clark*, *Power and Policy in the World*, Fourth Edition, Macmillan Publishing Company, New York, 1991, hlm.172.

5. Lihat, *Hernando De Soto*, *Masih Ada Jalan Lain, Revolusi Tersembunyi Di Negara Dunia Ketiga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.14.

dilakukan Si Dam Kim,⁶ memperlihatkan bahwa di Korea pasar kredit informal utama perkotaan juga di dominasi oleh apa yang disebutnya sebagai "*Informal Credit Markets*". Dengan demikian, ternyata sektor informal baik di bidang perdagangan maupun perkreditan telah memperlihatkan peranan yang penting⁷ di berbagai negara.

Di Indonesia, sektor informal dibidang perkreditan yang menjelma sebagai pelepas uang, memiliki sejarah perjalanan yang panjang untuk menjalankan usaha perkreditan dalam suatu lingkungan yang menguntungkan. Dalam hubungan ini dapatlah ditelusuri melalui penyediaan kredit yang tidak terorganisasi. Saling memberikan kredit antara masyarakat Indonesia sendiri atau *kredit bumi putera*, menurut Fruin 1937,⁸ berkaitan dengan jiwa gotong royong. Sejarah perkreditan bumi putera, yang menyangkut uang, berkaitan erat dengan dengan faktor-faktor seperti perubahan keinginan individu, penetrasi

6. Lihat, Si Dam Kim, *Some Issue in the Study of Informal Credit Markets*, Resource Paper for the ADB Workshop, 1986, hlm.15.

7. Lihat, *The Financial Cost of Agricultural Credits: A Case Study of Indian Experience*, World Bank Staff Working Paper No.296, October 1978, hlm.6.

8. Jan T.M. van Laanen, *Diantara De Javasche Bank dan Ceti-ceti Cina: Perbankan dan Kredit di Indonesia pada Zaman Kolonial*, dalam Anne Booth, William J.O'Malley, Anna Weiddemann, *Sejarah Ekonomi Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988, hlm.351.

ekonomi keuangan, adanya sistem barter dan jiwa gotong royong.

Sementara itu, pinjaman kepada para *ceti*, biasanya orang Cina, adalah suatu jenis perkreditan pedesaan yang tidak terorganisasi. Cina *minding* itu mendapatkan namanya dari profesi mereka berkeliling di desa-desa atau ke pasar-pasar, untuk menagih bunga atau riba dari modalnya tersebut. Biasanya ia hanya meminjamkan sejumlah kecil uang kepada banyak langganannya, terutama terdiri dari pedagang kecil, pedagang penjaja, isteri petani yang berjualan di pasar atau di pinggir jalan. Cina *minding* itu modal kerjanya dari orang-orang sebangsanya yang lebih berada.⁹

Sisi negatif dari pelepas uang adalah tingginya suku bunga, hal ini disebabkan oleh: *Pertama*, adanya kebutuhan yang sangat mendesak; *Kedua*, kecenderungan untuk mengabaikan tanggung jawab dan kebutuhan-kebutuhan mendatang; *Ketiga*, secara umum masyarakat kurang berpengetahuan tentang soal-soal keuangan. Faktor-faktor dari pihak yang menyediakan kredit itu mencakup ongkos yang tinggi dalam hal kredit kecil-kecilan dan jaminan yang agak riskan. Salah satu perdebatan penting tentang pelepas uang atau rentenir di pedesaan adalah mereka memiliki

9. *Ibid*, hlm.352.

kekuatan monopoli.¹⁰

B. Masyarakat yang Berubah

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Perbedaan hanya terdapat pada sifat atau tingkat perubahan itu. Perubahan dapat kentara dan menonjol atau tidak, dapat cepat atau lambat, dapat menyangkut soal-soal yang fundamental bagi masyarakat bersangkutan atau hanya perubahan yang kecil saja. Akan tetapi, bagaimanapun sifat dan tingkat perubahan itu, masyarakat akan senantiasa mengalaminya.¹¹ Karl Marx,¹² misalnya dapat disebut sebagai seorang pencipta teori tingkatan, dalam pandangannya masyarakat adalah suatu organisme yang hidup, yang berkembang menurut garis dan hukum yang tertentu.

Suatu ciri yang melekat pada masyarakat dalam perkembangannya adalah terjadinya diferensiasi. Melalui

10. Lihat, *Indonesia Rural Credit Survey*, Indonesia Programs Division, July, 1982, hlm.87, Gordon Donald, *Credit For Small Farmers In Developing Countries*, Westview Press Boulder, Colorado, 1976, terutama halaman, 87-94, selanjutnya lihat pula, *Agricultural Credit*, World Bank Paper - Rural Development Series, August, 1974, hlm.24.

11. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986, hlm.95.

12. Mohammad Hatta, *Pengantar Ke Jalan Ekonomi Sosiologi*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1985, hlm.14.

proses diferensiasi ini suatu masyarakat menjadi terurai ke dalam berbagai bentuk bidang spesialisasi yang masing-masing sedikit banyak mendapatkan kedudukan otonom. Oleh karenanya susunannya menjadi semakin komplek. Proses diferensiasi ini hanya akan menimbulkan perkembangan bagi sistem sosial yang bersangkutan, apabila diferensiasinya ke dalam komponen baru itu menimbulkan daya adaptasi yang lebih besar dibanding dengan kemampuan dari komponen-komponen yang digantikannya dalam menjalankan fungsi-fungsi primernya (Parsons, 1971: 26-28).¹³

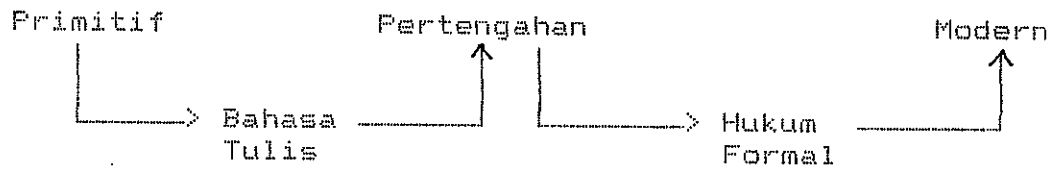
Pembagian ke dalam sub sistem primer dari Parsons, maka dalam proses diferensiasi ini kejadiannya juga melibatkan sub sistem tersebut. Dengan latar belakang perkembangan yang demikian itu berarti, sub sistem tersebut lalu memperoleh kedudukannya yang otonom, yakni masing-masing: kebudayaan, hukum, politik dan ekonomi.

Diferensiasi masyarakat di bidang fungsi integratif diperlihatkan dengan munculnya sistem hukum formal. Perkembangan yang demikian ini sekaligus juga menandai kelahiran suatu masyarakat modern. Parsons, menjabarkan evolusi masyarakat ke dalam tiga tahap, yakni: primitif, pertengahan dan modern. Pentahapan evolusi masyarakat

13. Lihat, Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.49.

menurut *Parsons*¹⁴ dapat dilihat dalam ragaan 1, berikut:

Ragaan 1: Pentahapan evolusi masyarakat menurut *Parsons*



Pada masa-masa peralihan dari zaman yang satu ke yang lain, dijumpai adanya saat-saat yang berfungsi sebagai jembatan bagi terjadinya pergantian tersebut. Peralihan masa primitif ke pertengahan ditandai oleh munculnya bahasa tertulis, sedangkan sistem hukum formal menandai peralihan dari masa dari masa pertengahan ke modern. Bahasa tertulis mempunyai peranan untuk turut merubah struktur masyarakat khususnya memisahkan wilayah kebudayaan dari sosial. Dengan pemunculan bahasa tertulis tersebut dimungkinkanlah kebudayaan tersebut berkembang secara lebih otonom, oleh karena ia tidak lagi tergantung pada daya kemampuan ingatan manusia. Pendobrakan terhadap struktur yang lama tampak disini dalam hal, bahwa barang kebudayaan kini tidak lagi merupakan monopoli lapisan elit yang kecil pada tingkat atas pelapisan sosial, melainkan sudah meluas hak milik orang banyak.

14. Satjipto Rahardjo, 1983, *ibid*, hlm.50.

Hukum formal, juga menjalankan peranan yang sama seperti dilakukan oleh bahasa tertulis tersebut, yakni dalam hal melakukan pendobrakan struktur sosial yang ada. Dengan pemunculan sistem hukum formal ini maka fungsi integratif dalam masyarakat itu, tidak lagi dilakukan oleh kekuasaan politik menurut kehendaknya sendiri.¹⁵

Berbagai argumentasi yang dapat dikemukakan yang dapat dipandang sebagai sebab bagi timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat. D.H. Burger, ¹⁶ melihat bahwa sudah hampir setengah abad di desa Jawa berlangsung proses peralihan dari yang lama ke yang baru. Menurut-nya, ekonomi feodal yang kuno dijadikan rumah tangga lalu lintas modern. Rumah tangga desa yang sangat tertutup telah terbuka dan transparan untuk lalu lintas ekonomi. Perputaran uang telah begitu dalam mempengaruhi rumah tangga hasil bumi yang kuno. Hasil bumi, tenaga dan tanah masuk kedalam masuk kedalam lalu lintas ekonomi.

Perubahan ekonomi ini juga disertai dengan perubahan-perubahan sosial. Pada dasarnya, perubahan sosial timbul atau terjadi melalui tiga macam kemungkinan:¹⁷

15. Satjipto Rahardjo, 1983, *ibid*, hlm.51.

16. Lihat, D.H. Burger, *Perubahan-Perubahan Struktur Dalam Masyarakat Jawa*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1983, hlm.140.

17. Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm.12.

Pertama, penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial tersebut terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar (*extra systemic exchange*); Kedua, pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional; Ketiga, penemuan-penemuan baru oleh anggota-anggota masyarakat.

Sementara itu, pembaharuan kehidupan ekonomi mengakibatkan diterimanya sejumlah besar bentuk baru lalu lintas uang oleh masyarakat. Dengan perputaran uang yang cepat dalam masyarakat, berarti terjadi pula lalu lintas kontrak, meskipun kontrak merupakan sesuatu yang bersifat pribadi. Sekalipun kontrak dikuasai adat, akan tetapi keputusan pribadi dari pihak-pihak yang bersangkutan diperlukan pula. Dengan demikian, bertambahnya lalu lintas uang berarti mempercepat proses individualisasi dan monetisasi. Adanya rasio monetisasi merupakan salah satu ciri khas yang terpenting dari tingkat dan jalannya pembangunan ekonomi (*Goldsmith 1969; Chandravarkar 1980*).¹⁸ Disamping itu, percepatan proses individualisasi dan monetisasi telah dibarengi dengan melemahnya hubungan-hubungan kemasyarakatan dan bertambah merdekanya individu.

Lalu lintas uang, memang merupakan sesuatu yang baru di pedesaan sebagai akibat pengaruh Barat. Lalu lintas

18. Jan T.M. van Lannen, *loc cit*, hlm.332.

uang berasal dari masyarakat Barat yang strukturnya sama sekali berlainan dari struktur masyarakat Jawa. Oleh karena itu, perubahan-perubahan yang dikehendaki barang tentu harus juga memikirkan sistem nilai-nilai mana yang pada suatu saat perlu menjadi kerangka untuk mengatur. Di Indonesia, pilihan-pilihan itu dapat dilakukan berhadapan dengan kemajemukan nilai-nilai antara lain; *Pertama*, Indonesia asli, artinya sebelum Barat masuk ke negeri ini, seperti dapat dijumpai dalam hukum adat; *Kedua*, Barat atau Eropa; *Ketiga*, nilai-nilai yang terbentuk semenjak kemerdekaan, seperti dapat dijumpai dalam Pancasila.¹⁹ Berikut ini adalah percobaan untuk membandingkan ketiga sistem nilai tersebut, yang tampak dalam ragaan 2:

Ragaan 2: Penjajaran nilai-nilai

Nilai-nilai Indonesia asli	Nilai-nilai yang berasal dari Barat	Nilai-nilai sejak kemerdekaan
1. Mengutamakan kolektivitas	1. Individuaistis	1. Pembinaan bangsa
2. Ekonomi jasa	2. Ekonomi pasar	2. Keadilan sosial
3. Statis, karena melayani ekonomi pertanian yang subsisten	3. Berorientasi kepada perubahan	3. Pembangunan

19. Satjipto Rahardjo, 1983, *loc cit*, hlm.163

Dari pemaparan diatas memperlihatkan, bahwa ketiganya bersifat kompetitif dan oleh karena itulah menjadi penting untuk senantiasa menyadari kearah mana perubahan itu hendak diarahkan. Perubahan yang menjurus kepada masyarakat modern, seperti yang dapat dijumpai pada umumnya di negara-negara Barat, pasti akan mensyarakatkan pilihan nilai-nilai yang berbeda dari perubahan yang ditujukan kepada suatu model masyarakat yang lain.

Dilihat dari teori *Parsons*,²⁰ maka sebagai usaha untuk melakukan penyusunan suatu masyarakat Indonesia baru melalui hukum, dapat dilihat sebagai perwujudan interaksi antara kebudayaan dan sistem sosial, dalam hal ini hukum. Interaksi ini masih diteruskan lagi dalam hubungannya dengan sistem ekonomi, yaitu fungsi primernya adalah adaptif, dan sistem politik. Dengan demikian, suatu teori umum tentang hukum ditujukan pada hubungan antara hukum dengan aspek-aspek kehidupan sosial lain.²¹

Sementara itu, kehidupan ekonomi di desa diatur melalui norma-norma hukum, dengan tolong menolong dan dengan gotong royong dalam bentuk-bentuk lain, yang berlandaskan kerukunan, ciri komunal di desa, serta

20. *Ibid*, hlm.164.

21. Donald Black, *Batas-Batas Sosiologi Hukum*, dalam Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut, *Hukum Politik dan Perubahan Sosial*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.41.

berdasarkan kepatuhan penduduk desa terhadap kepala desa. Pranata penduduk desa untuk saling menolong, apabila pertolongan yang diberikan akan dibalas dengan pertolongan pula atau apabila ada semangat tolong menolong yang ditunjang dan diharuskan oleh pendapat umum.²²

Hal ini tidak terdapat dalam dunia perdagangan yang sarat dengan muatan-muatan ekonomis, dalam kaitan ini orientasi keekonomian merupakan kegiatan yang menonjol, yang dapat diamati melalui aktivitas para tengkulak dan pelepas uang yang didorong oleh pertimbangan keuntungan. Dalam hubungan ini, studi tentang pasar keuangan informal pedesaan di Philipina²³ telah memperkuat hal tersebut, yang memperlihatkan bahwa pelepas uang atau rentenir yang beroperasi secara individual pada akhirnya mengalami kesuksesan karena memperkecil risiko kegagalan, dalam rangka untuk memperoleh keuntungan sebenarnya.

Dalam masyarakat transisi yang sedang mengalami perubahan nilai, dari sistem pertanian tradisional yang

22. D.H. Burger, *loc cit*, hlm.16.

23. Lihat, Gregorio S. Licaros, *A Study the Informal Rural Financial Markets in Three Selected Province of the Philippines*, Desember 1980, hlm.35.

berorientasi pada *subsistensi*²⁴, menuju masyarakat yang berorientasi pada pasar, maka kebutuhan akan uang tunai semakin mendesak. Dalam masyarakat yang demikian itulah, para pelepas uang peranannya menjadi penting, dan mencoba untuk memahami aspek sosial budaya masyarakat yang menjadi sasarannya. Para pelepas uang tahu benar bagaimana mentalitas penduduk desa. Mereka mencari kekuatannya dalam hubungan pribadi, mempelajari keadaan pribadi langganan mereka dengan sikap yang sangat luwes.

C. Strategi Pembangunan Pedesaan

Pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ternyata hanya menguntungkan sekelompok kecil orang, dan karena makin memperlebar jurang kesenjangan terhadap massa bawah.²⁵ Fakta inilah yang kemudian menumbuhkan pemahaman bahwa orientasi pembangunan selayaknya digeser dari sektor industri/perkotaan ke sektor pedesaan. Lebih jauh kemudian diyakini bahwa pergeseran orientasi pembangunan ke pedesaan akan berdampak ganda. Pembangunan pedesaan

24. Bandingkan dengan Geertz, dalam *Involusi Pertanian, Proses perubahan Ekologi di Indonesia*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, hlm.xvii.

25. Ternyata banyak penelitian yang membuktikan kegagalan asumsi pembangunan yang menekankan industrialisasi dan pertumbuhan, salah satu diantaranya adalah Yujiro Hayami dan Masao Kikuchi, *Dilema Ekonomi Desa, Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.

tidak saja dipandang efektif mengatasi pengangguran dan kemiskinan massa, tetapi sekaligus dipandang efektif mengurangi kesenjangan antar sektor yang mencolok.

Salah satu wujud strategi pembangunan yang berorientasi pedesaan adalah pembentukan berbagai lembaga perkreditan yang disebar ke pedesaan dan memperluas daya jangkau lembaga kredit formal - khususnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) - melalui BRI Unit Desa dan Koperasi Unit Desa (KUD). Disamping itu disalurkan pula ragam jenis kredit baru seperti Bimas/Inmas.

Semua strategi itu dilakukan karena sadar bahwa salah satu kelemahan masyarakat desa yang harus segera diatasi adalah keterbatasan modal. Modal adalah faktor utama dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan. Keterbatasan modal akan menjadi kendala masyarakat pedesaan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Di pedesaan terdapat banyak lembaga kredit informal yang leluasa beroperasi, misalnya rentenir, pengijon atau pelepas uang lainnya. Dengan jaminan harta benda - dalam beberapa kasus cukup dengan sekadar kepercayaan - penduduk desa dapat dengan mudah memperoleh dana dari para kreditur perorangan itu. Begitu mudahnya sehingga tidak jarang lembaga kredit informal semacam ini bersedia mengantarkan dananya ke rumah-rumah mereka yang

membutuhkan.²⁶

Persyaratan yang dituntut para pengijon atau rentenir pada umumnya memang mudah. Pelayanan relatif cepat dan uang pinjaman bisa segera diterima tanpa prosedur berbelit. Akan tetapi, yang sering kurang diperhitungkan biasanya *suku bunga* yang dikenakan sangat tinggi. Disamping itu, keterlambatan membayar cicilan atau hutang pokok sering harus ditebus dengan penyitaan barang jaminan yang digunakan, tak peduli nilai barang itu jauh lebih tinggi dari nilai utang dan bunganya. Dalam konteks permasalahan inilah, kehadiran berbagai lembaga perkreditan rakyat yang dikelola pemerintah diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi kesulitan modal penduduk pedesaan.

Disamping itu, kehadiran lembaga perkreditan di pedesaan diharapkan juga dapat menjadi lembaga tandingan untuk mengeliminir peran para pelepas uang atau pengijon dengan bunga yang mencekik leher. Persoalannya, apakah berbagai lembaga perkreditan rakyat yang dikelola pemerintah itu sudah berhasil mewujudkan misi dan komitmennya ?

Penelitian P3PK Universitas Gadjah Mada tentang kredit pedesaan di Indonesia menunjukkan bahwa ternyata

26. Daru Priyambodo dan Bagong Suyanto, *Pemanfaatan dan Pelayanan Kredit Usaha Kecil, Penelitian di Tiga Kecamatan Provinsi Jawa Timur*, Prisma, Nomor 11, LP3ES, Jakarta, 1991, hlm.36.

hasil kerja lembaga kredit formal di daerah pedesaan dengan berbagai jenis pinjaman yang ditawarkan belum mencapai sasaran yang diharapkan.²⁷ Prosedur yang berbelit-belit, persyaratan administrasi menjengkelkan, jaminan kekayaan yang harus tersedia, serta lokasi kredit yang jauh dari tempat tinggal warga desa adalah kendala untuk memanfaatkan lembaga itu secara optimal.

Barangkali tingkat bunga yang dikenakan lembaga kredit pedesaan resmi ini relatif murah. Akan tetapi akibat adanya faktor-faktor pembatas itu, *bunga murah* yang ditawarkan tak mampu menjadi perangsang untuk meminjam ke badan kredit pedesaan. Bahkan jika diperhitungkan segi waktu, tenaga serta ongkos yang harus dikeluarkan jika meminjam ke lembaga kredit formal, tingkat bunga yang dikenakan rentenir akhirnya lebih rendah. Apalagi dengan adanya persyaratan agunan atau jaminan yang diminta masyarakat seringkali dianggap makin memberatkan.

Adanya keterbatasan penyediaan dana murah dan kurang dekatnya dana tersebut dengan masyarakat pedesaan,²⁸ mengakibatkan banyak penduduk desa yang membutuhkan bantuan modal terjerat oleh kreditur informal, yang

27. Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, *loc cit*, hlm.5.

28. Subardjo Darmojuwono dan Pangestu Subagyo, *Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah*, dalam Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, *Kredit Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 1986, hlm.17.

biasanya mengenakan bunga yang sangat tinggi atas pinjamannya. Dilandasi pemikiran ini, 4 September 1969 Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah mengeluarkan

G.226/1969

Surat Keputusan Nomor Dsa _____ jo tanggal 19
8/2/4

Nopember 1970, mulai didirikan Badan Kredit Kecamatan di beberapa daerah di Jawa Tengah. Sebelas tahun kemudian dasar hukum pembentukan Badan Kredit Pedesaan ini dikeluarkan berupa Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1981, yang juga mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri dengan SK Nomor 581 053.3 - 884 tanggal 17 Desember 1981. Dengan dikeluarkannya Perda ini, status Badan Kredit Kecamatan menjadi lembaga perkreditan yang dibentuk Badan Usaha Daerah, yang pertanggungjawabannya di setiap wilayah kabupaten/kotamadya daerah tingkat II diserahkan kepada bupati/walikota yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1981, ada empat fungsi Badan Kredit Kecamatan. *Pertama*, mendekatkan permodalan dengan sistem perkreditan yang mudah, murah dan mengarah pada masyarakat, terutama yang tinggal di pedesaan. *Kedua*, membentuk modal masyarakat yang diarahkan pada peningkatan produksi. *Ketiga*, melindungi masyarakat pedesaan dari pengaruh pelepas uang; dan *keempat*, membimbing masyarakat pedesaan untuk lebih mengenal dan memahami asas-asas ekonomi dan permodalan.

Sementara itu, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mencoba program baru di bidang perkreditan pedesaan. Program ini - sesuai dengan tujuannya yakni membantu penyediaan dana bagi kegiatan produktif rakyat kecil di pedesaan - yang diberi nama Program Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK). Program yang dibentuk dengan Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 002-2/4/1980 ini pertama kali dicoba pada tahun 1979/1980 di Madura. Selain dari APBN sebagai dana pendamping, sumber dananya terutama adalah dana bantuan dari pemerintah Amerika Serikat (*US-AID*).

Karena sasaran utamanya adalah peningkatan ekonomi rakyat kecil sekaligus berupaya memerangi pelepas uang liar, program ini menawarkan beberapa kelebihan: proses pencairan pinjaman cepat, prosedur sangat sederhana dan yang terpenting tidak mensyaratkan adanya agunan. Kalau pun ada yang bisa disebut jaminan, itu hanya rekomendasi *kelayakan meminjam* dari Ketua Kelompok Nasabah dan Petugas Pos Pelayanan Desa.

Di Sumatera Barat misalnya, terdapat Lumbung Pitih Nagari suatu lembaga perkreditan masyarakat di tingkat desa/kelurahan, yang dalam aktivitasnya mengutamakan fungsi sosialnya daripada komersial. Lumbung Pitih Nagari bersifat tolong menolong dan kekeluargaan, yang pada mulanya berdasarkan kepada keturunan, hubungan pertalian darah dan berdasarkan nilai-nilai luhur yang dianut dalam kebudayaan Minangkabau. Lembaga

kekeluargaan ini diarahkan pada usaha ekonomis, yakni simpan pinjam yang didasarkan pada asas kekeluargaan untuk meningkatkan usaha perekonomian rumah tangga melalui bentuk organisasi simpan pinjam. Lumbung Pitih Nagari telah tumbuh dan berkembang sejak zaman pemerintah Hindia Belanda. Pada zaman Jepang dan Revolusi Fisik kegiatan Lumbung Pitih Nagari terhenti disebabkan keadaan ekonomi dan politik pada waktu itu.²⁹ Pada tahun 1972, oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat, kegiatan Lumbung Pitih Nagari dikembangkan kembali, yang dimulai dengan 10 unit sebagai proyek percontohan. Sejak tahun 1972, landasan operasional kegiatan usaha Lumbung Pitih Nagari didasarkan atas Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 085 tahun 1972 dan No.43 Tahun 1974.

Sesuai dengan asas kekeluargaan dan berdasar atas kepentingan bersama antar anggota, maka Lumbung Pitih Nagari pada dasarnya bertujuan; *pertama*, mendorong pembangunan ekonomi rakyat desa melalui tabungan terarah dan pengeluaran dana secara efektif; *kedua*, membentuk dan menghimpun modal untuk pembangunan desa; *ketiga*; mewujudkan suatu lembaga perkreditan yang berfungsi sosial dengan prinsip-prinsip ekonomi.

29. Loekman Soetrisno dan Gunawan Sumodiningrat, *Lumbung Pitih Nagari di Sumatera Barat*, dalam Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, *Kredit Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 1986, hlm.37.

Dalam program Lumbung Pitih Nagari misalnya,³⁰ peranan Pemerintah Daerah Sumatera Barat hanya terbatas pada; pengambil inisiatif, menyediakan modal kerja dan menyediakan fasilitas pendidikan bagi para pemuka masyarakat yang bertugas sebagai pelaksana program tersebut. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Sumatera Barat dalam fungsinya sebagai *fasilitator* juga memberikan *payung hukum* kepada Lumbung Pitih Nagari agar lembaga ini dapat bergerak sebagai badan hukum yang memiliki tugas dan hak yang jelas.

Hal yang sama terjadi pada program Kredit Usaha Rakyat Kecil di Jawa Timur. Peranan Pemerintah Daerah Jawa Timur juga terbatas pada tugas *fasilitator*, yakni menyediakan modal kerja dan memberikan *payung hukum* pada program tersebut. Sedikit berbeda dengan Lumbung Pitih Nagari, maka pada tingkat pengelolaan dan operasionalnya, program Kredit Usaha Rakyat Kecil terkait secara organisatoris dengan Koperasi Unit Desa. Meskipun demikian, pada tingkat pedesaan, prinsip manajemen dari bawah tetap dilaksanakan.

Dalam Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah, peranan pemerintah daerah nampak masih menonjol. Pemerintah Daerah Jawa Tengah dalam pengelolaan program

30. Loekman Soetrisno, *Pengembangan Program Kredit Pedesaan Melalui Sistem Manajemen Dari Bawah*, dalam Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, *Kredit Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 1986, hlm. 72.

tersebut peranannya tidak saja terbatas pada memberikan modal kerja dan *payung hukum* pada Badan Kredit Kecamatan, akan tetapi juga ikut aktif dalam mengelola program tersebut.

D. Tipologi Institusi Finansial Informal

Secara umum, berdasarkan tipologi di berbagai negara berkembang institusi finansial informal meliputi beberapa bentuk sebagai berikut:³¹

Pertama, Pelepas Uang, (Moneylenders). Profesi ini terkenal dengan sebutan *rentenir*, yaitu individu yang memberikan pinjaman kredit berjangka pendek, tidak menggunakan jaminan yang pasti, bunga relatif tinggi dan selalu berupaya melanggengkan hubungan kredit dengan nasabahnya. Profesi ini sebagian besar beroperasi di pasar-pasar desa atau juga berkunjung dari rumah ke rumah.

Kedua, Pedagang (Merchants). Di Indonesia, pekerjaan ini terkenal dengan sebutan *mindrink*, yakni pedagang selain menjajakan dagangannya secara keliling desa juga memberikan fasilitas kredit, baik berupa barang maupun uang dan nasabah mengangsurnya dalam waktu pendek.

31. Dale W. Adams, "Taking a Fresh Look at Informal Financial, dalam *Economics and Sociology Occasional Paper No. 1592*, Study in Rural Finance Serie, July, 17, 1989, Agriculture Finance Program, Departement of Agricultural Economics and Rural Sociology, The Ohio State University, hlm. 2-3.

Ketiga, Pegadaian (*Pawnbrokers*) merupakan lembaga pegadaian informal yang tidak dikelola dengan berdasarkan aturan formal, tetapi dikelola oleh individu sebagai pemilik usaha tersebut dan beroperasi sebagai organisasi tidak resmi. Orang yang membutuhkan kredit harus menyerahkan barang sebagai jaminannya. Pegadai memiliki informasi harga barang-barang secara aktual sehingga mampu menaksir setiap agunan yang diserahkan kepadanya.

Keempat, Perantara (*Loan Brokers*). Makelar Kredit adalah individu yang memberikan informasi dan sekaligus menolong orang yang memberikan kredit dengan memperoleh imbalan dari nasabahnya. Profesi seperti ini banyak beroperasi di depan rumah gadai (pegadaian) dengan cara duduk-duduk sambil menawarkan jasanya kepada nasabah yang akan datang. Selain itu juga makelar kredit yang beroperasi secara personal di lingkungan desa.

Kelima, Pemilik Tanah Pertanian (*Landlords*), merupakan profesi pemberi kredit kepada pekerja pertanian atau petani kecil dengan cara memberikan kredit yang kemudian dibayar dengan tenaga atau hasil panen. Di Indonesia, sistem kredit seperti ini berkembang dengan nama sistem *ijon*.³²

32. Lihat Ace Partadiredja, "*Rural Credit: The Ijon System*", dalam *Bulletin of Indonesian Economics Studies*, Vol. 10, No.3, November 1974, hlm 54-71.

Keenam, Pinjaman antar Kerabat (Friends and Relatives), merupakan sistem pinjam meminjam uang diantara sesama kerabat tanpa bunga dengan mendasarkan pada rasa saling percaya. Harapan seseorang yang meminjamkan uang kepada temannya adalah apabila kelak dia membutuhkan pinjaman uang, orang yang telah dipinjami tersebut akan ganti menolongnya.

Ketujuh, Penjaga Uang (Money Guards), merupakan orang yang pekerjaannya menyimpan uang orang lain dengan cara memberikan jaminan keyakinan bahwa utangnya akan selamat. Kadang penjaga uang memberikan bunga kepada orang yang menitipkan uang, tetapi pemberian bunga sifatnya suka rela. Di pedesaan Jawa, profesi ini berkembang menjadi sistem deposit dan kredit. Orang yang sudah menabung pada seorang penjaga uang diperbolehkan mengambil tabungannya kembali, sekaligus diperbolehkan mengambil kredit sebesar uang yang telah ditabungnya.

Kedelapan, Nonrotating Saving and Credit. Institusi ini merupakan kelompok swadaya masyarakat. Kelompok tersebut berdiri secara spontan untuk memenuhi kebutuhan kredit bagi anggotanya dan juga memberikan fasilitas deposit. Namun demikian tidak ada rotasi yang pasti kapan harus menabung dan kapan dapat mengambil kredit. Kelompok ini dikelola secara suka rela oleh warga masyarakat yang berkepentingan.

Kesembilan, Kelompok Simpan Pinjam (Rotating Saving and Credit Association). Kelompok ini sama

seperti kelompok-kelompok sebelumnya, tetapi berbeda dalam hal rotasi menabung dan pengambilan kredit yang dilaksanakan dengan jangka waktu tertentu. Selain itu, berapa besarnya iuran menabung sudah ditentukan sebelumnya. Kelompok ini merupakan lembaga swadaya masyarakat.

Kesepuluh, *Saving and Credit Co-cooperative* atau Koperasi Simpan Pinjam (KOSIPA). Merupakan koperasi yang memberikan fasilitas deposit dan kredit kepada anggotanya, tetapi dalam praktiknya lebih bersifat sebagai pelepas uang. Penduduk setempat menamakannya *bank plecit* dan pemerintah menyebutnya *bank gelap*.

Koperasi ini mempekerjakan beberapa pekerja lapangan yang berfungsi sebagai pencari nasabah baru atau sekaligus menagih dan menawarkan kredit bagi nasabah lama. Bunga yang ditarik relatif tinggi, yakni 20 persen untuk setiap paket pada kredit tanpa menggunakan agunan.

BAB III

DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografi dan Penduduk

Kartasura adalah nama sebuah kota, suatu kecamatan dan sekaligus terdiri atas kawasan-kawasan pedesaan. Kota ini merupakan pusat pemerintahan serta pusat perdagangan penting bagi wilayah sekitarnya. Letak Kartasura ini kurang lebih 5 (lima) kilometer di sebelah barat kota Surakarta dan jarak dengan ibukota Sukoharjo sekitar 23 (dua puluh tiga) kilometer.¹

Wilayah Kartasura mencakup dataran seluas 124,348 hektar pada ketinggian kurang lebih 115 meter diatas permukaan laut.² Dataran ini merupakan bagian dataran rendah yang membentang di bagian barat laut Kabupaten Sukoharjo. Sebagian besar wilayah Kartasura berupa tanah kering seluas (115,887 hektar, atau 93,19 persen). Selebihnya merupakan tanah untuk fasilitas umum, terdiri atas jalan, kuburan dan sungai (8,461 hektar, atau 6,81 persen).³

1. *Laporan Monografi Kecamatan Kartasura: Kabupaten Sukoharjo*, Keadaan bulan Juli 1996, hlm. 1.

2. *Laporan Monografi Kalurahan Kartasura: Keadaan bulan Oktober 1996*, hlm.1.

3. *Ibid*

Sebagaimana terungkap pada data tata guna tanah diatas, hampir semua tanah kering terdiri atas pekarangan yang diatasnya dibangun rumah. Sementara itu, dilihat dari status pemilikan, sebagian besar tanah pekarangan merupakan milik perseorangan.⁴ Semua jalan di wilayah Kartasura berupa jalan beraspal yang menghubungkan kota dengan kawasan pedesaan.

Fasilitas pengangkutan umum yang dimiliki oleh penduduk kalurahan ini adalah sepeda, sepeda motor dan kendaraan bermotor roda empat. Menurut data registrasi kalurahan awal Oktober 1996,⁵ di kalurahan ini terdapat 951 buah sepeda, 442 buah sepeda motor, 54 buah mobil, 14 buah Bus dan 6 buah Truk.

Ketersedian sarana angkutan sebagaimana terungkap dalam data tersebut diatas membuka kesempatan luas bagi warga Kartasura untuk berinteraksi secara intensif dengan masyarakat kota. Dalam realitasnya, sebagaimana pengamatan dalam penelitian lapangan memperlihatkan, setiap hari terjadi mobilitas yang tinggi, sebagian penduduk bahkan melakukan kunjungan yang teratur, yakni penduduk yang bekerja sebagai pegawai negeri, pelajar

4. Keterangan lisan Lurah Kartasura.

5. *Laporan Monografi Kalurahan: Keadaan Bulan Oktober 1996, op cit.*

sekolah menengah, pedagang di pusat pasar dan toko dan buruh industri.

Keterbukaan terhadap sentuhan pengaruh masyarakat kota tercermin dengan berbagai jenis fasilitas umum perkotaan yakni, pasar, pusat pertokoan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Umum, Rumah Sakit, jaringan listrik umum, warung telekomunikasi, terminal kendaraan umum, kantor pos dan usaha penyewaan alat-alat pesta. Semua fasilitas umum perkotaan tersebut tersedia, sehingga secara teknis mudah dimanfaatkan oleh masyarakat Kartasura yang membutuhkan. Kepadatan penduduk di Kecamatan Kartasura tergolong cukup tinggi.

Menurut data statistik tahun 1995,⁶ penduduk di Kecamatan Kartasura berjumlah 70,279 atau rata-rata 3655 orang per kilo meter. Sementara itu, data penduduk dalam kelompok umur dan kelamin dapat dilihat dalam tabel 1 berikut:

6. Biro Pusat Statistik Kantor Statistik Kabupaten Sukoharjo, tahun 1995, hlm. 56.

**Tabel 1. Penduduk Dalam Kelompok Umur dan Kelamin
Kalurahan Kartasura Tahun 1996**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
0 - 4	533	601	1.134	7,94
5 - 9	722	842	1.564	10,95
10 - 14	563	557	1.120	7,84
15 - 19	1.071	1.102	2.173	15,22
20 - 24	1.040	1.113	2.153	15,08
25 - 29	751	953	1.704	11,94
30 - 39	860	966	1.826	12,79
40 - 49	692	704	1.396	9,78
50 - 59	400	411	811	5,68
60 -	190	200	390	2,90
	6.822	7.449	14.271	100

Sumber: Monografi Kalurahan Kartasura bulan Oktober Tahun 1996. Data diolah dari penduduk berdasar kelompok umur dan kelamin.

Dari data sebagaimana terungkap dalam tabel 1 diatas, menunjukkan manakala dilihat dari proporsi penduduk golongan muda (< 15 tahun) relatif agak rendah. Data dalam tabel 1 diatas memperlihatkan, jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori tersebut adalah 3.818 orang atau 26,75 persen. Sementara itu, penduduk usia produktif (> 15 tahun sampai usia 49 tahun) relatif tinggi yakni berjumlah 9.252 orang atau 64,83 persen.

Gerak sirkulasi keseharian penduduk kalurahan Kartasura menunjukkan mobilitas yang tinggi. Setiap hari terdapat ratusan penduduk yang bepergian karena didorong oleh berbagai tujuan, yakni bekerja, bersekolah, berdagang dan berbelanja. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi penduduk Kartasura dengan masyarakat kota cukup tinggi. Sementara itu, potret mata pencaharian penduduk

Kartasura dapat dilihat dalam tabel 2 berikut:

**Tabel 2. Mata Pencaharian Penduduk Kartasura
(Bagi umur 10 tahun keatas)**

Jenis Pekerjaan	Orang	%
Petani sendiri	-	-
Buruh tani	-	-
Nelayan	-	-
Pengusaha	-	-
Buruh Industri	429	4,99
Buruh Bangunan	1.065	12,40
Pedagang	1.670	19,45
Pengangkutan	110	1,28
Pegawai Negeri Sipil/ABRI	655	7,63
Pensiunan	196	2,28
Lain-lain	4.458	51,93
J u m l a h	8.583	100

Sumber: Monografi Kalurahan Kartasura bulan Oktober Tahun 1996. Data diolah dari Mata Pencaharian Penduduk bagi umur 10 tahun keatas.

Manakala dilihat dari segi pekerjaan sebagaimana tersaji dalam tabel 2 diatas memperlihatkan, bahwa sebagian besar penduduk angkatan kerja di Kalurahan Kartasura bekerja sebagai pedagang yang berjumlah 1670 orang atau 19,45 persen. Hal inilah yang menyebabkan merebaknya institusi finansial formal maupun informal yang beroperasi di Kartasura. Pada bulan Oktober 1996, penduduk yang berusia 10 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan sebagai buruh industri tercatat 429 orang atau 4,99 persen, buruh bangunan 1065 orang atau 12,40 persen, pengangkutan 110 orang atau 1,28 persen, pegawai negeri sipil/ABRI 655 orang atau 7,63 persen, pensiunan 196 atau

2,28 persen, selebihnya adalah lain-lain berjumlah 4458 orang atau 51,93 persen.

Meskipun di Kartasura, tidak terdapat sumber-sumber alami seperti tanah pertanian sebagai akses ekonomi, tetapi sebagian masyarakat berusaha untuk survive dengan bekerja di sektor buruh industri, buruh bangunan dan pedagang kecil-kecilan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Masri Singarimbun,⁷ di Sriharjo yang memperlihatkan ratio yang tinggi antara manusia dan tanah, dan tidak terdapatnya sumber-sumber alami selain dari tanah, telah menyebabkan sebagian terbesar dari penduduk Miri itu terpaksa menjadi miskin.

Keadaan geografi dan kependudukan sebagaimana terungkap dalam data diatas memperlihatkan meskipun sebagian besar penduduk Kartasura bermukim di kawasan-kawasan pedesaan, akan tetapi cukup terbuka terhadap sentuhan pengaruh masyarakat perkotaan. Peluang kerja⁸ di kota meningkat baik pada sektor formal maupun informal. Hal ini tampak secara jelas pada keadaan

7. Untuk lebih memahami problema kependudukan dan kemiskinan di kawasan pedesaan, selanjutnya lihat Masri Singarimbun, dalam *Population and Poverty in Rural Java: some economic arithmetic from Sriharjo*, diterjemahkan oleh Sulaeman Krisnadhi, Jakarta, Bhratara Karya Aksara, 1976, hlm.31 - 120.

8. Bandingkan dengan hasil penelitian Peluang Kerja dan Kemiskinan di Miri - Sriharjo, dalam Masri Singarimbun, *Penduduk dan Perubahan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 166.

kepadatan penduduk, mata pencaharian penduduk dan ketersediaan jumlah fasilitas umum perkotaan di Kartasura. Disamping itu, letak Kartasura, dari sudut geografis sangatlah strategis, karena terletak pada simpang antara Surakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Semarang, dan menurut catatan sejarah,⁹ Kartasura merupakan bekas ibukota kerajaan Mataram.

B. Struktur Sosial

Sebagaimana diuraikan dimuka Kartasura merupakan sebuah kota sekaligus terdiri atas kawasan-kawasan pedesaan. Kota, merupakan suatu masalah tersendiri.¹⁰ Kota tidak seperti halnya desa, suatu struktur sosial yang komunal¹¹ dan homogen. Struktur komunal mempolakan hubungan sosial berdasarkan ikatan ketetanggaan,

9. Lihat, Saroso Suyowiyoto, *Mengenai Sejarah Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah*, 1978, (tanpa penerbit), hlm. 3.
10. Untuk memberikan gambaran lebih lengkap tentang kota dan struktur ekonominya, lihat penelitian Clifford Geertz, dalam *Peddlers and Princes: Social Development and Economic Change in Two Indonesian Town*, diterjemahkan oleh S. Supomo, Jakarta: Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Indonesia, 1973.
11. Masyarakat komunal adalah kesatuan masyarakat yang relatif kecil dan homogen serta ditandai oleh pembagian kerja yang minimal, hubungan sosial yang menonjol adalah hubungan primer dan masih terikat kepada tradisi.

kekerabatan, dan keagamaan. Struktur ini lebih bercorak struktur organisasi¹² daripada struktur pasar.

Kartasura, lebih merupakan suatu perpaduan antara kota dan desa, dan hanya tersusun secara kebetulan dari struktur sosial yang terpisah-pisah. Salah satu karakteristik Kartasura sebagai sebuah kota adalah merupakan pusat birokrasi yang sekaligus sebagai kota kecamatan, jaringan pasar, pusat pertokoan, tersedianya fasilitas terminal bus umum antar kota dan antar propinsi. Hal ini merupakan semacam versi terbalik dari sistem desa. Unsur-unsur tersebut diatas telah membentuk pertumbuhan kota Kartasura sejak didirikan *Baginda Sunan Amangkurat II*,¹³ pada paroh abad ketujuh belas. Disamping itu, Kartasura juga dapat dikategorikan sebagai kota *satelit*,¹⁴ sebuah kota yang terletak di pinggir atau berdekatan dengan kota besar, yang secara ekonomis, sosial dan politis tergantung kota besar tersebut.

Struktur golongan suatu kota terutama ditentukan oleh fungsi ekonominya, dan jika suatu kota dikuasai

12. Lihat, Moh. Amaluddin, *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial, Studi Kasus Di Desa Bulugede, Kabupaten Kendal Jawa Tengah*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1987, hlm. 69.

13. Saroso Suyowiyoto, *op cit.*

14. Lihat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 463.

suatu industri, keperluan teknis industri tersebut akan benar-benar mempengaruhi struktur sosialnya. Kota-kota di Jawa¹⁵ secara khas tidak terlalu dikhususkan dalam fungsi-fungsi ekonominya, tetapi lebih cocok menjadi suatu hirarki tempat-tempat sentral pelayanan administratif, perniagaan, dan kebutuhan-kebutuhan daerah pedesaan lainnya yang berdekatan dengan kota tersebut.

Sebaliknya, tidak adanya fakta-fakta lainnya, status administratif kota dapat diambil sebagai penunjuk posisinya dalam hirarki tempat-tempat sentral. Kota, mempunyai kepentingan sebagai pengumpul dan penyalur komoditi kira-kira setaraf dengan kepentingan administratifnya, dan disekitar pusat administratif dan perniagaannya yang kembar (*alun-alun* dan pasar), terdapat fasilitas-fasilitas umum lainnya, misalnya pengangkutan, pendidikan dan lain sebagainya sesuai dengan statusnya. Dengan demikian, kota kabupaten atau kota kecamatan yang dalam realitasnya hampir tidak lebih dari sebuah kampung¹⁶ akan menunjukkan bukan hanya status politik dan administratif, tetapi juga pasar, toko, sekolah, masjid, atau rumah sakit yang terdapat di kota itu.

15. Lihat, Lance Castles, *Religion, Politics, and Economic Behavior in Java: The Kudus Cigarette Industry*, diterjemahkan oleh J. Sirait, S.Th, Jakarta: Sinar Harapan, 1982, hlm. 87.

16. Lance Castles, *ibid.*

Di Kartasura setidaknya-tidaknya terdapat dua daerah perdagangan, yang satu berupa pasar di pusat kota, yang berada di sebelah selatan jalan protokol dan yang lain merupakan pusat pertokoan yang berderet sisi utara dan selatan jalan utama. Toko-toko yang termasuk kategori besar didominasi oleh etnik keturunan Cina, dan lebih bersifat kekotaan. Kebanyakan toko-toko milik etnik keturunan Cina menjual barang-barang kelontong, pakaian, perhiasan, elektronik, makanan-makanan *luks* tertentu.

Akan halnya pasar, yang dalam arti fisik merupakan seperangkat bangsal, tempat-tempat yang disewakan kepada para pedagang oleh pemerintah, hampir segala kebutuhan pembeli dijual disana baik dalam skala kecil maupun besar. Di pasar inilah tempat bertemunya para pedagang dan pembeli, tumbuh subur institusi finansial informal seperti rentenir yang menawarkan dananya untuk dipinjam para bakul kecil-kecilan. Disamping itu, juga institusi finansial lainnya seperti Koperasi Simpan Pinjam (KOSIPA), yang dalam praktiknya mirip dengan praktik rentenir. Pola perdagangan merupakan pola yang sifatnya sangat individual - yang semuanya Jawa yang hampir semua merupakan pedagang profesional. Banyak pula para pedagang yang berjualan di luar pasar yang sebenarnya. Mereka mendirikan tenda yang berjejer-jejer di sekitar pasar. Bahkan ada bakul-bakul kecil yang berjualan *kembang* berderet-berderet ditepi jalan protokol persis di bawah jembatan penyeberangan di pusat Kartasura.

Ada sejumlah kecil toko yang cukup baik yang dimiliki oleh orang-orang Jawa dalam daerah-daerah bisnis, tetapi baik jumlah maupun luas kegiatan mereka sulit menghadapi persaingan orang-orang etnik Cina, disebabkan karena keterbatasan modal mereka. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa kehidupan usaha di Kartasura berpusat pada perdagangan setempat.

Sementara itu, Kantor-kantor pemerintahan dan sekolah-sekolah membentuk birokratis dalam struktur sosial perkotaan. Pola permukiman kota cenderung mencerminkan kerenggangan hubungan umum antara kelompok-kelompok utama. Orang-orang etnik Cina tinggal di toko-toko mereka, yang kebanyakan berada di sepanjang sisi kiri dan kanan jalan utama. Orang-orang kota yang berhasil kebanyakan pegawai dan pedagang - tinggal dalam rumah batu bata kurang lebih secara acak di sepanjang jalan-jalan yang lain.

Struktur sosial kelas bawah cenderung tidak tinggal di sepanjang jalan, melainkan di blok-blok yang dibatasi oleh jalan-jalan sebagai titik-titik dalam permukiman-permukiman yang oleh orang Indonesia disebut sebagai *kampung*.¹⁷ Permukiman jenis kampung ini merupakan ciri khas kehidupan kota dan kota besar di manapun di daerah

17. Wawancara mendalam dengan Suyono, Kepala Urusan Pemerintahan, Kalurahan Kartasura, 8 Oktober 1996.

Jawa,¹⁸ dan malah merupakan suatu penafsiran kembali dari pola-pola pedesaan dalam lingkungan yang lebih padat dan kurang terintegrasi secara organis kota. Dalam pola perkampungan, blok-blok dimiliki oleh satu dua orang dan tinggal di rumah-rumah batu bata yang menghadap ke jalan. Rumah-rumah gedek kecil tidak banyak, tetapi masih ditemui di kawasan-kawasan kampung, berdiri secara tidak beraturan, seringkali tanpa ada sedikit pun jarak diantara mereka. Rumah-rumah gedek biasanya dimiliki oleh sang penghuni sendiri, meskipun ada juga yang disewakan.

Dari teori interaksi sosial,¹⁹ dapat diprediksikan bahwa pranata desa dapat lebih mudah dilaksanakan apabila komunitasnya lebih terpadu dan berstruktur lebih ketat. Dalam sistem sosial yang berstruktur ketat, manusia diharapkan menyesuaikan dirinya sebanyak mungkin dengan norma-norma sosial, seperti hak-hak dan kewajiban timbal balik yang jelas-jelas ditentukan oleh tradisi. Sedangkan pada sistem sosial yang berstruktur longgar, tingkah

18. Untuk lebih memperjelas konfigurasi tentang pola-pola pemukiman perkotaan, selanjutnya lihat, Clifford Geertz, *The Social History of an Indonesian Town*, diterjemahkan oleh Grafitipers, Jakarta, 1986, hlm. 27.

19. Lihat, Yujiro Hayami dan Masao Kikuchi, *Asian Village Economy at the Crossroads An Economic Approach to Institutional Change*, diterjemahkan oleh Zahara D. Noer, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1987, hlm. 24.

laku manusia bersifat individualistis, dan mudah bagi seorang individu untuk menyelamatkan dirinya berbuat sesuatu yang tidak disetujui oleh anggota-anggota lainnya.

Kampung-kampung yang berada di kawasan Kelurahan Kartasura, setidaknya-tidaknya sebagian darinya, menggambarkan suatu penafsiran kembali dari suatu kehidupan desa. Disinilah pola *slametan* bergantian yang merupakan pusat kehidupan keagamaan desa tetap merupakan yang terkuat dan *slametan* yang demikian cenderung menjadi lambang-lambang kesetiakawanan kampung.

Sifat yang seringkali diberikan oleh orang kota kepada masyarakat desa adalah sifat "*ketenteraman*" seperti apa yang dikatakan Boeke:²⁰ "*Desa itu bukan tempat untuk bekerja, tetapi tempat ketenteraman*". Ketenteraman sosial di desa-desa Jawa²¹ pada umumnya berdasar pada hubungan ketergantungan sosio ekonomi satu dan lainnya. Struktur sosial sebagai suatu sistem yang

20. Lihat, Koentjaraningrat, *Ciri-Ciri Dari Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, dalam Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan*, Jilid I, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1991, hlm. 35.

21. Lihat Yumiko M. Priyono dan Priyono Tjiptoherijanto, *Demokrasi di Pedesaan Jawa*, Yogyakarta, Sinar Harapan, 1983, hlm. 54.

lebih sederhana dan lebih kecil,²² sementara hubungan sosial adalah kompak, setara, dan sebagian besar personal.

Kekompakan sosial warga masyarakat Kartasura dipelihara melalui penyelenggaraan berbagai upacara keagamaan berdasarkan tradisi agama Islam setempat. Diantara upacara tersebut yang terpenting adalah *tahlilan* dan *kenduren*. *Tahlilan* adalah upacara agama yang berintikan *tahlil*²³ dalam rangka mendoakan arwah leluhur. *Kenduren* adalah upacara agama yang berintikan pembacaan doa keselamatan dan pembagian makanan berupa nasi dengan lauk pauk. Penyelenggaraan upacara ini dikaitkan dengan peristiwa penting dalam siklus kehidupan individu.

Tahlilan biasanya diselenggarakan oleh suatu rumah tangga atau oleh suatu kelompok *tahlilan*. Bila suatu rumah tangga menyelenggarakan *tahlilan*, biasanya mereka mengundang para tetangga terdekat dan kaum kerabat. Mereka menyelenggarakan *tahlilan* dalam rangka mendoakan keselamatan arwah anggota keluarga yang baru saja meninggal. Biasanya *tahlilan* semacam ini diselenggarakan

22. Robert Redfield, *Masyarakat Petani dan Kebudayaan*, Jakarta, Rajawali, 1985, hlm. 50.

23. *Tahlil* adalah bacaan suci atau puji-pujian yang menyebut tentang Keesaan Tuhan. Selanjutnya lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm. 884.

setiap hari, pada malam hari, selama seminggu sejak hari kematian. Di sisi lain, *tahlilan* yang diselenggarakan oleh suatu kelompok *tahlilan* biasanya hanya dihadiri oleh anggota kelompok bersangkutan. *Tahlilan* semacam ini biasanya diselenggarakan sebulan sekali secara bergiliran di rumah anggota kelompok.

Kenduren diselenggarakan oleh suatu rumahtangga dengan mengundang para tetangga terdekat. Penyelenggaraan *kenduren* dikaitkan dengan peristiwa penting dalam siklus hidup seorang manusia, atau peristiwa tertentu yang tidak tergolong siklus hidup tetapi dianggap sebagai masa gawat bagi kehidupan individu atau rumah tangga. *Kenduren* yang berkaitan dengan siklus hidup manusia mencakup *mitoni* (janin berumur tujuh bulan), *akikah* (upacara selamat datang memangkas rambut bayi yang ditandai dengan penyembelihan hewan, seperti kambing atau lembu), *khitanan* (peralihan dari anak-anak ke remaja), *walimahan* (pengumuman akad pernikahan), dan rangkaian upacara kematian. Sistem ritual keagamaan sebagaimana terurai diatas memperlihatkan cukup tepat dalam mencerminkan struktur sosial di Kartasura.

Kenduren yang dikaitkan dengan peristiwa gawat yang tidak termasuk siklus hidup manusia hanyalah mencakup *kenduren* dalam rangka menempati rumah baru. *Kenduren-kenduren* itulah yang masih biasa diselenggarakan oleh rumahtangga di Kartasura, terutama di kawasan-kawasan kampung-kampung. Meskipun demikian, dikampung-

kampung pulalah secara empirik ditemukan usaha-usaha pengolahan kembali pola pedesaan ke dalam gaya hidup yang lebih lentur, dan pertumbuhan suatu kebudayaan²⁴ golongan bawah yang secara jelas bersifat kotaan. Perkembangan Kartasura menjadi suatu bentuk kehidupan kota, terutama di pusat-pusat perkotaan secara perlahan-lahan menyebabkan *slametan* itu agak kurang efisien sebagai mekanisme integrasi. Sementara itu, di kawasan-kawasan pedesaan di Kartasura *slametan* yang termanifestasikan dalam bentuk *tahlil* dan *kenduren* merupakan semacam wadah bersama masyarakat, yang mempertemukan berbagai aspek kehidupan sosial dan pengalaman perseorangan, dengan suatu cara memperkecil ketidakpastian, ketegangan dan konflik.

Konfigurasi mengenai struktur sosial di kawasan-kawasan pedesaan Kartasura adalah suatu model *ideal type* yang menekankan segi-segi yang lebih tradisional dari kehidupan pedesaan dalam batas-batas tertentu. Oleh karena di sisi lain ada sebagian masyarakat yang pola kehidupannya memiliki sifat *urban*. Dengan demikian, meskipun struktur sosial di kawasan pedesaan terdapat sifat-sifat tradisional, akan tetapi diperlemah oleh berbagai macam perubahan. Hal ini tampak dengan

24. Untuk melihat wujud kebudayaan secara teoretis, selanjutnya lihat, Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1990, hlm. 5-8.

adanya perubahan nilai, dari sistem tradisional menuju masyarakat berorientasi pada pasar.

Sementara itu, hubungan otoritas tingkat kelurahan melibatkan hubungan antara pemegang kekuasaan yang terorganisasi secara birokratis dengan rakyat yang secara praktis tidak terorganisasi. Pemegang kekuasaan adalah sekelompok pejabat kelurahan yang terhimpun dalam suatu unit administrasi pemerintah. Di lain pihak, rakyat dalam menghadapi pemerintah kelurahan bertindak dalam kedudukan sebagai individu, unit rumah tangga, atau himpunan massa.

Struktur pemerintah kelurahan Kartasura telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa, yakni terdiri dari Kepala Kelurahan dan perangkat Kelurahan. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, Kepala Kelurahan bertugas menyelenggarakan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah urusan pemerintahan umum, termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban. Kepala Kelurahan adalah pegawai negeri yang diangkat oleh Bupati/Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II/Walikota atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas dan wewenang pimpinan pemerintahan Kelurahan, Kepala Kelurahan bertanggungjawab kepada pejabat yang berwenang

mengangkat melalui Camat.

Kepala Kelurahan dalam menjalankan tugas dan wewenang dibantu sekretariat kelurahan sebagai unsur staf. Sekretariat kelurahan terdiri atas Sekretaris Kelurahan dan Kepala-kepala Urusan. Sekretaris kelurahan dan Kepala-kepala Urusan adalah pegawai negeri yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Walikota atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperlancar jalannya roda pemerintahan Kelurahan dapat dibentuk *lingkungan* yang dikepalai oleh kepala *lingkungan* sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kepala *lingkungan* merupakan unsur pelaksana tugas Kepala Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu. Kepala *lingkungan* adalah pegawai negeri yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perubahan susunan Pemerintah Desa menjadi Pemerintah Kelurahan di Kartasura ternyata belum sepenuhnya dikenal secara luas oleh warga desa. Hal ini tercermin pada kenyataan bahwa sebutan jabatan versi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, dalam komunikasi antara penduduk dengan para pejabat kelurahan. Dari pengamatan empirik yang

dilakukan selama penelitian ini berlangsung, ditemukan kenyataan meskipun telah terjadi perubahan pemerintah desa versi baru, tetapi ada sebagian masyarakat dalam berkomunikasi dengan pejabat kelurahan ini masih memanggil Sekretaris Kelurahan dengan sebutan *carik*. Keadaan seperti ini juga berlaku dalam komunikasi antar-pejabat kelurahan itu sendiri.

Realitas empirik tersebut diatas memperlihatkan bahwa pemahaman penduduk di Kartasura terhadap posisi pejabat kelurahan tertentu dalam konteks hirarki wewenang pemerintah kelurahan, sebagian masih didasarkan atas struktur lama, meskipun secara formal struktur pemerintah desa telah mengalami perubahan. Dengan demikian, struktur lama masih menjadi dasar hubungan sosial antara rakyat dengan pejabat kelurahan.

Meskipun pemerintah kelurahan telah berkembang menjadi sebuah unit birokrasi, hubungan otoritas pemerintah kelurahan tidaklah sepenuhnya merupakan hubungan impersonal, melainkan merupakan kombinasi antara hubungan personal dan impersonal. Hal ini dapat dilihat bahwa di satu sisi warga masyarakat masih memperlakukan *Iurah* dalam kerangka hubungan *kebapakan*. Mereka masih memandang bahwa hubungan antara pejabat kelurahan dalam hal ini *Iurah* dengan rakyatnya sejajar dengan hubungan antara ayah dengan anak-anaknya. Fenomena ini tampak ketika masyarakat tengah memiliki hajat, *Iurah* selalu menjadi penasihat dalam suatu kepanitiaan. Akan tetapi,

di sisi lain, pejabat kelurahan juga telah mengembangkan hubungan birokratis dalam semua aspek hubungan sosial dengan para penduduk kelurahan Kartasura.

Kedua tipe hubungan otoritas ini saling berpengaruh pada berbagai aspeknya, yakni dalam sistem hubungan internal pejabat kelurahan dan dalam sistem pengendalian terhadap warga masyarakat. Sistem hubungan internal antar pejabat kelurahan tidak saja didasarkan atas tata kerja yang berlaku, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kedudukan pribadi pejabat dalam struktur kekerabatan. Perlakuan para pejabat kelurahan terhadap warga masyarakat tidak saja ditundukkan kepada peraturan yang berlaku dan prosedur yang dibakukan tetapi dipengaruhi pula oleh faktor hubungan pribadi diantara pejabat kelurahan dengan warga masyarakat tertentu dalam sistem kekerabatan dan ketetanggaan.

Dalam aspek pengambilan keputusan, struktur otoritas kelurahan ditandai oleh lemahnya posisi berunding warga masyarakat dalam menghadapi pemerintah kelurahan. Keputusan pemerintah kelurahan dibuat oleh lurah dan perangkatnya. Lemahnya posisi berunding warga masyarakat dalam menghadapi pemerintah kelurahan tidak dirasakan oleh kebanyakan warga masyarakat sebagai masalah penting dalam hubungan otoritas kelurahan.

Realitas tersebut diatas menjelaskan bahwa masyarakat Kartasura dalam menghadapi pemerintah kelurahan masih dipengaruhi oleh kerangka hubungan *patron klien*.

Dalam kerangka hubungan *patron klien*, partisipasi warga masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah kelurahan terutama berbentuk informal melalui hubungan pribadi dengan pejabat kelurahan. Oleh karena itu, keadaan struktur formal pemerintah kelurahan sebagaimana terurai diatas tidak akan menutup sama sekali peluang bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintah kelurahan, karena masih tersedia saluran informal yang didukung oleh tradisi kelurahan Kartasura.

Apabila dalam tugasnya sebagai pemimpin formal lurah sebagai hirarki lebih giat dalam merealisasikan program-program yang diinstruksikan dari atas misalnya dari camat, bupati dan sebagainya, maka sebagai pemimpin informal ia harus lebih banyak mengembangkan inisiatifnya sendiri sendiri untuk memajukan kelurahan yang dipimpinnya. Hanya dengan melalui kegiatan-kegiatan yang lahir dari inisiatif sendiri, dengan memakai potensi kelurahan sebagai sumber utama, lurah dapat diterima sebagai pemimpin informal di kelurahan yang dipimpinnya. Sebagai pemimpin informal lurah tidak ditentukan oleh jenjang kewenangan tertentu yang harus dimilikinya, akan tetapi lebih diintegrasikan dalam ukuran tradisional, yakni sebagai *bapak* bagi warga masyarakatnya. Jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh lurah sebagai manifestasi pemimpin informal, misalnya mendirikan madrasah, perbaikan masjid dan lain-lain. Untuk

mempermudah pelaksanaan inisiatif tersebut, seringkali lurah memanfaatkan hubungan kekerabatan dan ketetanggaan.

C. Perkembangan Ekonomi

Kartasura tampaknya sama dengan setiap kota kecil di Jawa, dan di sisi kanan dan kiri jalan utama terdapat sederetan toko milik etnik keturunan Cina. Di pusat kota terdapat sebuah pasar yang menjadi pusat jaringan perdagangan yang sangat aktif dan meliputi areal yang luas. Lewat pasar itulah segala macam dagangan disalurkan, dan dari pasar itu sebagian besar penduduk kota mendapat mata pencahariannya.

Kecenderungan kearah masyarakat yang sangat mementingkan pasar atau pasar sentris itu tercermin juga dalam evolusi struktur sosial di Kartasura. Sampai saat ini stratifikasi masyarakat Kartasura terdiri atas, pertama golongan atasan, yakni "pegawai negeri"; kedua, "pedagang", yang meliputi pedagang tekstil, barang-barang kelontong dan tampak cukup kaya; ketiga, "orang kecil", meliputi pedagang kecil-kecilan, buruh pabrik, dan tukang-tukang yang marginal, seperti tukang kayu, tukang batu; dan keempat, orang-orang Cina. Orang-orang Cina itu hampir semuanya menjadi pedagang, oleh karena itu dalam pengertiannya yang luas termasuk golongan pedagang juga. Dalam kenyataannya mereka itu pada umumnya berada di luar sistem sosial Jawa, dan merupakan minoritas tersendiri di dalam suatu masyarakat yang sedikit banyak

telah terjadi akulturasi tetapi pada dasarnya tetap asing.²⁵

Akibat pengaruh kekuatan-kekuatan politik ekonomi modern, Kartasura yang pada mulanya merupakan suatu kota kecamatan yang terdiri dari golongan-golongan status sub budaya yang tersendiri, makin lama makin berubah menjadi sebuah kota yang terlibat dalam berbagai interaksi penuh persaingan. Namun bukan saja kesetiaan sosial yang tradisional belum lenyap sepenuhnya dan yang modern belum muncul seluruhnya, tetapi struktur ekonomi pada umumnya tetap berada diantara masa lampau dan masa depan. Dewasa ini hampir tidak ada lagi orang di kawasan Kartasura yang bekerja lepas dari dasar pengertian pasar. Meskipun proses penggunaan uang di daerah Kartasura telah sempurna, integrasi kedalam ekonomi luar sudah ekstensif, permintaan yang efektif telah meluas dan beraneka ragam, akan tetapi beberapa usaha yang menonjol yang dilakukan oleh golongan pedagang yang lama untuk menciptakan pranata-pranata produksi dan distribusi yang lebih efisien hampir tenggelam oleh arus ratusan pedagang yang secara kecil-kecilan berusaha mendapatkan nafkah-sekedarnya dari perdagangan tradisional.

25. Apa yang dinarasikan sebagaimana tersebut diatas merupakan hasil pengamatan empiris melalui observasi saat penelitian ini berlangsung di Kartasura.

Di Kartasura, masalah perkembangan ekonomi itu pada dasarnya adalah masalah organisasi dan modal. Kekurangan yang terdapat pada kelompok yang terdiri dari pedagang-pedagang kecil terutama adalah modal. Meskipun dari segi kesempatan untuk inovasi yang realistis sungguh-sungguh ada serta memiliki semangat etos kerja,²⁶ karena secara empiris mereka telah menunjukkan sifat-sifat yang baik seperti, rajin, hemat, dan tabah secara hampir berlebihan. Disamping itu, kemungkinan-kemungkinan bagi ekspansi perdagangan yang cukup berarti tampak di segenap penjuru kota. Apa yang tidak mereka miliki adalah kekuasaan untuk mengerahkan modal dan menyalurkan semangat kerja mereka sedemikian rupa sehingga dapat mengeksploitasi kemungkinan-kemungkinan ekonomi yang ada. Secara empiris, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membentuk pranata-pranata ekonomi yang efisien.

Sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, dari semula Kartasura telah memiliki *ekonomi pasar*, yakni suatu

26. Bandingkan dengan hasil penelitian Mubyarto dkk, dalam *Etos Kerja dan Kohesi Sosial, Masyarakat Sumba, Rote, Sabu dan Timor Propinsi Nusa Tenggara Timur*, Yogyakarta, Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK), Universitas Gadjah Mada, 1991, hlm. 2-3. Selanjutnya lihat pula Max Weber, *Sekte-Sekte Protestan dan Semangat Kapitalisme*, dalam Taufik Abdullah (ed), *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, Jakarta, LP3ES, 1979, terutama hlm. 41-78. Bandingkan pula Stanislaw Andreski, *Max Weber on Capitalism, Bureaucracy and Religion*, diterjemahkan Hartono Hadikusumo, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 1989, hlm. 107-120.

sudah berkembang dan memungkinkan kegiatan ekonomi kolektif terus berlangsung, maka pedagang pasar itu tak dapat secara aktif mencari dan menciptakan sumber-sumber keuntungan, ia hanya dapat meraih keuntungan yang kebetulan datang.

Sebagai akibatnya, kemajuan kearah pola-pola kegiatan ekonomi yang lebih efektif di Kartasura mengambil suatu gerakan yang masih terbatas dan bertahan pada tipe pasar. Usaha penciptaan pranata-pranata produksi atau distribusi firma atau yang menyerupai firma, pendirian toko-toko kecil, toko-toko penjual jasa, dan warung-warung kecil di perkampungan, itulah yang merupakan perkembangan ekonomi di Kartasura pada saat ini.

Pasar di Kartasura adalah sekaligus merupakan lembaga ekonomi dan sekaligus cara hidup, suatu bentuk aktivitas perdagangan yang mencakup semua segi kehidupan, suatu gaya umum dari kegiatan ekonomi yang mencapai segala aspek dari masyarakat, disamping suatu alam sosial budaya yang hampir lengkap.

Seperti pertanian bagi seorang petani, maka perdagangan kecil-kecilan itu bagi seorang pedagang merupakan latar belakang konkret bagi segala bentuk kegiatannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pasar bukanlah lokasi khusus dengan bangsal-bangsal yang terletak di tengah-tengah kota, melainkan seluruh pola dari kegiatan pengolahan dan penjajaan secara kecil-

kecilan yang menjadi karakteristik di Kartasura pada umumnya. Pada tempat orang berjual beli itu merupakan klimak dari pola ini, akan tetapi bukan keseluruhan dari pola tersebut, karena gaya perdagangan pasar itu meresap keseluruh Kartasura, hanya di kawasan-kawasan yang paling terpencil saja pengaruhnya agak menipis.

Untuk memahami pasar dalam pengertian yang luas, harus dilihat dalam tiga perspektif;²⁸ pertama, sebagai suatu pola aliran barang dan jasa; kedua, sebagai suatu kumpulan mekanisme ekonomi yang mempertahankan dan mengatur aliran-aliran tersebut; dan ketiga, sebagai suatu sistem sosial dan kultural tempat mekanisme tersebut berada.

Dari sudut arus barang dan jasa salah satu karakteristik pasar yang paling menonjol adalah barang yang diperjualbelikan di Kartasura, tidak besar, mudah dibawa, bahan pangan yang mudah disimpan, tekstil, elektronik, barang pecah belah dan sejenisnya. Karakteristik yang lain adalah apapun barangnya, lakunya sangatlah cepat, dan barang-barang tersebut mengalir di dalam jalur-jalur pasar. Disamping itu, aliran ini tidaklah bersifat langsung, barang-barang dagangan itu sekali masuk ke dalam jaringan pasar cenderung untuk beredar berputar-putar, dari satu

28. Geertz, *ibid*, hlm. 161.

pedagang ke pedagang lain untuk waktu yang cukup lama, sebelum sampai kepada konsumen terakhir.

Sebakul jagung atau sayur-sayuran misalnya, yang dijual oleh seorang petani kepada pedagang desa, lalu membawanya ke kota dan menjualnya kepada pedagang kedua, yang pada gilirannya akan menjualnya kepada pedagang pasar. Dari pedagang pasar inilah jagung dan sayur-sayuran itu dijual kepada pedagang warung setempat maupun konsumen lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa suatu produk pertanian yang dihasilkan senantiasa berputar-putar terlebih dahulu sebelum sampai pada konsumen sesungguhnya.

Sampai pada tataran tertentu di Kartasura, tawar menawar harga tak kunjung henti di dalam pasar mencerminkan dinamika proses jual beli antara penjual dan pembeli untuk menghitung secara tepat berapa harga yang sebenarnya wajar bagi suatu barang. Dengan demikian, penjual dan pembeli harus menjajagi hal ini melalui sistem tawar menawar.

Jual beli yang terjadi atas suatu barang baik dalam partai besar maupun kecil di Kartasura yang dilalui dengan suatu tawar menawar, tampaknya selaras sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata.²⁹ Dalam pasal 1320 tersebut, disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian antara lain; *pertama*, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; *kedua*, cakap untuk membuat suatu perjanjian; *ketiga*, mengenai suatu hal tertentu; dan *keempat*, Suatu sebab yang halal. Dua syarat yang pertama, sering disebut dengan syarat-syarat *subyektif*, hal ini disebabkan karena menyangkut orang-orangnya atau subyeknya yang melakukan perjanjian. Sementara dua syarat yang terakhir disebut sebagai syarat-syarat *obyektif* karena menyangkut perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.³⁰

Dengan adanya kata sepakat dimaksudkan kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, penjual menginginkan sejumlah uang, sementara pembeli menghendaki sesuatu barang dari penjual. Apa yang dijanjikan oleh pihak penjual, menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sementara yang dijanjikan oleh pihak pembeli, membayar

29. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1979, hlm. 305.

30. Lihat Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Inter-masa, Cetakan Ke-VI, 1979, hlm. 17.

harga yang telah disepakatinya.

Jual beli secara teoretis pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian *konsensuil*, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah, mengikat atau mempunyai kekuatan hukum pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli. Artinya sepakat mengenai unsur-unsur yang pokok, yakni barang dan harga, meskipun jual beli itu mengenai barang tak bergerak. Sifat *konsensuil* ini ditegaskan sebagaimana tercantum dalam pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut: "*Jual beli telah dianggap telah terjadi antara kedua belak pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar*".

Realitas empirik di Kartasura memperlihatkan bahwa sistem harga bergeser dan cenderung untuk menciptakan keadaan, seperti tekanan utama persaingan adalah diantara penjual dan pembeli. Di dalam ekonomi perusahaan modern,³¹ sistem harga adalah pasti, bersama-sama dengan standarisasi, merk dagang, periklanan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang menyertainya, membebaskan tekanan persaingan antara penjual dan pembeli dan meletakkan tekanan ini pada persaingan antara para penjual. Tanpa adanya harga yang pasti di pasar, pembeli harus

31. Geertz, *Ioc cit*, hlm. 162.

menggunakan pengetahuannya tentang keadaan pasar dengan ulet, melawan pengetahuan yang serupa di pihak penjual.

Salah satu dari akibat persaingan semacam ini adalah kecenderungan terpusatnya perhatian pedagang pada satu demi satu transaksi antar pribadi. Artinya selalu mendapatkan laba sebanyak-banyaknya dari setiap transaksi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sementara itu, pedagang pasar selalu mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang besar atau kecil, bukan mencari langganan tetap dan perluasan usaha yang mantap. Tujuannya bukanlah menciptakan pasaran untuk setiap barang apapun yang dijualnya, akan tetapi mencari kesempatan penjualan dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya.

Mekanisme ekonomi yang cukup penting adalah jaringan kredit yang diberikan pelepas uang informal terutama bagi para pedagang kecil-kecilan yang menjajakan barang dagangannya hampir di beberapa sudut kota Kartasura. Aktivitas pelepas uang informal yang dikelola secara pribadi tampak sangat atraktif dalam menawarkan jasanya. Disamping pelepas uang informal yang dikelola secara pribadi seperti *rentenir*, juga bermunculan institusi pelepas uang formal seperti *Badan Perkreditan Rakyat* maupun *Bank Plecit* yang dalam praktiknya menyerupai *rentenir*. Dari data empirik memperlihatkan sampai saat penelitian ini berlangsung di Kelurahan Kartasura terdapat 10 badan kredit formal yang terdiri dari Badan

Perkreditan Rakyat.³²

Sasaran dari pelepas uang informal mulai dari warung kecil-kecilan, penjual es cendol, penjual mie, pedagang makanan yang berjualan pada malam hari di pusat kota, sampai kios-kios makanan yang berderet-deret di sekitar terminal bus Kartasura. Hampir seluruh waktunya bagi seorang *rentenir* habis dipakai untuk mengejar para penghutang dan menagih mereka, atau untuk merayu para debitur untuk meminjam uang kembali kepadanya. Inilah salah satu cara dari seorang *rentenir* dalam upaya melanggengkan hubungannya dengan para nasabah yang kebanyakan mereka dalam posisi yang sangat membutuhkan. Ironisnya justru pedagang-pedagang kecil banyak meminjam kepada *rentenir*, meskipun bunga pinjaman perpaket mencapai 20 persen. *Rentenir* mematok bunga yang sangat tinggi, bila dibandingkan institusi finansial formal yang digelar pemerintah dan Bank Perkreditan Rakyat yang bunganya berkisar antara 2,5 persen sampai 3 persen.

Terlepas dari tujuannya untuk memaksimumkan aktivitas-aktivitas perdagangannya, pedagang pasar di Kartasura cenderung untuk melebarkan usahanya, meskipun yang terjadi adalah transaksi-transaksi kecil, bukannya memusatkan usaha pada salah satu diantaranya secara lebih mendasar dan mendalam. Sebagai akibatnya, jarang

32. Monografi Kelurahan Kartasura, bulan Oktober 1996.

dijumpai dalam pasar transaksi yang besar diantara para pedagang, meskipun pedagang-pedagang tersebut cukup bermodal untuk menjalani transaksi tersebut.

Pedagang-pedagang pasar adalah individu-individu dalam pengertian bahwa mereka bekerja sendiri-sendiri lepas dari organisasi ekonomi, mengambil keputusan yang menurut persepsi mereka adalah kepentingan mereka sendiri, dan berhubungan satu sama lain melalui persetujuan-persetujuan antar pribadi yang sama sekali saling terpisah. Hubungan antara pedagang sendiri merupakan hubungan-hubungan sosial yang sangat spesifik, artinya hubungan perdagangan diantara mereka dipisahkan secara jelas dari hubungan-hubungan kemasyarakatan yang umum. Persahabatan, hubungan tetangga dan bahkan hubungan kekerabatan adalah suatu hal, sementara perdagangan adalah hal yang lain. Pendekatan impersonal pada aktivitas ekonomi yang dianggap sebagai ciri khas ekonomi yang lebih maju juga tampak di pasar Kartasura sampai pada taraf yang cukup tinggi. Ia adalah suatu struktur kelembagaan di dalam masyarakat Jawa yang menempatkan formalisme dan status, yang pada umumnya merupakan ciri khas kebudayaan itu, sangatlah lemah. Tawar menawar perhitungan hutang piutang dan hubungan-hubungan perdagangan yang didasarkan atas perhitungan ekonomis tampak mewarnai dinamika pasar di Kartasura. Semuanya itu bereaksi langsung terhadap pertimbangan keuntungan-keuntungan material.

Proses perkembangan ekonomi yang berjalan secara terus menerus di Kartasura, mencerminkan suatu kehidupan organik yang tumbuh dan berkembang perlahan-lahan sebagai proses yang gradual,³³ sebagaimana anggapan tokoh Neo-Klasik Alfred Marshall. Hal ini tampak dalam realitas bahwa suatu kelompok pedagang kecil dan pengusaha-pengusaha kecil yang didorong oleh rasa harga dirinya, berusaha memperbaiki statusnya di dalam masyarakat yang tengah berubah melalui pengejaran kekayaan secara rasional dan sistematis.

Suatu kenyataan di Kartasura bahwa pedagang-pedagang kelas atas etnik Cina dan sebagian Jawa bila tidak berbentuk toko-toko pengecer, berbentuk pabrik-pabrik kecil tipe bengkel, sehingga dapat disebut sebagai perusahaan. Dalam pengertian sosiologis yang luas, suatu lembaga-lembaga bersama yang diberi batasan-batasan yang tegas dan secara khusus mengabdikan pada tujuan-tujuan ekonomis. Toko-toko itu menyediakan selera-selera modern berbagai golongan penduduk kota - guru-guru sekolah, para pelajar, pegawai-pegawai negeri, tenaga-tenaga teknis serta masyarakat pada umumnya. Hal ini tampak dari barang-barang yang diperdagangkannya yang umumnya berkualitas lebih baik, dan cara berdagang yang lebih teratur jika dibandingkan cara-cara di pasar. Mereka

33. Lihat Irawan dan Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta, BPFE, Edisi Kelima, 1995, hlm.29.

meletakkan harga pasti, memperhatikan reputasi sebagai pedagang untuk melanggengkan hubungan dengan langganannya, dan berminat untuk membina pemasaran.

Seorang pemilik toko untuk memahami apa yang dibutuhkan dalam pembaharuan-pembaharuan praktik-praktik pembelian, pengelolaan dan penjualan serta untuk meyakinkan pihak lain dalam suatu transaksi bahwa cara baru sebenarnya tepat dan dapat diterima, akan tetapi memerlukan bakat yang cukup besar. Untuk membangun toko apalagi pabrik, tampaknya memerlukan seperangkat hubungan baru. Pembinaan masing-masing hubungan tersebut lebih sulit lagi jika keadaan yang memungkinkan hubungan yang lainnya juga tidak ada.

Bagaimanapun juga, pola perkembangan Kartasura memiliki sifat sendiri yang khas. Untuk mendeskripsikan hal tersebut ada beberapa hal yang disebutkan antara lain; *Pertama*, pengusaha-pengusaha Kartasura hampir seluruhnya adalah pedagang-pedagang atau anak-anak para pedagang dan kegiatan mereka tumbuh dan berkembang di dalam pasar. Kebudayaan perdagangan di Kartasura sekaligus merupakan pendorong bagi perbaikan ekonomi.

Kedua, faktor yang langsung membatasi kegiatan-kegiatan kewiraswastaan terutama pedagang besar, bukanlah ketiadaan modal, kekurangan tenaga kerja yang ahli dan berdisiplin, keterbatasan pasar, atau ketiadaan pengetahuan teknis, melainkan usaha yang diperlukan untuk mengorganisasi kegiatan-kegiatan yang beraneka ragam

menjadi lembaga-lembaga yang utuh, toko-toko atau pabrik-pabrik kecil. Kemampuan dalam mengorganisir sejumlah kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbeda-beda dengan cara sistematis yang membedakan seorang pengusaha atau wiraswasta Kartasura dengan rekan-rekan pedagang-pedagang kecil di pasar-pasar dan pedagang-pedagang lainnya yang tersebar di kawasan pedesaan.

Ketiga, pengusaha-pengusaha itu merupakan suatu kelompok yang memiliki etos kerja yang tinggi, yang dapat ditelusuri melalui asal usul sosialnya. Mereka mencerminkan semacam usahawan-usahawan yang sangat bersungguh-sungguh dalam menapaki kehidupannya sebagai seorang pedagang.

Sementara itu, di sisi lain ada dua halangan utama bagi kelompok pedagang-pedagang Jawa di Kartasura.

Pertama, realitas atas hadirnya pedagang-pedagang keturunan etnik Cina. Pedagang-pedagang keturunan etnik Cina memiliki modal dan mental dagang yang tinggi³⁴ sehingga memiliki kelebihan yang menguntungkan mereka

34. Kelihaiian dan kepiawaian berusaha orang-orang Cina tidak terlepas dari kenyataan bahwa anak-anak Cina dididik dan dibiasakan untuk melanjutkan usaha orang tua mereka, menjadikan keberhasilan perdagangan orang-orang Cina. Untuk mengkaji mengenai keberhasilan perdagangan orang-orang Cina di Indonesia, selanjutnya lihat, J. Panglaykim dan I. Palmer, *Perkembangan Sebuah Perusahaan Cina di Indonesia*, dalam Yoshihara Kunio (penyunting), *Konglomerat Oei Tiong Ham, Kerajaan Bisnis Pertama di Asia Tenggara*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1991, hlm. 195.

dalam persaingan kedudukan kelas menengah³⁵ kota yang modern. Mereka memperkokoh kedudukannya dengan perkawinan diantara mereka sendiri dan berupaya agar anak dan menantu dapat membantu kegiatan-kegiatan bisnisnya. Modal yang terkumpul sebagian besar ditanamkan di pemukiman-pemukiman orang Cina yang relatif kecil, sehingga tempat-tempat tersebut menjadi pusat-pusat kegiatan yang paling komersial. Pemukiman-pemukiman orang Cina juga mengembangkan jaringan hubungan dan etika bisnis atas dasar kepercayaan - suatu *sine qua non* bagi perkembangan kapitalisme. Mereka memiliki pengalaman yang lebih luas dan lebih terorganisir daripada para pemilik toko dan pabrik orang-orang pribumi. Apa yang dibutuhkan adalah intuisi yang menimbulkan dugaan, dan dugaan itu dipakai untuk menghasilkan kekayaan dengan kerja keras dan keuletan. Hal ini merupakan karakteristik etnik keturunan Cina yang memiliki motivasi kuat sebagai golongan komersial yang minoritas.

35. Dalam kebanyakan masyarakat kapitalistik mutakhir, kelompok ini diidentifikasi sebagai kaum terpelajar kota yang bergelar, bekerja sebagai profesional, manajer, ahli atau tokoh-tokoh intelektual yang tak terikat dalam suatu lembaga formal atau lembaga berkiblat laba. Mereka merupakan kelas atas dalam tata produksi yang belum dominan, yang beroperasi produktif dengan mengandalkan pengetahuan mutakhir dan ketrampilan canggih. Selanjutnya lihat, Ariel Heryanto, *Memperjelas Sosok yang Samar, Sebuah Pengantar*, dalam Richard Tanter dan Kenneth Young, *Politik Kelas Menengah Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1989, hlm. xiii.

Kedua, pedagang-pedagang dari kelompok etnik Cina mayoritas memiliki modal yang besar dan jaringan yang lebih luas, sehingga bagi mereka lebih cepat perkembangan usahanya, bila dibandingkan pedagang-pedagang pribumi.

Apapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki pedagang-pedagang pribumi di Kartasura yang dalam realitasnya tidaklah memiliki jaringan yang luas dan diversifikasi usaha, akan tetapi mereka adalah sumber daya manusia yang harus diperhatikan nasibnya menghadapi persaingan bebas dalam tatanan ekonomi global.

BAB IV

PROFIL PRAKTIK RENTENIR DALAM MASYARAKAT TRANSISI

A. Sumber-Sumber Perkreditan Formal

Fasilitas perkreditan resmi yang terpenting di Kartasura, terutama bagi para pedagang kecil dan bakul adalah Bank Rakyat Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat, Badan Kredit Kecamatan,¹ Badan Kredit Desa dan Kosipa, kesemuanya memberikan pelayanan pinjaman kepada masyarakat luas.

Bunga pinjaman biasanya dihitung dalam persentase terhadap pinjaman pokok. Beberapa Bank, misalnya Bank Rakyat Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat buka setiap hari, sementara Badan Kredit Kecamatan, Badan Kredit Desa hanya buka sekali dalam satu minggu. Hari-hari kerja tersebut, menentukan cara dan masa pembayaran kembali. Bank Rakyat Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat menagih cicilan hutang satu bulan sekali, selama jangka waktu yang telah disepakati bersama. Disamping itu, Badan Kredit Kecamatan dan Badan Kredit Desa menagih cicilan setiap minggu dalam jangka waktu tiga bulan, sedangkan Kosipa melakukan penagihan setiap hari.

1. Lihat, John M. Dukesbury, Christopher James, *Credit in Support of Rural: An Evaluation of the Credit Component of the Indonesian Provincial Area Development Program*, Development Alternatives, Inc, Washington, September, 1988, terutama halaman, 10-13.

Badan Kredit Desa di Kartasura yang berfungsi untuk membantu masyarakat kalangan bawah seperti pedagang kecil-kecilan dan para bakul serta buruh, memberikan pinjaman terkecil sebesar Rp 25.000 dan terbesar Rp 100.000 biasanya dalam jangka waktu paling lama empat bulan. Akan tetapi, perjanjian jangka waktu pengembalian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, artinya debitur dapat melakukan cicilan dalam waktu satu bulan, dua bulan maupun tiga bulan.

Badan Kredit Kecamatan maupun Badan Kredit Desa, melayani para pedagang di pasar dan para pemilik warung serta kios sepanjang mereka memiliki Kartu Tanda Penduduk dan tidak mempunyai hutang kepada bank lain. Diperlukan waktu antara dua atau tiga hari untuk penyelesaian suatu permintaan pinjaman, sehingga keputusannya dapat diberitahukan kepada peminjam yang bersangkutan pada hari pasar berikutnya. Sebagian besar dari peminjam menyerahkan sendiri cicilannya ke Kantor Badan Kredit Kecamatan atau Badan Kredit Desa agar tidak diketahui umum bahwa ia berhutang. Akan tetapi ada sebagian kecil debitur yang menunggu petugas penagihan ke tempatnya.

Sementara itu, syarat-syarat untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan Badan Kredit Desa, antara lain dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk. Untuk pinjaman sebesar Rp 100.000 selama jangka waktu tiga bulan dan pengembalian dapat dilakukan mingguan, tengah bulanan maupun bulanan serta dikenai bunga

20 persen setiap paket pinjaman. Apabila debitur dalam waktu satu tahun mengambil empat kali paket pinjaman, maka ia pada hari Lebaran mendapat insentif sebesar 20 persen dari satu paket pinjaman.

Selama bulan Oktober 1996, tercatat sembilan belas peminjam Badan Kredit Desa terdiri dari pedagang kecil-kecilan baik di pasar maupun di rumah-rumah mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka mengambil pinjaman kepada Badan Kredit Desa antara Rp 25.000 sampai Rp 50.000. Akan tetapi seorang pedagang meminjam sebesar Rp 85.000 dan seorang lagi meminjam sebesar Rp 100.000.

Salah satu sebab dari rendahnya pemanfaatan fasilitas perkreditan formal adalah, pinjaman relatif lebih berbelit-belit, disamping itu persyaratan pembayaran angsurannya relatif ketat, dan relatif sedikit saja dari para pedagang yang dapat memenuhi jadwal angsuran, walaupun untuk pinjaman yang kecil. Misalnya bagi pinjaman sebesar Rp 100.000, maka angsurannya Rp 10.000 setiap minggu. Bagi para pedagang-pedagang kecil dan para bakul dengan keuntungan sedang pun akan sukar memastikan angsuran pengembaliannya karena dipergunakan juga untuk *social cost*, belanja rumah tangga dan ongkos usaha setiap minggu. Akan tetapi bagi para pedagang yang mampu mengembalikan, ini adalah sumber kredit yang fleksibel lebih-lebih mengingat persyaratan tentang tidak terikat hutang kepada pihak lain sering mudah dilanggar. Tidaklah jarang bahwa seorang bakul

mempunyai pinjaman dari beberapa bank yang berbeda tempat ia berjualan.

Menurut salah seorang petugas² Badan Kredit Desa Kartasura dalam tahun 1996, uang pinjaman 100 persen diambil oleh para pedagang kecil-kecilan atau para bakul. Baik Badan Kredit Kecamatan maupun Badan Kredit Desa mengenakan bunga 20 persen per paket pinjaman atau sekitar 80 persen per tahun. Pinjaman-pinjaman ini lebih kecil dari pada yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia atau Badan Perkreditan rakyat dan tak banyak gunanya untuk modal suatu usaha. Para pedagang dan bakul biasanya berdalih untuk lebih memanfaatkan kredit informal seperti rentenir, sebab jika mereka sedang tidak ada uang, angsuran dapat ditangguhkan.

Para pedagang menggunakan uang pinjaman dari sumber-sumber tersebut diatas untuk berbagai keperluan. Barangkali sebagian besar pinjaman dari badan-badan resmi dipakai untuk keperluan konsumsi, atau kalau ada salah seorang anggota keluarga jatuh sakit. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak tetap, terutama SPP, dipenuhi dari pinjaman mengingat sedikit sekali keluarga yang bisa menabung untuk keperluan tersebut. Para pedagang menyadari bahaya jatuh ke lembah hutang untuk menutupi belanja keluarga sehari-hari, akan tetapi sebagian tak

2. Wawancara dengan *Titik Melawati*, tanggal, 8 Oktober 1996.

mempunyai alternatif lain kecuali gali lubang tutup lubang.

1. Latar Belakang Badan Kredit Kecamatan Kartasura

Badan Kredit Kecamatan merupakan suatu lembaga kredit yang disponsori pemerintah yang beroperasi di daerah-daerah pedesaan Jawa Tengah sejak akhir tahun 1970. Latar belakang pembentukan kredit sama sekali tidak dimaksudkan untuk pengembangan usaha perbankan di daerah pedesaan, melainkan untuk pembangunan desa. Untuk melaksanakan pembangunan daerah pedesaan ini, disadari oleh pengelola pemerintah Jawa Tengah saat itu, salah satu kendalanya adalah kekurangan modal dan keterampilan.

Khusus untuk masalah kekurangan modal, bukan saja disebabkan karena sangat terbatasnya penyediaan modal tersebut, melainkan juga karena kurang didekatkannya modal tersebut kepada masyarakat secara merata. Sebagai akibatnya, bagi petani, pedagang kecil ketika membutuhkan adanya pinjaman dana mengalami berbagai kesulitan.

Adanya keterbatasan penyediaan murah dan kurang dekatnya dana tersebut dengan masyarakat pedesaan, mengakibatkan banyak penduduk desa yang membutuhkan bantuan modal terjerat oleh kreditur informal, yang biasanya mengenakan bunga sangat tinggi atas pinjamannya.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1981, ditunjukkan adanya empat fungsi dari Badan Kredit Kecamatan:

1. Mendekatkan permodalan dengan sistem perkreditan yang mudah, murah dan mengarah pada masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pedesaan;
2. Membentuk modal masyarakat yang diarahkan pada peningkatan produksi;
3. Melindungi masyarakat pedesaan dari pengaruh pelepas uang;
4. Membimbing masyarakat pedesaan untuk lebih mengenal dan memahami asas-asas ekonomi dan permodalan.

Di Wilayah Kecamatan Kartasura terdiri dari dua belas desa yang mata pencahariannya beraneka ragam antara lain di bidang:³

- a. Pertanian..... 50 persen;
- b. Industri kecil..... 15 persen;
- c. Kerajinan..... 10 persen;
- d. Perdagangan kecil..... 20 persen;
- e. J a s a..... 5 persen.

Sementara itu, permodalan merupakan unsur yang esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat. Kekurangan modal ini sangat membatasi ruang gerak aktivitas usahanya, yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, dipandang

3. Wawancara dengan Sumarno Kepala Badan Kredit Kecamatan Kartasura, tanggal 23 Oktober 1996.

perlu di Wilayah Kecamatan Kartasura didirikan suatu lembaga yang dapat memberi atau menyalurkan modal dari pemerintah kepada masyarakat yang berekonomi lemah.

Di dalam masyarakat yang relatif berekonomi lemah pada umumnya tumbuh pula dengan subur para pelepas uang dan para rentenir yang selalu mencekam kehidupan masyarakat di kawasan kota dan juga di pedesaan dalam suatu mata rantai yang tak ada putus-putusnya.

Disamping itu, dilihat dari letak geografis Kartasura yang merupakan jalur perhubungan antara Solo, Yogyakarta dan Semarang, akan dapat mempengaruhi masyarakat di dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan pendapatan dalam bidang usaha-usaha perdagangan, perindustrian kecil, maupun dalam bidang pertanian dan kerajinan.

Pendirian Badan Kredit Kecamatan Kartasura, diharapkan menjadi alternatif agar masyarakat terutama para pedagang kecil dan para bakul agar terhindar dari jeratan hutang para rentenir. Badan Kredit Kecamatan Kartasura sebagai Badan Kredit resmi berdiri sejak tanggal 27 Mei 1971 dan diresmikan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo dengan Surat Keputusan tanggal 27 Mei 1971, Nomor Dsa. BB. 19/557/71 dengan modal kerja sebesar Rp 1.000.000 yang diperoleh dari Kredit Investasi. Modal kerja tersebut diperoleh dari Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang diambilkan dari Anggaran Pendapatan Daerah.

Status Badan Kredit Kecamatan Kartasura merupakan Unit Operasional dari Lembaga Pembiayaan Pembangunan Desa (LPPD) yang berkedudukan di tingkat Kecamatan serta berfungsi sebagai kekayaan Desa/Kecamatan yang berupa uang maupun surat-surat berharga.

2. Permodalan Badan Kredit Kecamatan Kartasura

Modal Badan Kecamatan Kartasura diperoleh dari:

- a. Kredit Investasi dari Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah tahap I sebesar Rp 1.000.000 yang disalurkan melalui Bank Pembangunan Jawa Tengah, dengan jangka waktu 3 tahun dengan bunga 1 persen setiap bulan;
- b. Dari Pemerintah Daerah Tingkat II Sukoharjo sebesar Rp 300.000 sebagai modal tambahan;
- c. Dari masyarakat atau nasabah yang berupa simpanan wajib sebesar 10 persen dari nilai nominal pinjaman yang diperoleh dan dibayar bersama pada waktu mengangsur pinjaman.

3. Tujuan dan Usaha Badan Kredit Kecamatan

Badan Kredit Kartasura didirikan dengan tujuan antara lain:

- a. Memobilisasikan dana-dana untuk meningkatkan daya produksi masyarakat desa;
- b. Memberantas ijon, gadai gelap atau setidaknya tidaknya dapat mengurangi;

- c. Meningkatkan daya beli masyarakat;
- d. Membimbing masyarakat desa untuk mengenal asas-asas ekonomi dan perbankan serta mendidik masyarakat untuk membentuk modal masyarakat.

4. Sasaran Badan Kredit Kecamatan

Sementara itu, sasaran Badan Kredit Kecamatan Kartasura dalam menjalankan tugasnya untuk menyalurkan modal dari Pemerintah kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan perkapita, maka Badan Kredit Kecamatan mengarahkan penggunaan pinjaman uang yang telah diberikan oleh kepada nasabah-nasabah pada usaha-usaha:

- a. Produksi pertanian;
- b. Industri kecil/kerajinan rakyat (*home industry*);
- c. Perdagangan kecil (Warung-warung rentengan);
- d. Usaha-usaha kecil yang bersifat produktif.

5. Jangka Waktu dan Persentase Bunga serta Simpanan Wajib

- a. Badan Kredit Kecamatan Kartasura dalam memberikan pinjaman kepada para nasabah menggunakan "*sistem angsuran bulanan*" dengan angsuran selama 5 x (lima kali) selama lima bulan;
- b. Bunga yang dibebankan kepada nasabah sebesar 4 persen tiap-tiap bulan. Dengan demikian dalam jangka waktu lima bulan nasabah dibebani 20 persen dari nilai nominal pinjaman yang diterima;

- c. Disamping nasabah dikenakan bunga, para nasabah masih diwajibkan menabung (simpanan wajib) yang besarnya 10 persen dari nilai nominal pinjaman yang telah diterima dari Badan Kredit Kecamatan, dan simpanan tersebut tetap menjadi hak para nasabah.

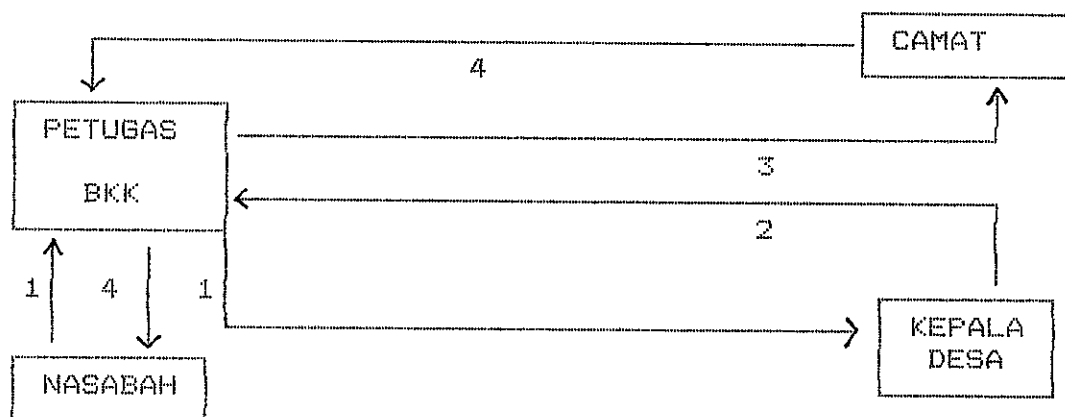
6. Tata Cara Meminjam pada Badan Kredit Kecamatan

Bagi masyarakat yang akan mengajukan kredit kepada Badan Kredit Kecamatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Penduduk daerah setempat dalam wilayah kerja atau lokasi Badan Kredit Kecamatan Kartasura, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa;
- b. Harus sudah mempunyai usaha atau melaksanakan kegiatan yang bersifat produktif.

Disamping para nasabah telah memenuhi persyaratan tersebut diatas, mereka masih menempuh prosedur untuk memperoleh pinjaman dari Badan Kredit Kecamatan Kartasura seperti tampak dalam skema 1 berikut:

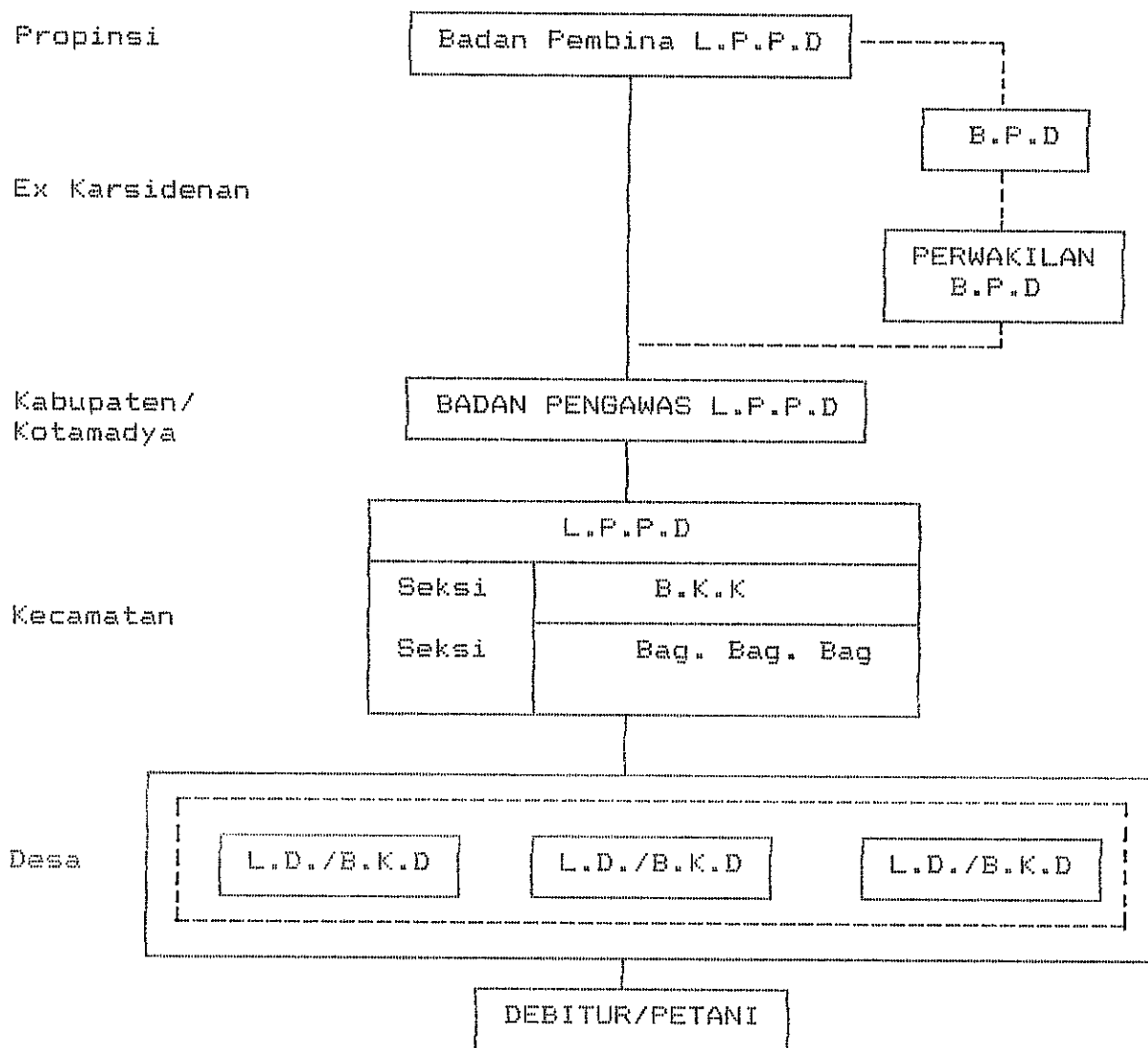
Skema 1: Prosedur Pinjaman pada Badan Kredit Kecamatan



1. Nasabah datang ke Kantor Badan Kredit Kecamatan untuk mengambil formulir permohonan kredit dan diisi serta ditanda tangani, kemudian diketahui oleh Kepala Desa setempat. Selanjutnya minta surat keterangan yang menyatakan bahwa mereka benar-benar penduduk setempat yang akan mengajukan pinjaman kepada Badan Kredit Kecamatan;
2. Setelah formulir diisi dan diketahui oleh Kepala Desa dan telah diberi surat keterangan oleh kepala desa kemudian diserahkan kepada kantor Badan Kredit Kecamatan;
3. Petugas Badan Kredit Kecamatan setelah menerima penyerahan formulir dari nasabah kemudian menetapkan besar kecilnya dengan persetujuan Camat;
4. Setelah surat permohonan kredit tersebut mendapatkan rekomendasi dari Camat, kemudian baru dapat dilaksanakan realisasi kredit.

Sementara itu, struktur organisasi Badan Kredit Kecamatan Kartasura seperti tampak dalam skema 2 berikut ini:

Skema 2: Struktur Organisasi Badan Kredit Kecamatan Kartasura



Keterangan:

- : Garis Organisasi / Operasi
- - - - - : Garis Koordinasi / Pengawasan
- L.P.P.D = Lembaga Pembiayaan Pembangunan Desa
- B.P.D = Bank Pembangunan Daerah
- B.K.K = Badan Kredit Kecamatan
- L.D./B.K.D = Lembaga Desa/Badan Kredit Desa

7. Petugas Badan Kredit Kecamatan

Badan Kredit Kecamatan Kartasura diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II, dan honorarium petugas diatur dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan Surat Keputusan yang dibebankan kepad Kas Badan Kredit Kecamatan.

Sementara itu, susunan petugas Badan Kredit Kecamatan terdiri atas:

1. Seorang Pembina (Camat Kepala Wilayah);
2. Seorang Ketua;
3. Seorang Staf Administrasi;
4. Seorang Staf Keuangan (Kasir).

8. Pola Kerja dan Pelayanan Badan Kredit Kecamatan

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, latar belakang pembentukan Badan Kredit Kecamatan bukanlah pengembangan bank, melainkan untuk pembangunan desa.⁴ Dalam menunjang pembangunan desa, Badan Kredit Kecamatan bertindak untuk melancarkan penyediaan sarana produksi khususnya permodalan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di pedesaan, yang sangat membutuhkan pinjaman modal tersebut.

4. Lihat Subardjo Darmojuwono dan Pangestu Subagyo, *Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah*, dalam Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, *Kredit Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta, BFFE, 1986, hlm.28.

Peminjam (nasabah) dari Badan Kredit Kecamatan, tidak diminta menyediakan jaminan yang bersifat material. Seperti diterangkan dalam Penjelasan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1981 pasal 14, jaminan kredit bersifat *inmaterial*, yang berupa karakter atau sikap dari nasabah. Karakter atau sikap yang meyakinkan, dijadikan pertimbangan utama untuk menilai apakah nasabah itu layak atau tidak untuk diberi pinjaman. Dengan pertimbangan ini, disamping diharapkan kredit tersebut dapat mencapai sasarannya, juga nasabahnya dapat menjalankan kewajibannya untuk ketentuan yang berlaku secara baik.

Secara operasional, penyediaan modal agar dapat dijangkau calon nasabah dengan mudah adalah, dengan mengambil jarak yang sedekat-dekatnya kepada calon dan nasabah, sehingga mereka tidak perlu kehilangan banyak waktu dan biaya transportasi untuk memperoleh pinjamannya. Untuk itulah, dalam melaksanakan operasinya Badan Kredit Kecamatan berusaha membuka pos-pos di desa-desa di wilayah Kartasura.

Sistem peminjaman disesuaikan dengan macam penerimaan penghasilan nasabah, dan cara pengangsurannya diatur secara mudah sesuai dengan tingkat kemampuan. Dengan pelayanan yang baik, sistem pinjaman yang mudah, sederhana dan sesuai dengan jadwal pendapatan nasabah, diharapkan program perkreditan Badan Kredit Kecamatan dapat berjalan lancar.

Pinjaman yang diberikan oleh Badan Kredit Kecamatan diatur seperti tampak dalam tabel 3. Pada tabel 3 tersebut tampak bahwa bunga pinjaman berbeda-beda untuk tiap macam kredit. Disamping itu, persentase besarnya tabungan dari pinjaman juga tidak sama. Sementara bunga tabungan sebesar 1,5 persen, dan setiap peminjam dibebani profisi 1 persen yang dipungut pada realisasi kredit. Setiap peminjam Badan Kredit Kecamatan diwajibkan menabung antara lain untuk investasi masyarakat, sebagai tambahan modal serta untuk penyediaan modal yang diperlukan dalam pembangunan, khususnya pembangunan desa. Tabungan nasabah dibukukan dalam buku tabungan yang dibawa peminjam, dan pada waktu-waktu tertentu dapat diambil untuk keperluan penting, dengan persyaratan hutang telah lunas. Sebagai perangsang kepada penabung diberikan bunga 0,5 persen per bulan dari saldo terendah masing-masing bulan.

Tabel 3. Macam-macam Kredit, Jangka Waktu, Bunga dan Tabungan

(1) Sistem pinjaman	(2) Jangka waktu	(3) Bunga (dalam periode pada kolom 2)	(4) Tabungan
Harian	22 hari	3,5%	6,5%
Pasaran	12 pasar	8 %	12 %
Mingguan	12 minggu	10 %	10 %
Bulanan	3 bulan	10 %	10 %
Lapanan	5 lapan	20 %	20 %
Musiman	6 bulan	12 %	10 %

Sumber: Data Sekunder

Pelaksanaan pelayanan Badan Kredit Kecamatan berpusat di kantor Kecamatan. Dari kantor pusat ini di koordinir operasi penyaluran kredit ke desa-desa melalui pos-pos Badan Kredit Kecamatan yang sudah didirikan. Penyaluran kredit melalui pos-pos yang didirikan di desa-desa pada umumnya bertempat di dekat pusat kegiatan, seperti pasar dan balai desa. Hal ini dimaksudkan dalam rangka mempermudah terjadinya kontak dengan calon nasabah dan nasabahnya. Pos-pos itu untuk masing-masing Badan Kredit Kecamatan tidak sama jumlahnya, tergantung dari tingkat kemajuannya.

Dalam pelaksanaan fungsi Badan Kredit Kecamatan prinsip yang dijadikan pegangan adalah berusaha menyediakan modal kepada golongan ekonomi lemah di pedesaan. Hal ini terutama bagi warga masyarakat yang berkarakter baik menurut lingkungannya dan berkemauan untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan cara berusaha.

9. Perkembangan Badan Kredit Kecamatan

Perkembangan Badan Kredit Kecamatan Kartasura yang sejak berdiri tahun 1971, dalam menuju sasaran operasional guna meningkatkan pendapatan masyarakat wilayah Kartasura memperlihatkan kemajuan-kemajuan yang tidak kecil. Artinya, bagi daerah yang dalam masa pembangunan, berdirinya Badan Kredit Kecamatan di Kartasura bagi pemerintah dan masyarakat telah dapat mengatasi sebagian dari kekurangan permodalan. Disamping

itu, telah dapat menghimpun dana-dana masyarakat serta meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah untuk menambah Anggaran Pembangunan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun anggaran Badan Kredit Kecamatan Kartasura diwajibkan membayar Dana Pembiayaan Pengawasan untuk Kabupaten sebesar Rp 50.000.

Untuk mengetahui konfigurasi data perkembangan Badan Kredit Kecamatan Kartasura tiga tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 4 berikut ini:

Tabel 4: Perkembangan Badan Kredit Kecamatan Kartasura Kabupaten Dati II Sukoharjo 1993 - 1995

Perkiraan	Tahun		
	1993	1994	1995
1. Modal	201.300.000	201.300.000	201.300.000
2. Dipinjamkan	40.719.600	41.409.100	89.777.600
3. Angsuran	17.110.500	14.916.500	33.399.200
4. Sisa Pinjaman			
ditangan Orang	23.609.100	26.447.600	56.378.400
5. Tunggalan Merah	4.704.000	4.704.000	4.704.000
6. Persentase			
Tunggalan Merah	19%	18,5%	17%
7. Keuntungan	1.120.391	1.051.210	1.606.270
8. Kekayaan Tahun			
Lalu	15.864.814	16.531.452	17.158.113
9. Simpanan Wajib	1.611.774	1.592.274	2.478.674
10. Anggota	276	315	425

Sumber: Data Primer

Dari tabel 4 diatas memperlihatkan, bahwa dana yang dipinjamkan Badan Kredit Kecamatan Kartasura kepada para nasabah tahun 1993 sebesar Rp 40.719.600 sementara pada tahun 1994 menjadi Rp 41.409.100 berarti mengalami kenaikan 1,69 persen. Kenaikan dana yang dipinjamkan kepada nasabah mencapai puncaknya pada tahun 1995, sejumlah Rp 89.777.600 dengan demikian naik 116 persen.

Kurangnya kesadaran para nasabah untuk memenuhi kewajiban mengangsur pinjamannya, pada tahun 1994 mengalami penurunan angsuran dibanding tahun 1993. Akan tetapi, secara kuantitatif pada tahun 1995, angsuran mencapai Rp 33.399.200 hal ini mengalami kenaikan 55,3 persen. Membengkaknya dana yang dipinjamkan kepada nasabah tahun 1995, yang mengalami kenaikan menjadi 116 persen dibanding tahun 1994, maka sebagai akibatnya sisa pinjaman di tangan orang pada tahun 1995 sebesar Rp 56.378.000 atau naik menjadi 53 persen, jika dibandingkan dengan tahun 1994.

Dari uraian tentang sumber kredit formal, khususnya Badan Kredit Kecamatan di Kartasura memperlihatkan, bahwa institusi tersebut masih tetap teguh mempertahankan prinsip-prinsip perbankan modern dalam menyalurkan modalnya kepada masyarakat. Dalam Badan Kredit Kecamatan peranan pemerintah daerah tampak masih sangat menonjol. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan program tersebut peranannya tidak hanya terbatas pada memberikan modal kerja dan payung hukum pada Badan Kredit

Kecamatan, melainkan juga ikut aktif dalam mengelola program tersebut.

Peranan unsur birokrasi Pemerintah Daerah Jawa Tengah dalam mengelola program tersebut masih relatif sangat besar,⁵ dibandingkan dengan program sejenis yang ada Sumatera Barat dan Jawa Timur. Keadaan di Jawa Tengah, yang memperlihatkan peran birokrasi masih menonjol dalam pengelolaan Kredit Kecamatan, tampaknya erat dengan latar belakang historis dari propinsi ini. Sistem pemerintahan kerajaan di Jawa Tengah yang dominan pada masa pra-kolonial, yang kemudian disusul dengan kolonialisme Belanda, membuat rakyat pedesaan di Jawa Tengah menjadi "pasif" dan sangat tergantung pada aparat pemerintah.

Hal ini sangat berbeda dengan Jawa Timur dan Sumatera Barat. Jawa Timur dalam struktur pemerintahan kerajaan Jawa merupakan daerah "manca negara", karenanya kekuasaan raja Jawa tidak sampai menguasai keseluruhan aspek kehidupan rakyat pedesaan. Semasa kolonialisme, kemandirian rakyat pedesaan di Jawa Timur masih dapat dilindungi, walaupun tidak secara keseluruhan, oleh para Kyai dan tradisi pesantrennya. Sementara itu, sistem kerajaan di Sumatera Barat sangat

5. Lihat Lukman Soetrisno, *Pengembangan Program Kredit Pedesaan Melalui Sistem Manajemen Dari Bawah*, dalam Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, *Kredit Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 1986, hlm.73.

jauh berbeda dengan sistem kerajaan di Jawa, khususnya dalam hubungannya dengan daerah pedesaan. Pada dasarnya, bukanlah raja yang berkuasa mutlak, melainkan kekuasaan raja terbagi rata dengan kekuasaan "ninik mamak".⁶ Kekuasaan kolonial Belanda tidak merubah kekuasaan *institusi ninik mamak* ini. Hal ini menyebabkan masyarakat pedesaan di Sumatera Barat tetap memiliki *lembaga adat* yang kokoh.

Suatu unsur yang menyebabkan kurang berhasilnya kebanyakan lembaga kredit formal seperti halnya Badan Kredit Kecamatan yang disponsori pemerintah selama ini adalah, diterapkannya pola *manajemen yang terpusat*⁷ dalam pengelolaannya. Para penganjur sistem manajemen yang terpusat melihat, demi tercapainya program pembangunan, maka rakyat pedesaan dan kultur mereka harus menyesuaikan dengan program pembangunan, dan bukan sebaliknya. Asumsi dasar dari sistem manajemen terpusat ini mungkin akan dapat mengelola suatu program pembangunan menjadi lebih efisien, akan tetapi ia kemudian tidak dapat menjadikan program tersebut menjadi efektif, khususnya apabila program tersebut ditujukan

6. *Ibid*, hlm.74.

7. Lihat, Edy Suandi Hamid, *Rekaman dari Seminar*, dalam Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, *Kredit Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta, BPFE, 1986, hlm.7.

untuk menjangkau masyarakat miskin.⁸ Disamping itu, manajemen program yang terpusat tidak akan dapat menjamin kelestarian program itu.

Dianggap bahwa masyarakat akan menerima saja paket yang dicetuskan dari atas. Masyarakat pedesaan dianggap sebagai suatu *ruang hampa*, yang selalu siap dan cocok menerima konsep dan program yang polanya disusun terpusat, yang merupakan hasil generalisasi dari pola-pola yang ada, yang sudah dianggap berhasil. Masyarakat diminta menyesuaikan diri dengan yang sudah baku tersebut.

Mengingat hal tersebut, berkembanglah di dalam kalangan para sarjana ilmu sosial suatu pemikiran baru dalam bidang pengelolaan proyek pembangunan, khususnya pembangunan pedesaan, yang disebut *manajemen dari bawah* atau *management by culture*.⁹ Satu ciri khas sistem manajemen ini, yang berlainan dengan sistem manajemen yang terpusat, adalah dalam sistem manajemen dari bawah, faktor-faktor kultural setempat bukan lagi harus menyesuaikan pada program pembangunan, melainkan sebaliknya, program pembangunanlah yang harus menyesuaikan dengan aspirasi dan tata cara kultural.

8. Lukman Soetrisno, *loc cit*, hlm.70.

9. *Ibid*.

Oleh karena itu, perlunya strategi pengembangan Badan Kredit Pedesaan diterapkan pendekatan atau sistem manajemen dari bawah. Hal ini tidak berarti peran pemerintah menjadi tidak dibutuhkan sama sekali. Di dalam Badan Kredit Kecamatan misalnya, peran pemerintah cukup menonjol. Hal ini terjadi karena budaya masyarakat setempat menghendaki atau terbiasa dengan pola seperti itu.

B. Praktik Pelepas Uang

Di Indonesia, pemerintah secara langsung maupun tidak langsung sudah sejak lama mencoba mendekatkan sumber dana pada masyarakat pedesaan. Adanya lembaga-lembaga keuangan formal seperti Badan Kredit Kecamatan, Badan Kredit Desa dan beberapa lembaga kredit lainnya, memperlihatkan adanya keinginan untuk membantu kekurangan dana yang banyak dialami penduduk pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya.

Akan tetapi, mengingat kompleksitas masalah tersebut, maka sejak lama pula berbagai program kredit pedesaan yang disponsori pemerintah itu belum memberikan hasil seperti yang diharapkan. Sumber kredit tidak resmi, yang pelan-pelan akan dihapuskan pemerintah, karena dianggap menjerat kehidupan masyarakat bertambah susah, dalam realitas empiriknya tetap dapat bertahan, bahkan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan pasar. Sumber kredit informal ini misalnya

pelepas uang (rentenir), yang umumnya meminjamkan dananya dengan tingkat bunga yang sangat tinggi, 20 persen¹⁰ per paket pinjaman. Situasi kekurangan uang yang permanen,¹¹ menyebabkan penduduk pedesaan dengan beban hutang yang semakin berat. Pelepas uang atau tukang kredit ini dapat ditemui di setiap desa oriental.¹²

Meskipun para pelepas uang atau rentenir dicemooh dengan berbagai caci maki atas profesinya oleh pihak luar yang terkait dengan kredit itu, akan tetapi ia tidak dianggap musuh oleh nasabahnya. Menurut penuturan Warjinah,¹³ yang terlibat hutang dengan rentenir Sumiyati bertahun-tahun lamanya, berprofesi sebagai penjual Bakmi, yang setiap malam menjual dagangannya di depan rumahnya di Brontowiryan, Kartasura, bahkan menganggap bahwa rentenir tersebut sebagai orang yang berjasa bukan hanya dalam membantu kebutuhan dagangannya tetapi juga kebutuhan hidup lainnya.

10. Wawancara mendalam tanggal 6 Oktober 1996, dengan Warhono Rahardjo, salah seorang pemilik Warung yang sekaligus menjadi petugas SATPAM di Terminal Bus Kartasura.

11. Lihat, J.H. Boeke, *Prakapitalisme di Asia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1983, hlm.112.

12. *Ibid*, hlm. 120.

13. Wawancara mendalam dengan nasabah rentenir ini, dilaksanakan tanggal, 11 Oktober 1996.

Adanya realitas demikian telah menimbulkan kesadaran sementara orang atas peran positif pelepas uang atau rentenir tersebut. Dale W. Adams melukiskan, sebagaimana dikutip Mubyarto, sebagai berikut:¹⁴

".....cemoohan yang dilontarkan kepada pelepas uang sama halnya memberi bumbu bagi literatur, dan justru mempermudah penjelasan masalah yang dialami bagi mereka yang tidak tahu..... Berbagai kebijaksanaan tentang pemberian kredit murah yang hanya didasarkan pada asumsi tentang ketamakan para pelepas uang yang menghisap peminjam dengan bunga tinggi, sama halnya dengan usaha mengejar setan".

Dalam praktik, institusi pelepas uang khususnya di negara yang sedang berkembang¹⁵ dijumpai adanya semacam dualisme sumber dana dalam masyarakat. Dualisme sumber dana tersebut antara lain berasal dari sektor formal atau institusi pelepas uang formal dan tidak formal. Institusi pelepas uang formal sumber dananya dari bank baik pemerintah maupun swasta, koperasi dan institusi lain yang terdaftar. Sementara itu, sumber dana tidak resmi antara lain sumber dana perseorangan, keluarga,

14. Mubyarto, dkk, *Laporan Akhir Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan di Propinsi Jawa Tengah*, Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada, Bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta, Yogyakarta, 1987, hlm.3.

15. Gunawan Sumodiningrat, *Lembaga Dana Informal dan Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat*, Disajikan dalam Seminar Sehari Kredit dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Bank Indonesia, Jakarta, 15 Januari 1987.

teman, serta sumber dari pelepas uang atau rentenir.

Secara historis, adanya sumber dana dari pelepas uang informal berkaitan dengan perkembangan ekonomi masyarakat yang pada awalnya berlatar belakang ekonomi *subsisten* berkembang menjadi komersial. Dalam keadaan ekonomi *subsisten* kebutuhan dana diperoleh atas dasar saling mengenal dan kepercayaan antara peminjam dan yang meminjamkan. Kepercayaan sangat menentukan terjadinya suatu transaksi. Jaminan dan prosedur peminjaman tidaklah dipentingkan, bahkan tingkat bunga dalam realitas empiris tidak pernah diperhitungkan. Meskipun dalam penggunaannya dana ini dapat dipergunakan tidak hanya untuk kebutuhan keluarga, misalnya konsumsi dan kebutuhan sosial, akan tetapi juga untuk keperluan ekonomis seperti untuk modal pokok usaha, memperluas usaha dan kebutuhan ekonomi lainnya.

Bagi masyarakat Kartasura terutama yang berpenghasilan rendah pada umumnya terjerat dalam pelayanan institusi pelepas uang formal, seperti bank baik milik pemerintah maupun swasta, hal ini disebabkan karena persyaratan mereka untuk mendapatkan pelayanan tidaklah memadai. Disamping itu, kurangnya kemandirian kelompok lemah dan miskin ini menyebabkan ruang gerak pelepas uang informal seperti rentenir sangat leluasa. Peningkatan kemandirian kelompok miskin melalui pendekatan partisipasi dari bawah seperti yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dengan pendekatan informal yang mengarah pada

pemecahan masalah dapat diharapkan mengangkat kelompok lemah dari jeratan rentenir.

B.1. Karakteristik Pelepas Uang

Dari latar belakang pemberi pinjaman yang bersumber pada pelepas uang informal terdapat variasi menurut keahlian dan latar belakang mereka. Pada umumnya praktik memberi pinjaman ini bukan merupakan pekerjaan pokok mereka. Munculnya pelepas uang informal adalah disebabkan karena institusi pelepas uang formal belum mampu menjangkau kebutuhan masyarakat bawah atau para nasabahnya secara efektif. Disamping itu, institusi pelepas uang memiliki karakteristik khusus yang pada umumnya tidak dimiliki oleh lembaga kredit formal. Beberapa karakteristik tersebut antara lain:¹⁶

- a. Dana mudah diperoleh kapan saja dan dimana saja;
- b. Prosedural yang sederhana dan tidak diperlukan pengisian formulir permohonan;
- c. Terdapat kaitan yang erat antara kebutuhan nasabah dalam pemenuhan kebutuhan input, kredit dan pemasaran hasil;
- d. Saling mempercayai, tanpa menekankan jaminan;

16. Ng. Beoy Kui, *Some Aspects of the Informal Financial Sector in the SEACEN Countries*, The SEACEN Research and Training Centre, 1985, Staff Paper No. 10.

- e. Biaya transaksi yang ditanggung peminjam relatif rendah;
- f. Pencairan dana dengan cepat sesuai dengan kebutuhan mendadak;
- g. Penggunaan dana leluasa, tidak terbatas untuk kegiatan ekonomi (produksi);
- h. Merupakan sumber penghasilan dan investasi yang menguntungkan bagi pemilik uang yang enggan menitipkan uangnya di lembaga formal.

Meskipun memiliki implikasi negatif dari adanya pelepas uang informal sesuai dengan karakteristik dan praktiknya, akan tetapi juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti tampak dalam masyarakat di Kartasura. Bahkan dapat dikatakan seringkali pelepas uang informal mempunyai peranan sebagai alternatif, disamping menjadi sumber dana pokok masyarakat baik golongan lemah maupun golongan dengan permodalan kuat yang memerlukan dana dalam waktu singkat serta prosedur sederhana.

Di negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, pada saat lembaga keuangan menuju monetisasi, sumber dana informal masih memegang peranan yang sangat penting. Peranan penting pelepas uang informal ini memiliki arti *positif* karena merupakan salah satu katup penyelamat, bahkan dapat dikatakan sebagai penggerak ekonomi manakala sektor formal belum mampu menjangkau masyarakat.

Disamping itu, juga mempunyai arti negatif, karena keterbatasannya sektor formal menjangkau masyarakat, sebagai akibatnya dalam transaksi pinjam meminjam kepada pelepas uang informal relatif memberatkan peminjam, khususnya bagi mereka yang tidak memenuhi syarat meminjam dari sektor formal. Sebagai perbandingan, beban bunga dari Lembaga Keuangan Informal ini berkisar antara 5 - 27 persen per tahun di Malaysia,¹⁷ dan tertinggi berkisar antara 10 - 150 persen per tahun di Nepal. Namun demikian, perlu diakui bahwa peranan ini belum dapat terungkap dengan jelas karena praktik pelepas uang informal selalu tidak terang-terangan.

Adanya pelepas uang informal secara negatif tidak saja memberatkan masyarakat tetapi pada dasarnya bagi bank sentral sendiri menjadi semakin menghambat proses monetisasi di negara-negara sedang berkembang. Di lain pihak, kebiasaan ini dapat menimbulkan ketidak beresan di sektor formal (perbankan) yang menjadi amat sulit memperbaikinya, seperti dikatakan Gbate:¹⁸ ".....central bank also tend to feel somewhat frustrated by their inability ensure depositor security and the some degree

17. Gunawan Sumodiningrat, *op cit.*

18. Lihat, P.B. Gbate, *Some Issues for the Regional Study on Informal Credit Markets, A Background Discussion Paper for the Design Workshop, Manila, May 28 to 30, 1986, hlm.5.*

of protection against fraud and imprudent management that they can enforce in the formal sector".

Lembaga Keuangan Informal di Indonesia dapat dibedakan dalam dua bentuk yakni untuk kepentingan komersial dan non komersial. Bentuk *komersial* Lembaga Keuangan Informal meliputi toko-toko dan kios, penjual keliling atau mindering, ngebon barang, ngalap nyaur¹⁹ dan pelepas uang atau rentenir. Sementara *non komersial* Lembaga Keuangan Informal terdiri dari sumber kredit dari kenalan, tetangga, saudara dan patron.

Lembaga Keuangan Informal yang berbentuk pelepas uang atau rentenir, dalam praktik pada dasarnya telah menjerat masyarakat miskin, terutama para pedagang atau bakul kecil-kecilan. Munculnya praktik rentenir sangat berkaitan dengan latar belakang dan budaya masyarakat yang belum dapat membedakan kebutuhan produksi, konsumsi dan kebutuhan sosial lainnya, serta belum mampu mengendalikan ekonomi rumah tangga mereka. Kemampuan untuk menghasilkan masih minim serta kemampuan permodalan yang rendah, sementara tidak ada pihak lain yang membantu mereka, maka tidak ada pilihan lain kecuali datang ke rentenir.

19. Lihat, Jennifer Helen Alexander, *Batas Minimum Kredit untuk Pedagang Kecil*, Prisma Juli 1987, Nomor 7, Jakarta, LP3ES, hlm. 57.

Program pemerintah yang diharapkan oleh kelompok lemah dari jeratan rentenir ini belum sepenuhnya dapat mengangkat kehidupan ekonomi mereka. Program pemerintah seperti misalnya Badan Kredit Kecamatan tampaknya belum berhasil menjanjikan ekonomi para pedagang kecil dan para bakul. Salah satu unsur yang menyebabkan kurang berhasilnya Badan Kredit Kecamatan yang disponsori pemerintah adalah, diterapkannya pola manajemen yang terpusat. Pendirian Badan Kredit Kecamatan yang "*didrop*" dari "*atas*" dengan pengelolaan dan konsep dari atas, tanpa melihat situasi, kondisi dan budaya merupakan faktor yang menyebabkan aspek efektivitas dari lembaga kredit itu belum terwujud. Hal ini terjadi karena pola kerja dari pengelola badan kredit itu terbawa oleh pola *birokrasi* atau pola *orang kantoran*. Mereka bersifat menunggu, dan menerapkan berbagai peraturan dan persyaratan secara ketat dan kaku, seperti halnya dituntut oleh prinsip perbankan modern.

Sementara itu, kelemahan mendasar dari masyarakat ekonomi lemah atau para pedagang-pedagang kecil adalah dalam hal pemasaran hasil produksi. Baik produksi pertanian maupun produksi kegiatan sampingan seperti hasil kerajinan rumah tangga. Dengan demikian, tidak jarang masyarakat golongan ini terjerat dalam kebiasaan "*gali lubang tutup lubang*".

Dalam kondisi seperti inilah, maka peran swadaya masyarakat sangat diperlukan. Adanya kerjasama, saling

pengertian dan rasa solidaritas di antara kelompok lemah bahkan dengan kelompok lain pun, sangat diperlukan. Akan tetapi, semangat dan keinginan masyarakat untuk mandiri seringkali kandas di tengah jalan. Di satu pihak disebabkan rendahnya motivasi mereka dan latar belakang ekonomi yang lemah. Kebutuhan keluarga selalu bertambah besar baik untuk berprestasi, konsumsi, kebutuhan sosial, pendidikan dan kesehatan. Pelepas uang atau rentenir dengan pelayanan yang sangat mudah memberikan uluran tangan dengan ramah dan persyaratan sangat ringan.

B.2. Citra Universal Pelepas Uang

Semua orang tahu bahwa profesi meminjamkan uang dengan mendapat imbalan bunga adalah rentenir. Sebagai implikasinya, para pekerja pelepas uang informal sering mendapat citra buruk dari warga masyarakat. Dalam berbagai kebudayaan, profesi pelepas uang sering diidentikan pekerjaan setan, sebab menarik riba atas uang yang dipinjamkan. Dari ilmuwan, ulama, dramawan, politisi hingga nabi membubuhkan konotasi buruk atas profesi rentenir.

Atas dasar informasi kualitatif dalam penelitian ini memperlihatkan, pada umumnya mereka beranggapan bahwa pekerjaan pelepas uang ibarat menikmati kesusahan orang lain, bersifat monopolistik, lintah darat, tidak punya perasaan, kejam, eksploitatif, pemeras, *nulung menthung*, hingga segudang citra buruk lainnya. Bahkan *diskursus* terhadap profesi pelepas uang informal di Kartasura

memberi jargon sebagai pengedar uang panas.²⁰

Ironisnya, kendatipun citra buruk dibangun oleh berbagai kebudayaan profesi ini tidak surut bahkan ada kecenderungan semakin berkembang sejalan dengan ekspansi perdagangan. Buktinya pemerintah sampai saat ini sangat kewalahan mengatasi *sistem ijon, bank plecit, bank ucek- ucek, rentenir* dan rentenir terorganisasi yang berlindung dibalik operasi koperasi simpan pinjam.

Sampai saat inipun pemerintah masih berpegang pada *Geldscheiters Ordonantie Tahun 1938*, yang melarang pelepas uang tanpa izin pemerintah.²¹ Data *Volkstelling* tahun 1930 Jawa dan Madura menunjukkan bahwa sejak masa kolonial profesi ini sudah berkembang. Total pekerja rentenir 21.447 orang, 60 persen pribumi, 8 persen Eropa, 24 persen Cina dan 4 persen lainnya. Hingga kini tidak ada lagi rekaman makro aktivitas pelepas uang.

20. *Uang panas* merupakan jargon lokal yang diberikan informan kunci untuk menunjuk sejumlah uang yang dipinjam debitur potensial dari seorang rentenir. Informasi kualitatif ini diperoleh atas dasar wawancara mendalam dengan W. Muslich, BA, seorang tokoh masyarakat Sedahromo Lor Kartasura.

21. Lihat Engelbrecht, *Geldscheiters Ordonantie 1938*, dalam *De Wetboeken Wetten En Verordeningen Benevens De Voorlopige Grondwet van De Republiek Indonesie*, Leiden - Awsijthhoff S - Uitgeversmij NV, 1954, hlm. 2719.

B.3. Legitimasi Budaya Pelepas Uang

Pengamatan empirik, di Kartasura memperlihatkan bahwa perkembangan pelepas uang menunjukkan aktivitas yang tinggi. Di lokasi penelitian ada dua karakteristik profil pelepas uang informal. *Pertama*, mereka yang terang-terangan melakukan aktivitasnya dengan menawarkan dananya kepada masyarakat terutama pedagang kecil, para bakul di pasar dengan besar pinjaman antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). *Kedua*, mereka sembunyi-sembunyi dalam melakukan aktivitasnya, hanya orang-orang yang dikenal secara baik dan dapat dipercaya yang dapat dijadikan sebagai debitur. Besarnya pinjaman berkisar antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Di Kartasura, pemerintah juga menggelar berbagai kredit dengan bunga murah, yakni 1,5 persen sampai 2,5 persen, melalui institusi finansial formal, seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat, Badan Kredit Kecamatan serta Badan Kredit Desa. Akan tetapi, pelepas uang informal yang menarik bunga lebih tinggi yakni kurang lebih 20 persen per paket kredit, tetap saja atraktif dan menarik banyak nasabah. Bahkan ada kecenderungan semakin tinggi mobilitasnya.

Alasan mengapa kredit rentenir lebih atraktif bukan semata-mata pada kerumitan prosedur dan arogansi administratif lembaga finansial formal terhadap orang-orang

lapis bawah, tetapi terletak pada persoalan budaya ekonomi masyarakat. Perilaku ekonomi rentenir berkaitan dengan budaya lokal. Dalam praktik mereka selalu membangun citra diri lewat penguatan kapital budaya (*cultural capital*), seperti menolong nasabah yang sedang susah dan menyumbang aktivitas keagamaan.

Semakin tinggi kapital budaya yang dimiliki oleh rentenir, maka citranya semakin baik, sehingga praktik-praktiknya tidak banyak terusik oleh citra buruk sebagai warisan tradisi. Biaya-biaya sosial untuk dalam rangka peningkatan kapital budaya dihitung secara rasional sebagai biaya ekonomi dalam menopang praktiknya. Semakin tinggi kapital budaya yang dimiliki berkorelasi positif dengan kapital ekonomi atau luas skala usahanya. Akibatnya, paket-paket kredit *telungpuluhan* (bulanan), *sewidakkan* (dua bulanan) dan *sangangpuluhan* (tiga bulanan) laku keras.

C. Mekanisme Transaksi Kredit

Badan Kredit Kecamatan dan Badan Kredit Desa di Kartasura memiliki hubungan yang formal dengan para nasabahnya. Apabila seseorang akan mengajukan kredit ke Badan Kredit Desa misalnya, maka mereka harus datang ke Kantor Kelurahan dengan hari dan jam yang telah ditentukan, yakni satu minggu sekali. Dalam hal ini tidak menjadi persoalan sejauh pengambilan kredit oleh para nasabahnya memang akan digunakan untuk tujuan-tujuan

produktif sebagaimana diinginkan oleh pemerintah.

Akan tetapi bagi warga yang akan membutuhkan dana untuk keperluan konsumtif, hal ini yang biasanya menimbulkan masalah. Pemenuhan kebutuhan hidup adalah sesuatu yang pribadi, karena hal itu menyangkut kehormatan dan harga diri keluarga. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa akhirnya masyarakat yang tidak memiliki usaha pokok enggan untuk berhubungan dengan Badan Kredit Kecamatan atau Badan Kredit Desa yang disponsori pemerintah. Lembaga seperti bank plecit seperti yang beroperasi di Kartasura dan juga rentenir mendukung kenyataan ini. Mereka banyak berhubungan dengan masyarakat yang secara sosial tidak memiliki usaha pokok. Meskipun bank plecit memiliki kantor yang tetap, akan tetapi lembaga ini tidak menggunakan kantornya untuk menerima masyarakat yang akan berhutang. Kantor yang ada hanya sebagai pos para pegawainya untuk melayani nasabah dari rumah ke rumah. Dari pos itulah mereka akan datang dari rumah ke rumah dengan berbagai pendekatan kepada masyarakat. Hubungan antara lembaga dengan nasabah dengan demikian akan menjadi intim.

Hal ini juga tampak kedekatan hubungan antara rentenir dengan para nasabahnya, sangat mereka rasakan. Rentenir yang beroperasi di Kartasura misalnya sering pula memperhatikan lingkungan sosialnya, menunjukkan sikap kedermawanannya, dan mengikuti kegiatan sosial lainnya.

Selain hal-hal yang disebut diatas, faktor fleksibilitas²² operasi rentenir membuat pelayanan terhadap nasabahnya menjadi efektif. Disamping itu sifat dasar yang terjalin antara nasabah dengan rentenir yang melayani nasabah itu. Suatu pelepas uang yang efektif adalah yang dapat menjalin hubungan yang *saling tergantung* (*interpendence*) antara pelepas uang dengan para nasabah mereka.

Ikatan batin antara rentenir dan para nasabah sebagaimana dinarasikan diatas membuat urusan perkreditan, khususnya persoalan pengembalian kredit, menjadi sederhana dalam arti bahwa proses mekanisme transaksi pengembalian kredit menjadi lancar. Meskipun bunga yang dibebankan kepada para nasabah relatif cukup tinggi, akan tetapi para nasabah membayar kembali kredit itu sebagai kewajiban sosial mereka. Dari sinilah letak mengapa tunggakan kredit pada pelepas uang informal (rentenir) menjadi sangat kecil.

Sifat saling tergantung antara rentenir dengan para nasabahnya, meskipun sering asimetris sifatnya, tak dijumpai dalam perkreditan formal. Badan perkreditan formal seperti misalnya Badan Kredit Kecamatan masih melihat tugasnya hanya sebagai penjual jasa. Sebagai penjual jasa memang harus diakui telah banyak yang telah

22. Wawancara dengan Suyono, Kepala Urusan Pemerintahan Kelurahan Kartasura, tanggal 8 Oktober 1976.

dilakukan badan tersebut untuk membuat barang dagangan mereka menarik bagi calon pembeli. Tetapi hubungan Badan Kredit Kecamatan dengan para nasabahnya masih sangat bersifat hubungan ekonomi murni dan bukan sebagai hubungan sosial yang sebenarnya menjadi dasar keterlibatan masyarakat di Kartasura dalam transaksi ekonomi seperti yang tercermin dalam hubungannya dengan rentenir.

Aspek lain dari hubungan antara badan perkreditan dengan para nasabahnya tercermin dalam sistem penagihan. Dalam hubungan ini beberapa cara penagihan digunakan oleh Badan Kredit Desa, masing-masing cara mencerminkan sifat hubungan yang terjalin antara Badan perkreditan dengan para nasabahnya. Badan Kredit Desa menerapkan cara penagihan pasif, dalam arti nasabah datang ke kantor yang berada di Kelurahan untuk membayar angsurannya. Dengan demikian, memperlihatkan hubungan antara Badan Kredit Desa dengan nasabahnya dalam posisi sangat formal. Hal sebaliknya justru terjadi pada hubungan antara rentenir dengan nasabahnya.

Rentenir datang membawa uang yang dibutuhkan oleh nasabah ke rumah nasabah masing-masing. Merekapun menagih angsuran ke rumah-rumah para nasabah. Kunjungan untuk menagih ke rumah telah disetujui bersama antara nasabah dengan rentenir. Sementara itu, rentenir akan mengurungkan penagihannya bahkan akan menawarkan pinjaman baru manakala ia melihat nasabah tengah menghadapi kekurangan uang. Dengan demikian, para

nasabah yang sebagian besar pedagang kecil dan para bakul, merasa selalu dipercaya oleh rentenir. Karena merasa dipercaya, mereka pun selalu akan berusaha memenuhi kewajibannya dengan mengangsur setiap hari. Bunga yang tinggi atau yang rendah, bukan menentukan kemauan masyarakat di Kartasura menjalin hubungan dengan badan perkreditan formal maupun dengan rentenir. Faktor yang paling menentukan dalam hubungan ini adalah kejujuran dari pelepas uang baik yang formal maupun informal, disamping kemudahan dalam memperoleh pelayanan itu.

Walaupun telah banyak usaha yang telah dilakukan perbankan dan kredit-kredit program khusus untuk pengembangan usaha kecil, akan tetapi lembaga keuangan pedesaan belum mampu melayani sebagian besar golongan miskin di pedesaan.²³ Pilot proyek pengembangan hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Federal Jerman tahun 1989, bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem lembaga keuangan pedesaan, sehingga dapat menjangkau kelompok masyarakat dengan baik. Kelompok sasaran dari pilot proyek adalah pengusaha-

23. Pilot Project Linking Banks and Self-Help Groups, Technical Cooperation Between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of the Federal of Germany, Cooperative and Small Credit Departement, Bank Indonesia, 1989, hlm.1.

pengusaha kecil wanita dan pria yang berusaha di sektor informal pedesaan maupun pinggiran kota kecil.²⁴

Akan tetapi, ironisnya kehadiran rentenir di Kartasura ternyata sangat dibutuhkan oleh pedagang-pedagang kecil dan para bakul. Hubungan antara rentenir dan para nasabah terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Mengenai besarnya bunga yang seringkali dianggap menjerat nasabah, dari hasil wawancara dengan *Marhono Rahardjo*,²⁵ pedagang warung yang sekaligus bekerja sebagai SATPAM di Terminal Bus Kartasura, besarnya bunga tidak menjadi masalah, dan dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Menurutnya, yang paling penting adalah uang tersedia pada saat dibutuhkan. Pada saat kebutuhan uang sangat mendesak, tidak mungkin pinjam pada lembaga perkreditan formal seperti bank, Badan Kredit Kecamatan dan Badan Kredit Desa, karena meminjam kepada lembaga-lembaga keuangan tersebut membutuhkan waktu lama.

C.1. Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga yang dikenakan oleh Badan Kredit Kecamatan, dan Badan Kredit Desa berkisar antara 3,5 persen sampai dengan 20 persen, hal tersebut tergantung

24. *Ibid*, hlm.2.

25. Wawancara mendalam dilaksanakan pada tanggal, 6 Oktober 1996.

dari sistem pinjaman jangka waktu dan tabungan. Tingkat bunga ini tentu jauh lebih rendah bunga yang dikenakan rentenir kepada nasabah yang memasang tarif bunga cukup tinggi, yakni 20 persen per paket pinjaman.

Tingkat suku bunga yang tinggi yang dikenakan rentenir kepada para nasabah tidaklah mengganggu hubungan personal diantara mereka. Oleh karena tingkat bunga yang tinggi ini disebabkan karena kebutuhan untuk pelayanan kepada anggota yang cukup intensif yakni pelayanan dari pintu ke pintu. Ketergantungan nasabah kepada rentenir, dengan bunga yang sangat tinggi membuktikan bahwa masyarakat bersedia untuk membayar berapapun besarnya, untuk hal-hal yang dianggapnya penting.

C.2. Tata Cara Penagihan

Badan Kredit Kecamatan dan Badan Kredit Desa menerapkan penagihan secara pasif, artinya nasabah datang ke kantor untuk mengembalikan angsurannya pada saat kantor dibuka. Petugas Badan Kredit Desa baru mendatangi rumah para nasabah untuk menagih angsuran jika ia menunggak. Dalam hubungan ini timbul kembali kesan resmi sebagaimana diungkapkan dalam bagian terdahulu.

Hal tersebut tidak terjadi pada pelepas uang informal atau rentenir. Kedatangan rentenir ke rumah penduduk tidak selalu menagih hutang. Pada saat nasabah ingin mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan dagangan dan kebutuhan sehari-hari, dengan mudahnya seorang

rentenir akan datang membawakan uangnya langsung ke rumah. Apabila suatu ketika ia tidak mampu membayar angsuran, ia masih akan menawarkan jasa baiknya meminjamkan kembali, sepanjang ia melihat nasabah tersebut memiliki jaminan. Hanya pada waktu yang memang kritis, saat nasabah sudah amat menumpuk hutang, maka nasabah menjadi khawatir akan terjadi penyitaan. Akan tetapi menurut penuturan nasabah rentenir, Warjinah²⁶ yang sudah bertahun-tahun menjadi langganan rentenir, hal tersebut belum pernah terjadi.

C.3. Jangkauan Pelayanan

Dari segi jangkauan pelayanan, tampak terlihat bahwa lembaga perkreditan pedesaan di Kartasura sudah dapat menjangkau masyarakat pedesaan berpenghasilan rendah. Hanya saja proses penjangkauan lapisan masyarakat berpenghasilan rendah tersebut yang berbeda dari satu lembaga perkreditan dengan rentenir. Badan Kredit Kecamatan dan Badan Kredit Desa menjangkau nasabah dengan pelayanan yang relatif lebih pasif, karena para nasabah harus datang ke kantor perkreditan tersebut, apabila akan mengajukan kredit.

Sementara itu, rentenir dapat menjangkau nasabah dengan cara yang sangat aktif, yakni mendatangi dari

26. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1996.

rumah ke rumah. Jangkauan pelayanan yang demikian sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang memang sangat membutuhkan uang tunai untuk usaha, disamping untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari yang sangat mendesak. Rentenir dalam menawarkan kredit sangat aktif merayu para pedagang-pedagang kecil dan bakul untuk meminjam. Ia dapat duduk berlama-lama dengan calon nasabah sebelum pindah ke tempat lain. Begitu pula terhadap nasabah yang telah habis masa cicilannya, selalu ditawarkan untuk meminjam lagi. Bahkan, sebelum masa angsurannya lunas sudah mendapat tawaran, untuk melunasi saja hutangnya, selanjutnya meminjam lagi dalam jumlah yang lebih besar. Dengan pendekatan yang efektif, entah masyarakat membutuhkan dana atau tidak, rentenir berupaya menarik minat untuk meminjam pada nasabah yang dipercayainya. Pola-pola pelayanan yang sedemikian mudah itulah yang senantiasa dipilih masyarakat pedagang dan para bakul di kawasan Kartasura, yang relatif belum mengenal budaya administrasi.

D. Pelepas Uang Dalam Perspektif Hukum

Dalam praktik, pinjam meminjam uang dapat terjadi bukan karena karya budi, akan tetapi dikarenakan nafsu kebendaan yang memperkosa kehidupan orang lain. *Hilman Hadikusuma*, menyebutnya sebagai perbuatan para pelaku *lintah darat*, yang melakukan perbuatan *ijoan* atau

tebasan.²⁷ Dilihat dari segi sipemberi pinjaman, perbuatan *ijon* atau *tebasan*, berarti meminjamkan uang kepada para petani yang membutuhkan uang atau bahan makanan sedangkan tanaman padinya masih hijau belum dapat diketam. Atau karena terdesak keadaan walaupun padi sudah tua tetapi masih belum diketam diserahkan kepada *pelepas uang*, untuk mendapatkan pinjaman yang disebut *tebasan*. Di daerah Lampung disebut istilah *ngelepas ladao* (ngelapas lada) atau *ngelepas kupei* (ngelapas kopi), yang berarti memberi pinjaman kepada petani dengan janji dibayar kopi atau lada setelah panen, adalah merupakan hutang piutang yang bersifat *ijon*.²⁸

Pada hakikatnya pinjam meminjam yang sifatnya menggandakan dari pinjaman pokok, apakah itu perjanjian yang harus dipenuhi oleh debitur menurut waktu yang telah ditentukan, ataukah ia bersifat kekeluargaan yang pembayaran pinjaman diserahkan kepada pada kesediaan dan rasa malu dari pihak kreditur, semua perbuatan tersebut bagi mereka yang beragama Islam adalah "*dilarang*", yang secara eksplisit disebut dalam Al Qur'an sebagai berikut:

27. Lihat, Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.79.

28. *Ibid*.

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya".²⁹

Selain dari larangan agama, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelepas uang, yakni *Geldscheiters Ordonantie*,³⁰ tanggal 12 September 1938, S.1938 - 523 atau Undang-Undang Riba, yaitu *Woeker Ordonantie*, S.1938 - 524. Dalam *Geldscheiter Ordonantie* tahun 1938, terdapat larangan bagi pelepas uang yang melakukan aktivitasnya, sebagaimana tercantum dalam pasal 1, sebagai berikut:

"Dilarang melakukan usaha pelepas uang tanpa izin dari pemerintah".

Pengertian dari pelepas uang menurut ordonantie tersebut adalah orang atau badan hukum dengan sengaja mencari untung dengan nama atau bentuk apapun dalam melakukan usaha ini. Sementara yang tidak termasuk ini

29. Lihat, Al Qur'an dan Terjemahannya, Surat Al Baqarah ayat 278 - 279, Depertemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1979, hlm.69 - 70.

30. Mr.N.A. Engelbrecht, *Geldscheiter Ordonantie 1938*, dalam *De Wetboeken Wetten En Verordeningen Benevens De Voorlopige Grondwet Van De Republiek Indonesie*, Leiden - Awsijthhoff S. Uitgeversmij NV, 1954, hlm.2719.

dalam ordonantie tersebut adalah Bank Perkreditan Umum, Kredit Rakyat dan Pegadaian Negeri.

Dalam perundang-undangan tersebut untuk mengatur dan membatasi perbuatan pelepas uang dan riba itu di daerah swapraja-swapraja di Sumatera Timur dimasa sebelum perang kemerdekaan, dikeluarkan peraturan-peraturan swapraja yang intinya para pelepas uang harus ada izin dari para-penguasa selama 3 tahun.³¹ Kendatipun adanya aturan yang melarang baik dari ketentuan agama maupun hukum positif terhadap perbuatan pinjam meminjam yang dilakukan rentenir, akan tetapi di kawasan pedesaan dan di kota-kota kecil hal ini masih tetap berlangsung seiring dengan perkembangan ekonomi. Di tanah Batak terdapat dua istilah pinjam meminjam, yakni untuk pinjaman dengan pembayaran bunga yang disebut "*manganahi*", sedangkan untuk pinjaman tanpa membayar bunga disebut "*morssali*". Menurut hukum adat,³² yang dimaksud bunga adalah "*bunga pinjaman*", dengan demikian hukum adat tidak mengenal "*bunga kelalai-an*" (*moratoire interessen*), yakni bunga karena kelalaian membayar hutang sebagaimana pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Atau juga bunga sebagai ganti rugi akibat hutang tidak dibayar sama sekali atau dibayar secara kurang baik (*compensatoire interessen*).

31. Hilman Hadikusuma, *loc cit*, hlm.80.

32. *Ibid*, hlm.81.

Kendatipun secara yuridis terdapat larangan terhadap praktik rentenir, akan tetapi secara sosiologis aktivitas rentenir tetap saja berlangsung di Kartasura tidak ada tanda-tanda surut, bahkan memperlihatkan mobilitas yang tinggi. Wilayah operasinya, berada di sekitar Terminal Bus, terutama obyek sasarannya adalah para pedagang kaki lima, para bakul, pedagang di pasar-pasar dan warung-warung. Secara sosiologis, meskipun cara-cara penawaran yang dilakukan rentenir sangat menarik bagi calon nasabah, akan tetapi pada hakikatnya tidak ada unsur paksaan dari rentenir agar calon nasabah meminjam uang kepadanya.

Terjadinya transaksi kredit antara rentenir dan nasabah secara empirik di Kartasura, memperlihatkan adanya kepentingan kedua belak pihak. Artinya disatu sisi, nasabah membutuhkan dana untuk kepentingan usaha atau kebutuhan kehidupan lainnya, sementara rentenir mencari keuntungan atas dana yang dipinjamkan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk melakukan kontrak dengan rentenir atau tidak.

Prinsip kebebasan berkontrak ini muncul bersamaan dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang mengagungkan *laissez faire*³³ atau persaingan bebas. Keduanya saling

33. Lihat, Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bangk di Indonesia*, Seri Hukum

mendukung dan berakar dari paham hukum alam. Kedua paham ini berpendapat bahwa individu pada umumnya mengetahui kepentingan mereka yang paling baik dan cara mencapainya. Kemampuan tersebut karena manusia mempergunakan akalnyanya.³⁴ Oleh karenanya, menurut hukum alam individu-individu harus diberi kebebasan untuk menetapkan langkahnya, dengan sekuat akal dan tenaganya, kesejahteraan yang seoptimal mungkin.

Dalam praktik, hubungan rentenir dengan para nasabahnya di Kartasura, memiliki *bargaining position* yang tidak seimbang. Dalam keadaan seperti itu karena rentenir yang mempunyai uang, maka ia diasumsikan memiliki *bargaining position* yang kuat terhadap nasabahnya. Dengan demikian, terdapat hubungan hukum antara rentenir dengan nasabah, dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang.

Hubungan rentenir dengan nasabahnya dalam perspektif hukum dapat dikategorikan sebagai hubungan antara kreditur dan debitur, hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*) dan hubungan kerahasiaan (*confidential relation*). Ketiga hubungan antara rentenir dengan nasabahnya tersebut dapat ditambah dengan hubungan kehati-hatian. Keempat hubungan tersebut senantiasa menjiwai hubungan

...Continued...

Perbankan, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.8.

34. *Ibid.*

rentenir dengan nasabah, terutama berkaitan dengan hubungan rentenir sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, yang dituangkan dalam perjanjian secara lisan (informal) tanpa melalui perjanjian yang formal dan aturan-aturan yang ketat, sebagaimana dianut oleh sistem perbankan modern.

Diskursus mengenai basis sosial hukum selain mengungkapkan akar-akar kemasyarakatan hukum dan kelembagaan hukum yang ada, dapat juga menunjukkan adanya jarak yang semakin besar antara hukum sebagai perangkat norma-norma dengan substansi yang diaturnya. Suatu studi yang menarik dapat dipakai sebagai contoh keadaan yang demikian adalah penyelidikan yang dilakukan *Stewart Macaulay*³⁵ mengenai hukum kontrak dan pelaksanaannya. Menurutnya, bahwa pelaksanaan hukum kontrak itu tidak semata-mata tunduk atau mengikuti persetujuan yang telah dibuat secara formal, melainkan juga ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan yang lebih alamiah sifatnya.

Dengan sifat-sifat alamiah ini, terdapat pertimbangan untung rugi, prestise, hubungan-hubungan kepercayaan dalam dunia bisnis. Semakin melembaga secara formal pranata hukum itu semakin jauh pula jaraknya dari masalah sosial yang diaturnya. Dalam hubungan ini orang

35. Lihat, Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986, hlm.33.

juga menggunakan ungkapan yang menunjukkan adanya jarak antara yang formal dan yang sosial itu dengan ungkapan kerangka luar masyarakat (*outer framework*) berhadapan dengan tertib alamiah masyarakat (*inner order society*). Suatu sistem hukum terdiri dari berbagai proses formal, yang melahirkan lembaga-lembaga formal, bersama-sama dengan proses-proses informal dalam di sekelilingnya.³⁶

Mengenai peranan kelembagaan informal dalam hukum, Vinogradoff dan Bohanan,³⁷ telah memperlihatkan peranan kebiasaan yang mereka tunjuk sebagai sumber yang kemudian melahirkan norma-norma hukum. Keadaan yang ideal tercapai apabila hukum dan kelembagaan informal itu berada dalam keseimbangan yang sempurna (*perfect phase*). Akan tetapi, dilema yang selalu akan dihadapi dalam masalah ini adalah bahwa di satu pihak hukum itu senantiasa tidak berada dalam keseimbangan dengan masyarakat, sedangkan di lain pihak masyarakat senantiasa meniadakan jarak yang menyebabkan tiadanya keseimbangan tersebut.

Oleh sebab itu, sekalipun dikatakan bahwa ia timbul dari kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dari hubungan-hubungan dan keadaan alamiah yang alamiah sifatnya, akan

36. Lihat, Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm.119.

37. Satjipto Rahardjo, *op cit*, hlm.34.

tetapi sejak diangkat menjadi hukum maka ia akan menempuh jalannya sendiri.

Interaksi antara hukum dan masyarakat atau kelembagaan informal itu akan senantiasa membayangi bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Oleh Bohanan³⁸ interaksi itu dikatakannya: "Kebiasaan-kebiasaan itu harus tumbuh untuk akhirnya dapat sesuai dengan hukum, atau harus secara aktif menolaknya; hukum harus tumbuh untuk akhirnya sesuai dengan kebiasaan, atau ia harus mengingkarinya atau menolaknya".

Sebagaimana penyelidikan yang dilakukan oleh Stewart Macaulay,³⁹ telah mengungkapkan praktik-praktik dibidang hukum perdagangan, yang sedikit menjelaskan tentang batas-batas penggunaan hukum. Studi Macaulay tersebut adalah tentang kebiasaan penggunaan kontrak-kontrak di kalangan-kalangan pedagang yang menggunakan praktik-praktik *non kontraktual* telah merupakan suatu kebiasaan.

Dalam konteks ini, praktik-praktik rentenir pun di Kartasura telah memperlihatkan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Transaksi-transaksi yang dibuat, antara rentenir dan para calon nasabah yang terdiri pedagang-pedagang kecil dan para bakul tidak dibuat secara terperinci, karena hal ini justru akan menghambat

38. *Ibid.*

39. *Ibid.*, hlm.124.

terciptanya hubungan yang baik diantara mereka. Sekali-pun para pihak, yakni rentenir dan nasabah berhasil untuk memformulasikan segala akibat yang mungkin timbul dari transaksi mereka di kemudian hari, mereka tetap akan mengusahakan agar masing-masing mengetahui apa yang menjadi kewajiban utama mereka.

Kebiasaan-kebiasaan yang telah diterima diantara mereka dalam transaksi tersebut, seperti misalnya hanya dengan bentuk kepercayaan rentenir terhadap nasabah, memudahkan penanganan persoalan-persoalan yang timbul secara non kontraktual tersebut. Oleh karena itu, persetujuan transaksi berdasarkan hukum, sebagaimana terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,⁴⁰ sering dikesampingkan oleh karena terdapat banyak sanksi-sanksi bukan hukum yang efektif. Sanksi-sanksi tersebut misalnya apabila seorang nasabah, ternyata tidak mampu membayar angsurannya sebagaimana disepakati bersama, maka rentenir akan mengambil barang-barang nasabah yang memiliki nilai tertentu untuk disita, meskipun sebelumnya tidak di perjanjikan secara lisan.⁴¹

40. Lihat, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm.305.

41. Wawancara dengan Titik Melawati, yang dilaksanakan tanggal, 8 Oktober 1996.

Norma yang diterima secara luas, adalah bahwa dalam keadaan bagaimanapun ikatan antara rentenir dengan nasabah yang telah dibuat haruslah dihormati. Sanksi yang bukan hukum adalah bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut berkeinginan untuk mempertahankan kelanggengan hubungan, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang mungkin mengganggu hubungan sosial mereka.

Dalam realitas empirik, justru mekanisme transaksi yang dibuat kedua belak pihak ternyata lebih berperan dibandingkan dengan apa yang dapat dilakukan oleh hukum. Ataupun apabila pada suatu ketika antara rentenir dan nasabah menyandarkan diri kepada penggunaan sarana hukum formal, seperti transaksi sebagaimana diatur dalam hukum positif, maka pertimbangan yang mendasarinya bukanlah murni hukum, melainkan kepentingan-kepentingan pribadi juga. Hubungan-hubungan antara rentenir dan para nasabahnya, sebagaimana terjadi di Kartasura pada dasarnya motor penggerakannya adalah kehendak bebas masing-masing orang. Oleh karena itu, keterbatasan hukum dalam menjalankan fungsi pengaturannya turut ditentukan oleh kemerdekaan yang diberikan kepada masing-masing orang.

E. Aspek Sosial Budaya Pelepas Uang

Dikalangan masyarakat desa yang bernaung dibawah kebudayaan Jawa, utang merupakan perilaku sosial yang berkonotasi negatif dan bahkan cenderung tabu untuk dibicarakan. Para warga masyarakat menganggap bahwa

utang merupakan kondisi yang menunjukkan ketidakmampuan finansial seseorang dalam waktu tertentu dan bahkan sering dikaitkan dengan status sosialnya.⁴²

Hubungan antara pelepas uang dengan nasabah bersifat kompleks, kadang-kadang tidak hanya menunjukkan transaksi ekonomi semata, akan tetapi juga melibatkan aspek sosial budaya,⁴³ termasuk didalamnya akan senantiasa membayangi bekerjanya hukum.⁴⁴ Dengan demikian, analisis yang dipergunakan tidak dapat hanya bersifat ekonomi semata, akan tetapi menggunakan analisis *interlinked transactions*. Eksistensi pelepas uang di Kartasura, tidak dapat dilihat hanya dengan sebelah mata tetapi melibatkan berbagai cara pandang, yakni cara pandang yang menggunakan kombinasi antara ekonomi dan non ekonomi. Dalam kasus pelepas uang tersebut, transaksi yang berlangsung juga melibatkan apa yang oleh *Max Weber* disebut sebagai *reprocity ethics* atau oleh *Polanyi* disebut masih ada

42. Lihat, Jennifer Helen Alexander, *Batas Minimum Kredit untuk Pedagang Kecil*, dalam *Prisma*, Nomor 7, Juli 1987, LP3ES, Jakarta, hlm.49-60.

43. Lihat, Soedjito Sosrodihardjo, *Aspek Sosial Budaya Dalam Pembangunan Pedesaan*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1987, hlm. 67-70.

44. Lihat, Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986, hlm.34.

pengaruh *embedded economies*.⁴⁵

Sebuah penelitian⁴⁶ di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, memperlihatkan bahwa pemerintah menggelar berbagai kredit dengan bunga murah, yakni 1,5 persen per bulan, melalui institusi finansial formal seperti *Bank Pasar*, *Bank Rakyat Indonesia*, *Bank Perkreditan Rakyat*, *Koperasi* dan lain-lain. Akan tetapi pelepas uang yang menarik bunga lebih tinggi, yakni kurang lebih 20 persen per paket kredit, tetap saja atraktif dan menarik banyak nasabah. Alasan mengapa kredit rentenir lebih atraktif bukan semata-mata prosedur arogansi administratif lembaga finansial formal terhadap orang-orang lapis bawah, tetapi terletak pada persoalan budaya ekonomi masyarakat. Perilaku ekonomi rentenir berkaitan dengan budaya lokal. Dalam praktik mereka selalu membangun citra diri lewat penguatan kapital budaya (*cultural capital*), seperti menolong nasabah yang susah, bersifat dermawan, menyumbang aktivitas keagamaan, bahkan ada yang naik haji.

Semakin tinggi kapital budaya yang dimiliki oleh rentenir maka citranya semakin baik, sehingga praktik-

45. Lihat, Karl Polanyi, *The Great Transformation*, New York: Rinehart & Company, 1944.

46. Lihat Heru Nugroho, *Praktek Rentenir dan Ekspansi Pasar*, dalam Kompas, Nomor 013 Tahun Ke-32, 10 Juli 1996, hlm.4.

praktiknya tidak banyak terusik oleh citra buruk warisan tradisi. Biaya-biaya sosial untuk peningkatan kapital budaya dihitung secara rasional sebagai biaya ekonomi dalam menopang praktiknya. Semakin tinggi kapital budaya yang dimiliki rentenir berkorelasi positif dengan kapital ekonomi atau luas skala usahanya. Akibatnya, paket-paket kredit seperti kredit *rolasan* (dua belas hari), *patlikuran* (duapuluh empat hari), *telungpuluhan* (bulanan), *sewidakkan* (dua bulanan), dan setahunan yang ditawarkan pelepas uang laku keras ibarat komoditi *Mc Donald* di kota-kota besar.

Warga masyarakat yang bermaksud mencari pinjaman uang, selalu melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui oleh orang lain, terutama tetangganya. Dengan keadaan sosial budaya seperti itu, utang merupakan kondisi yang dihindari dan seolah-olah merupakan kontrol sosial bagi warga masyarakat agar tidak berhutang. Akan tetapi, kenyataannya adalah sebaliknya, transaksi utang piutang terjadi di Kartasura dan transaksi tersebut dilayani oleh pelepas uang (rentenir). Saat ini, sistem kredit itu berkembang pesat sejalan dengan berkembangnya ekonomi pedesaan.

Di berbagai negara sedang berkembang, institusi finansial cenderung tersegmentasi ke dalam dua sub, yakni

institusi finansial formal dan informal.⁴⁷ Institusi finansial formal memberikan fasilitas kredit dan deposit dibawah kontrol bank sentral dengan mendasarkan diri pada regulasi perbankan. Sedangkan institusi finansial informal memberikan fasilitas kredit dan deposit dengan prosedur yang sederhana dan tidak dikelola berdasarkan regulasi perbankan.

Aktivitas institusi finansial formal secara *typical* meliputi pinjaman dan deposit dengan jumlah besar, memakai agunan pasti, jangka waktu panjang dan menggunakan *legal backing*. Sementara institusi finansial informal secara kontras berbeda, yakni meliputi pinjaman jangka pendek dan beroperasi di bawah bayang-bayang institusi finansial formal.

Mayoritas masyarakat dapat menganggap, dan hal ini merupakan opini publik, bahwa profesi pelepas uang (rentenir) berkonotasi negatif. Akan tetapi, seorang pelepas juga dapat menginterpretasikan profesinya yang barangkali tidak sesuai dengan kebanyakan opini masyarakat.⁴⁸ Menurut pengertian orang-orang yang

47. Hans-Dieter Seibel dan B.p. Shresta, *Dhikutis: The Small Businessman's Informal Self Help Bank in Nepal*, Milan: Finafrica, 1988, hlm.183.

48. Lihat, Heru Nugroho dan Vidhyandika Moeljarto, *Debitur Potensial di Pedesaan, Kasus Penerimaan Masyarakat terhadap Aktivitas Pelepas Uang*, dalam Prisma Nomor, 9 tahun 1994, LP3ES, Jakarta, hlm.64.

bekerja di sektor ini, profesi pelepas uang bukanlah profesi yang tercela. Profesi ini sama dengan profesi lainnya dalam penyediaan jasa dalam masyarakat. Hanya saja menurut mereka bentuk usahanya saja yang berbeda, meskipun secara jujur mereka mengakui bahwa konotasi negatif terhadap profesinya merupakan beban yang berat.

Pengamatan empirik memperlihatkan, bahwa pada umumnya para rentenir tidak begitu memahami tafsir agama. Dari empat rentenir yang beroperasi di Kartasura, semua beragama Islam, akan tetapi agama Islam yang mereka peluk termasuk "abangan",⁴⁹ sebagaimana kategori yang dibuat Clifford Geertz. Mereka hanya berasumsi bahwa dianggap tercela dan berdosa manakala dalam menarik bunga melakukannya secara berlebih-lebihan, sehingga para nasabah kehidupannya menjadi sulit. Sepanjang nasabah mampu membayar angsurannya setiap hari dan merasa tidak terbebani oleh bunga tersebut maka hukum pasar yang berlaku. Para rentenir juga berargumentasi, meskipun profesinya sering dikecam oleh sebagian besar masyarakat, tetapi ia tidak keterlaluan dalam menekan para nasabah. Menurut mereka, nasabah juga diberi kelonggaran untuk

49. Lihat, Clifford Geertz, *Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1989, terutama halaman, 172 - 178. Bandingkan dengan hasil penelitian, Irwan Abdullah, *The Muslim Businessmen of Jatinom, Religious Reform and Economic Modernization in a Central Javanese town*, Universiteit Van Amsterdam, 1994, terutama halaman 1-7.

memilih sistem kredit mana yang akan diambil sesuai dengan kemampuannya.

Para nasabah pada umumnya adalah pedagang, baik pedagang eceran maupun para bakul yang mangkal di sekitar Terminal Bus dan di dekat pasar Kartasura. Satu ciri yang menonjol dari pasar adalah banyaknya pedagang yang menjual jenis barang dan jasa yang sama. Hal lain yang menonjol adalah perbedaan dalam skala usaha meskipun pada dasarnya siapa saja dapat menjadi pedagang kecil menjual beberapa bungkus rokok atau beberapa ikat sayuran. Akan tetapi, kebanyakan para pedagang kecil dan para bakul di Kartasura modal yang diperlukan untuk menghidupkan usaha tersebut merupakan halangan besar. Masing-masing pedagang menjalankan usaha dan mengadakan persediaan barang sendiri-sendiri. Meskipun ada diantaranya yang sama-sama menempati kios di pasar dan kios di terminal bus, akan tetapi dalam usaha mereka selalu tidak saling menggantungkan diri.

Masyarakat Jawa, membedakan dua golongan pedagang.⁵⁰ Pertama, pedagang *bakul*, pada umumnya wanita yang berjualan secara borongan atau eceran berbagai macam hasil bumi dan barang-barang buatan pabrik, dan yang kegiatan berdagangnya berpusat di pasar. Kedua, adalah *juragan*,

50. Lihat, Jennifer Helen Alexander, *Batas Minimum Kredit untuk Pedagang Kecil*, dalam Prisma, Nomor 7, Juli 1987, LP3ES, Jakarta, hlm.51.

kebanyakan pria, pada umumnya berjualan hasil bumi dan barang-barang buatan setempat, yang usahanya dilakukan di depot-depot.

Para pedagang yang ingin memperbesar modalnya, hampir selalu mencari pinjaman kredit untuk maksud tersebut. Secara umum mereka dapat memilih dua sumber: badan perkreditan formal seperti Bank Rakyat Indonesia, Badan Kredit Kecamatan dan Badan Kredit Desa, dan perkreditan informal seperti pelepas uang (rentenir).

Salah satu sebab dari rendahnya pemanfaatan fasilitas perkreditan formal di Kartasura, meskipun pinjaman realtif cepat dan mudah di dapat, akan tetapi menurut para pedagang dan bakul memperlihatkan hubungan birokratis. Disamping itu, persyaratan angsurannya dirasakan ketat, dan ada sebagian yang tidak dapat memenuhi jadwal angsuran, walaupun untuk pinjaman yang kecil. Para pedagang dan bakul biasanya berdalih, untuk lebih memanfaatkan kredit informal atau rentenir, karena lebih suka berurusan dengan wanita, sebab jika mereka sedang tidak memiliki uang, angsuran dapat ditangguhkan.

Meskipun hampir para pedagang dan bakul memperoleh kredit dari pemasok langganan mereka, tidak semua mendapatkannya dengan persyaratan yang sama, karena pinjaman itu menentukan besar dan ragam modal si pedagang, sehingga bentuk kredit yang diperoleh merupakan kendala penting dalam menentukan strategi pemasaran dan pendapatan pedagang yang bersangkutan.

Pada umumnya kredit yang dipergunakan pedagang yang realtif besar biasanya dipergunakan untuk memperluas usahanya, akan tetapi bagi para bakul selain untuk meluaskan usahanya juga dipakai untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Pedagang besar pada umumnya mengembalikan kredit tersebut dalam jangka waktu yang relatif pendek daripada para bakul. Selain itu, kredit bagi para bakul sangatlah berarti, dalam upaya untuk memperluas usahanya.

Pada saat ada kebutuhan yang sangat mendesak dengan keuangan rumah tangga, pedagang kecil terpaksa *nyebrak*⁵¹ atau mencari utang, maka rentenir itulah yang dijadikan tumpuan sebagai sumber finansial. Pedagang-pedagang kecil dan para bakul yang memiliki aktivitas usaha tetap di Kartasura, secara empiris dibantu oleh suatu jaringan-jaringan rentenir yang memberikan pinjaman efisien, cepat bagi mereka yang mampu memanfaatkannya secara efektif. Analisis tentang hubungan rentenir dengan nasabah bukan hanya dilihat dari aspek hukum dan ekonomi semata-mata, akan tetapi juga tercipta hubungan sosial, seperti membantu bagi nasabah yang mengalami kesusahan dalam peristiwa *tetulung layat*⁵² pada saat ada

51. Lihat, Heru Nugroho dan Vidhyanduka Moeljarto, *op cit*, hlm.65.

52. Lihat, Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hlm.60.

kematian atau "menyumbang", bagi orang yang tengah memiliki hajatan. Inilah salah satu kiat dan kepiawaian seorang rentenir, yang memainkan peran dan memasuki diluar wilayah ekonomi sebagai strategi untuk melanggengkan hubungan dengan para nasabah.

F. Pelepas Uang dan Perkembangan Ekonomi

Selain citra buruk yang dimilikinya, harus diakui bahwa pelepas uang informal memiliki kontribusi dalam perkembangan ekonomi masyarakat. Ekspansi pasar yang ditandai dengan monetisasi, komersialisasi dan semakin terintegrasinya perekonomian lokal-nasional-global mengakibatkan timbulnya kelangkaan uang tunai, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya *subsistensi*.

Eksistensi pelepas uang di pedesaan tidak dapat dilihat hanya dengan sebelah mata tetapi melibatkan berbagai cara pandang, yakni cara pandang yang menggunakan kombinasi antara ekonomi dan non ekonomi. Cara pandang seperti ini agaknya sangat relevan untuk menganalisis kondisi masyarakat *transisional*, artinya masyarakat yang sedang mengalami perubahan nilai dari sistem pertanian tradisional yang berorientasi pada *subsistensi* menuju masyarakat yang berorientasi pada pasar.

Ketidaksiapan institusi finansial formal menghadapi aktivitas rentenir baik yang terang-terangan maupun terselubung berakibat pada semakin menjamurnya praktik-praktik pelepas uang sebagai sebuah titik keseimbangan

antara kelangkaan dan kebutuhan uang tunai.

Bagi kelompok masyarakat yang mengalami kelangkaan uang tunai, seperti pada masyarakat di lokasi penelitian akan sulit terlibat dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi. Oleh karena itu, pada tataran tertentu pelepas uang informal mengambil alih bank-bank resmi. Hasil pengamatan empiris serta berdasarkan informasi kualitatif masyarakat yang termasuk stratifikasi kelas bawah, ternyata tidak memiliki akses kredit ke bank, seperti pedagang kecil, buruh merupakan sumber kredit konsumsi. Sedang bagi pedagang-pedagang menengah dan besar rentenir dijadikan sasaran kredit cepat dengan prosedur mudah⁵³ bagi tambahan usahanya, selain juga mereka memanfaatkan jasa kredit bank-bank resmi.

Sementara itu, perkreditan formal ternyata dalam memberikan pinjamannya menggunakan prinsip-prinsip perbankan, kurang fleksibel, prosedur administrasi yang berbelit-belit, penggunaan dana yang diawasi secara ketat dan memerlukan waktu lama untuk menunggu cairnya kredit.

Masyarakat pedesaan itu sendiri tidak terbiasa dengan budaya administrasi, sehingga merasa enggan apabila harus mengurus prosedur administrasi yang rumit, yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Dengan

53. Bandingkan dengan apa yang dinarasikan oleh Ng. Beoy Kui dalam *Some Aspects of the Informal Financial Sector in the SEACEN Countries*, The SEACEN Research and Training Centre, 1985, Staff Paper No. 10, hlm.23.

tingkat penghasilan mereka, kadang-kadang memerlukan pinjaman dalam waktu cepat untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Dalam situasi seperti itu, mereka terpaksa meminjam pada sumber kredit informal, yang biasanya melayani pinjaman kapan saja, dimana saja, dan berapa saja yang diminta peminjam. Sementara kredit pemerintah yang ditawarkan kadang terancam gagal mencapai target karena pelepas uang dengan bunga relatif tinggi lebih populer dari pada kredit resmi.

6. Sikap Masyarakat Terhadap Perkreditan Formal dan Informal

1. Pada Lembaga Formal (Bank Rakyat Indonesia)

Masyarakat Kartasura pada umumnya mengetahui secara pasti bahwa ada lembaga pemerintah/formal, dalam hubungan ini adalah Bank Rakyat Indonesia, yang dapat melayani simpan pinjam masyarakat. Akan tetapi untuk memanfaatkan jasa lembaga ini, masih dikeluhkan adanya prosedur yang sulit, adanya jaminan seperti sertifikat tanah, bagi mereka yang pinjam di lembaga perbankan. Hal tersebut dapat dimengerti, mengingat pendidikan mereka pada umumnya rendah. Seorang bakul mengatakan bahwa ia enggan pinjam di Bank Rakyat Indonesia, karena ia tidak memiliki jaminan sebagai persyaratan untuk meminjam di bank tersebut.

Disamping itu, adanya potongan-potongan dan juga pencairan kredit yang lama membuat mereka enggan meminjam di bank. Alasan lain yang dikemukakan oleh mereka yang tidak meminjam adalah bahwa mereka pada dasarnya tidak membutuhkan uang dalam jumlah yang banyak, sehingga terlalu berat bagi mereka untuk pinjam bank. Sementara untuk memenuhi kebutuhan tersebut pelepas uang informal (rentenir) dinilai telah mencukupi. Jumlah uang yang dapat dipinjam pada rentenir sesuai dengan yang dibutuhkannya, sedangkan keuntungan lain adalah bahwa pinjamannya tanpa menggunakan jaminan.

2. Pada Badan Kredit Kecamatan dan Badan Kredit Desa

Lembaga yang didirikan oleh Pemerintah Jawa Tengah tahun 1970 ini dikalangan pengusaha industri kecil, pedagang dan para bakul di Kartasura telah dikenal cukup lama. Bahkan sampai bulan Oktober 1996, menurut catatan laporan perkembangan Badan Kredit Kecamatan Kartasura, jumlah anggota mulai tahun 1971 sampai dengan 1996, berjumlah 425 orang,⁵⁴ akan tetapi sebagian besar nasabah tersebut sudah tidak lagi menggunakan fasilitas kredit tersebut. Disamping itu, selain Badan Kredit Kecamatan, di kenal juga Badan Kredit Desa. Prosedur

54. Data Laporan Perkembangan Badan Kredit Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, tahun 1971 s/d 1996.

peminjaman di lembaga ini dinilai mudah, yakni cukup memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta dengan membawa surat rekomendasi dari Lurah setempat.

Sementara itu, pelayanan di Badan Kredit Desa Kartasura cukup baik, dan yang lebih penting bagi mereka adalah tanpa jaminan. Meskipun persyaratan meminjam uang di Badan Kredit Desa relatif mudah, akan tetapi pada kenyataannya jumlah yang pinjam pada Badan Kredit Desa relatif sedikit. Menurut catatan sampai bulan Oktober 1996,⁵⁵ jumlah orang yang meminjam di Badan Kredit Desa sebanyak 19 orang, dengan dana pinjaman berkisar antara Rp 25.000 sampai dengan Rp 100.000.

Selain kedua lembaga diatas, lembaga lain yang tak kalah populer adalah *bank harian*, atau masyarakat Kartasura menyebutnya sebagai *bank plicit*. Meskipun bunga pinjaman pada lembaga ini cukup tinggi berkisar antara 15 persen sampai 20 persen per paket pinjaman. Bagi mereka yang penting adalah mereka dapat memperoleh kredit dengan cepat dan mudah, serta sesuai dengan kebutuhan. Dalam kenyataannya *bank plicit* tampaknya memang menawarkan kemudahan-kemudahan bagi calon nasabah dan nasabahnya. Lembaga tersebut biasanya mendatangi dari rumah ke rumah maupun para pedagang dan bakul yang berjualan di pasar tempat usahanya, untuk menawarkan

55. Wawancara dengan Titik Melawati, petugas Badan Kredit Desa, Kartasura, tanggal 10 Oktober 1996.

kredit. Selain pencairannya cepat, yakni pada saat debitur mengajukan kredit sekaligus dananya cair, dan bagi mereka yang belum lunas pembayarannya tetapi hanya kurang 3 sampai dengan 4 kali angsuran, mereka dapat langsung pinjam untuk kemudian melunasi kekurangannya.

Seorang penjual buah-buahan yang menjajakan dagangannya tepat di muka pasar Kartasura, berkali-kali ditawarkan kredit bank *plecit*, tetapi selalu menolak. Ia memberikan alasan tidak meminjam pada lembaga tersebut disebabkan merasa berat dengan cara angsuran yang terlalu pendek. Pinjam hari ini esok sudah harus mengangsur, sementara usahanya belum sempat berputar. Disamping itu, didatangi setiap hari untuk ditagih hutangnya, merasa tidak tenang sehingga memilih tidak pinjam.

3. Pada Kredit Informal (Rentenir)

Rentenir, dimana-mana mendapat citra buruk sebagai lintah darat yang dianggap sangat memeras peminjam. Akan tetapi, benarkah mereka berperilaku demikian. Rentenir timbul atau ada karena berbagai sebab yang tidak dapat dilihat hanya dari satu perspektif. Banyak faktor seperti lembaga perkreditan formal yang ada, budaya, kebiasaan masyarakat dan lain-lain yang berpengaruh terhadap keberadaan rentenir. Prosedur yang birokratis serta berbelit-belit bagi masyarakat yang akan mengajukan kredit kepada lembaga perkreditan formal menjadi sebab utama bagi masyarakat di Kartasura enggan untuk meminjam

kepada lembaga kredit tersebut. Hal ini berbeda dengan sepak terjang rentenir yang tahu persis kebutuhan masyarakat pedagang dan para bakul, sehingga ia lebih banyak diminati. J.H. Boeke, melukiskan aktivitas tukang kredit sebagai berikut:⁵⁶

"Salah apabila menganggap para peminjam pedesaan sebagai korban dari gerombolan pemakan riba. Hal ini merupakan pertanyaan dimana meletakkan garis pemisah, antara kompensasi yang dibenarkan nalar untuk jasa yang diberikan, dengan riba; dan jelas tidak akan adil untuk mencap para tukang kredit sebagai kelas pemakan riba. Tetapi masih pula tidak adil, untuk melukiskan para peminjam sebagai kawan-korban tidak berdosa. Karena mereka terlampau gemar meminjam".

Kredit informal atau rentenir di Kartasura, meskipun telah tersaingi oleh kehadiran dan sepak terjang bank harian atau bank plecit, akan tetapi rentenir tetap eksis di hati masyarakat, hal ini disebabkan karena kepiawaian seorang rentenir dalam menawarkan jasa kreditnya. Walaupun rentenir ini telah dikenal relatif lama dibanding bank harian dan tingkat bunganya sangat tinggi, ia tetap diminati masyarakat Kartasura.

Darmi seorang pedagang yang membuka warungnya di rumah, menuturkan bahwa ia sering dimaki-maki, bahkan kadang-kadang "padu" atau bertengkar dengan seorang rentenir, disebabkan karena pernah "ngemplang" atau tidak

56. J.H. Boeke, *op cit*, hlm.120.

mengangsur beberapa hari. Akan tetapi, ia tidak pernah "jera", dan selalu saja meminjam uang kepada seorang rentenir. Mereka yang meminjam kepada rentenir menyatakan tidak ada alternatif lain yang dapat dipinjami, disamping jangka waktu angsuran yang lebih lama. Sementara itu, apabila mereka akan mengajukan kredit ke bank misalnya, ia tidak memiliki barang sebagai jaminan hutangnya, disamping cairnya dana relatif cukup lama.

Tidak ada catatan resmi berapa jumlah rentenir yang ada di Kartasura, akan tetapi sejauh pengamatan empirik jumlah rentenir yang tercatat sebanyak 4 orang, dan pada umumnya dilakukan oleh wanita, hanya satu orang rentenir dalam omset jutaan rupiah yang berkelamin laki-laki. Bagi rentenir yang beromset jutaan ini, profesi sebagai pelepas uang bukanlah pekerjaan pokok, karena disamping membuka toko yang cukup besar, juga sebagai agen sejumlah media massa cetak. Tidak setiap orang dapat mengajukan pinjaman uang secara langsung kepada rentenir yang di Kartasura termasuk kaya raya ini. Bagi tetangganya yang akan pinjam uang, biasanya melalui perantara orang lain yang dianggap telah dipercaya oleh rentenir tersebut. Artinya, tidak setiap orang dapat memasuki wilayah profesinya, hanya sekedar akan meminjam uang, karena ia merasa malu sebagai rentenir, meski hampir semua orang tahu atas pekerjaan sebagai orang yang

mengedarkan "uang panas" tersebut. Menurut *Muslih*,⁵⁷ seorang tokoh masyarakat di Kartasura, ia seorang rentenir yang *piawai*, nasabahnya adalah orang-orang kaya, termasuk pemilik sejumlah toko kelontong yang membutuhkan uang tunai secara mendesak, yang tidak mungkin dilayani oleh institusi finansial formal. Suku bunga yang ditentukan oleh rentenir tersebut berkisar antara 20 persen sampai 25 persen per paket pinjaman.

Diantara rentenir tersebut pesaingan tidak tampak, hal ini disebabkan karena mereka telah memiliki segmen dan langganan masing-masing. Mobilitas mereka tetap tinggi, meskipun citra rentenir di kalangan mereka tidak baik (*jahat dan tegaan*). Mereka menerapkan bunga yang tinggi, 20 persen per paket pinjaman, dalam istilah masyarakat Kartasura adalah "*ngrolasi*", disamping "*tega*" menyita barang apabila nasabah tidak mampu membayar.

Menurut *Suyono*,⁵⁸ Kepala Urusan Pemerintahan Kelurahan, aktivitas rentenir di Kartasura cukup tinggi, hal ini secara empirik memperlihatkan, bahwa pelepas uang tersebut tampaknya memang diminati masyarakat karena *keluwesannya* dalam menawarkan jasanya. Secara ekstrim

57. Wawancara secara mendalam dengan tokoh masyarakat yang bekerja sebagai guru dan sekaligus tokoh agama ini, dilaksanakan pada tanggal, 3 Oktober 1996.

58. Wawancara mendalam yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 1996.

Suyono menjelaskan ketidaksetujuannya atas aktivitas rentenir di Kartasura, karena menurutnya memang sangat merugikan masyarakat, dengan mematok bunga yang sangat tinggi. Akan tetapi, secara pribadi ia tidak dapat berbuat apa-apa, karena perjanjian kredit yang dibuat secara lisan tersebut oleh peminjam dan rentenir didasarkan atas kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari siapapun juga. Lebih jauh Suyono menuturkan, ia merasa pesimis rentenir dapat dihapuskan dari aktivitas perdagangan di Kartasura, karena masyarakat pedagang kecil dan para bakul lebih suka memanfaatkan jasa rentenir tersebut, dari pada lembaga kredit formal.

H. Analisis Lembaga Perkreditan

Kebutuhan akan uang tunai bagi masyarakat pedesaan tampaknya selalu akan muncul, sebagaimana juga kebutuhan akan uang tunai dalam masyarakat yang lain. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan uang tunai masyarakat miskin itu menaruh banyak perhatian dengan program pengembangan kredit bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Akan tetapi, program pengembangan kredit untuk kelompok berpenghasilan rendah belum dapat berkembang seperti yang diharapkan. Model kredit yang dikembangkan oleh Badan Kredit Kecamatan dan Badan Kredit Desa, telah mencoba melakukan terobosan dengan mengembangkan model perkreditan untuk masyarakat pedesaan tanpa adanya syarat jaminan apapun juga dan dengan prosedur yang

dibuat sesederhana mungkin.

Diharapkan dengan model tersebut dapat menjadi alternatif lain bagi masyarakat pedesaan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai, sehingga tidak jatuh ke tangan ke lembaga kredit informal yang memberatkan. Permasalahan yang paling substansial adalah, mengapa perkreditan informal atau rentenir yang ada masih tetap melakukan aktivitasnya dengan lancar, walaupun mematok bunga yang relatif tinggi, sementara lembaga dan formal yang di sponsori pemerintah mencoba mendekati model perkreditan informal.

Dari segi pelayanan dan persyaratan yang harus dipenuhi, Badan Kredit Kecamatan dan Badan Kredit Desa sudah mulai mengarah kepada keinginan masyarakat pedesaan. Model perkreditan yang dilaksanakan sudah cukup memenuhi kriteria yang dituntut masyarakat yakni mudah, meski ada aspek birokratisnya. Akan tetapi, pelepas uang informal atau rentenir masih juga lebih akrab dapat merakyat dan akrab dengan warga masyarakat pedesaan berpendapatan rendah.

Pemenuhan kebutuhan uang tunai bagi pedagang-pedagang kecil dan para bakul di Kartasura, memang lebih suka dilayani oleh rentenir, yang pelayanannya sangatlah mudah. Disamping itu, hutang kepada rentenir biasanya tidak diketahui oleh orang lain. Hal ini mengindikasikan bahwa ada perasaan malu apabila diketahui berhutang. Dalam hubungan ini memperlihatkan makna simbolik bahwa

hutang merupakan masalah pribadi yang tidak perlu diketahui orang lain, apalagi dibuat secara resmi dengan perjanjian. Datang ke Kantor Kelurahan untuk mendapatkan rekomendasi berhutang ke Badan Kredit Kecamatan atau ke Badan Kredit Desa menjadi cukup memberatkan, sekalipun prosedurnya amat mudah. Apalagi setelah itu, mereka harus ke Kantor Badan Kredit Kecamatan untuk mengajukan kreditnya.

Dalam konteks hutang, perlu kiranya pendapat J.H. Boeke tentang amat pribadinya masalah hutang bagi masyarakat Jawa:⁵⁹

"Pegadaian tidak ingin mengetahui apa pun tentang keadaan peminjam; benar-benar pasif, menunggunya dibelakang dinding bertirai besi dari rumah gadai; bahkan tidak mencoba mengadakan penyidikan terhadap peminjam; benar-benar pasif, tetapi mempersilahkan-nya menghilang dalam gelap. Bagi peminjam, rumah gadai memberi kesempatan untuk mengambil jumlah kecil tanpa mengalami pemeriksaan sebelumnya, dan ini berlangsung setiap saat. Bahwa bunganya tinggi tidak merugikannya, karena ia terbiasa dengan itu dan menganggapnya serasi, sebab pinjaman sedikit dan jangka pembayaran kembali pendek".

Oleh karena kredit yang diperoleh merupakan kekayaan yang sifatnya pribadi, maka tidak pernah ditanyakan tentang penggunaan kredit oleh pelepas uang tidak resmi. Sebab tanggung jawab penggunaan uang atas hasil hutangnya semuanya ada pada diri pemiliknya secara penuh.

59. J.H.Boeke, *loc cit*, hlm. 121.

Penggunaan uang atas dasar hutang dari pelepas uang informal atau rentenir tidak menjadi persoalan dari pemberi kredit. Hasil pengamatan empiris di Kartasura, secara kualitatif memperlihatkan bahwa kredit yang diperoleh para pedagang kecil-kecilan dan para bakul, disamping untuk kelangsungan dagangannya, juga untuk keperluan konsumsi sehari-hari. Hal ini terpaksa dilakukan karena peminjam memang benar-benar membutuhkan untuk jenis pemenuhan kebutuhan konsumsi. Akan tetapi tunggakan yang terjadi tidak begitu mencolok, mengingat para pedagang dan para bakul takut bila di maki-maki oleh rentenir.

Hal ini justru terjadi sebaliknya pada Badan Kredit Kecamatan di Kartasura, yang secara ketat mengarahkan penggunaan kredit untuk kepentingan produktif seperti untuk kegiatan perdagangan. Menurut data dalam tahun 1993 misalnya, persentase tunggakan merah di Badan Kredit Kecamatan Kartasura sebesar 19 persen, sementara itu tahun 1994 tunggakan merah mencapai 18,5 persen dan tahun 1995 sebesar 17 persen.⁶⁰

Kekurangan modal yang dialami masyarakat berpenghasilan rendah seperti di lokasi penelitian, membuat mereka tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan. Dalam keadaan

60. Diperoleh dari data perkembangan Badan Kredit Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, tahun 1993 sampai dengan 1995.

seperti itu, maka sikap minder akan muncul manakala berhadapan dengan lembaga-lembaga yang resmi seperti dunia perbankan. Statusnya yang lemah secara ekonomis menyebabkan pula lemahnya status di masyarakat apabila berhadapan dengan lembaga/kelompok dengan status ekonomi yang lebih kuat. Untuk datang ke kantor kredit, akan sangat dirasakan sebagai suatu beban, terutama beban status.

Oleh karena itu, pelayanan dari rumah ke rumah akan sangat membantu meringankan dan membebaskan beban status. Hal inilah merupakan *budaya* masyarakat di Kartasura yang enggan untuk berhubungan dengan lembaga-lembaga kredit formal, yang menurut mereka memiliki kecenderungan birokratis. Makna simbolik yang demikian itu perlu ditafsirkan secara arif dan bijaksana. Akan tetapi, makna hanya dapat "*disimpan*" dalam simbol.⁶¹ Bagi Geertz,⁶² kebudayaan adalah sesuatu hal *semiotik*, hal-hal yang berhubungan dengan *simbol* yang tersedia di depan umum dan dikenal oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Simbol adalah sesuatu yang perlu ditafsir maknanya dan pada giliran berikutnya dibagikan kepada

61. Lihat, Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hlm.51.

62. Lihat, Clifford Geertz, *Tafsir Kebudayaan*, dalam Sekapur Sirih, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1992, hlm.vii.

warga masyarakat.

Sebagai upaya untuk meringankan beban nasabah dan sekaligus menghilangkan kesan eksplotatif, maka pelepas uang atau rentenir menempuh cara penawaran dana yang mudah, tanpa prosedur administrasi serta memiliki penarikan yang khas, yakni model penarikan harian. Dengan cara penarikan harian yang dilakukan rentenir, secara empirik para nasabah mampu untuk melunasi hutangnya. Beban menjadi tidak terasa, karena mereka tidak harus datang ke kantor kredit untuk menyetor angsuran. Disamping itu, angsuran yang dilakukan setiap hari kepada rentenir sudah menjadi bagian kegiatan sehari-hari tanpa dipikir. Rutinitas itu telah menjadi kebiasaan hidup sehari-hari yang harus selalu dipenuhi. Rutinitas pada dasarnya akan menghilangkan kesempatan untuk berpikir dan mengadakan pertimbangan-pertimbangan. Menurut hasil penelitian *Bustami Rahman* misalnya, *sistem ijon* di pedesaan Jawa memang merata. Akan tetapi, tidak ada keluhan dari petani maupun Kela Desa, karena praktik *ijon* seperti itu dianggap sudah biasa dan disukai oleh petani sendiri.⁶³

63. *Bustami Rahman, Nilai Kultural dan Diferensiasi Agraria di Pedesaan Jawa*, Disertasi untuk memperoleh derajat Doktor dalam Ilmu Sosiologi pada Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1994, hlm.75, 76 (tidak diterbitkan).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian sebagaimana dipaparkan Bab I sampai dengan Bab IV, kesimpulan yang ditarik sebagai berikut:

1. Dalam realitas empirik memperlihatkan bahwa pelepas uang uang (rentenir) lebih bersifat atraktif dari pada institusi perkreditan formal seperti Bank Rakyat Indonesia, Badan Kredit Kecamatan dan Badan Kredit Desa. Pelepas uang beroperasi secara *Iuwes*, dan sering menjadikan hubungan bisnisnya bersifat personal dengan nasabah, sementara perkreditan formal karena tidak dikenal secara personal, maka kadang-kadang merupakan anonim bagi masyarakat.
2. Di lokasi penelitian terdapat dua karakteristik profil pelepas uang. *Pertama*, mereka yang terang-terangan melakukan aktivitasnya, dan memiliki segmen pasar terutama pedagang-pedagang kecil, para bakul di pasar dan di rumah-rumah penduduk. *Kedua*, mereka sembunyi-sembunyi dalam melakukan aktivitasnya, hanya orang-orang yang dikenal secara baik dan dapat dipercaya yang dapat dijadikan sebagai debitur. Nasabahnya terutama pedagang yang memiliki omset modal puluhan juta rupiah.

3. Meskipun di Kartasura, pemerintah juga menggelar berbagai kredit dengan bunga murah, yakni 1,5 persen sampai 2,5 persen, melalui institusi finansial formal, seperti Bank Rakyat Indonesia, Badan Kredit Kecamatan serta Badan Kredit Desa. Akan tetapi, pelepas uang yang menarik bunga lebih tinggi yakni kurang lebih 20 persen per paket kredit, tetap saja atraktif dan menarik banyak nasabah.
4. Aktivitas rentenir lebih atraktif bukan semata-mata pada kerumitan prosedur dan arogansi administratif lembaga finansial formal terhadap orang-orang lapis bawah, tetapi terletak pada persoalan budaya ekonomi masyarakat. Perilaku ekonomi rentenir berkaitan dengan budaya lokal. Dalam praktik mereka selalu membangun citra diri lewat penguatan kapital budaya (*cultural capital*), seperti menolong nasabah yang sedang susah dan menyumbang aktivitas keagamaan.
5. Dalam masyarakat transisi, suatu masyarakat yang tengah mengalami perubahan nilai, dari sistem pertanian tradisional yang berorientasi pada subsistensi, menuju masyarakat yang berorientasi pada pasar, maka kebutuhan akan uang tunai menjadi mendasak. Dalam masyarakat yang demikian itulah, peranan rentenir menjadi penting sebagai pemasok dana bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

6. Makin tinggi kapital budaya dimiliki rentenir, maka citranya semakin baik, sehingga praktik-praktiknya tidak banyak terusik oleh citra buruk warisan tradisi. Biaya sosial dalam rangka peningkatan kapital budaya dihitung secara rasional sebagai biaya ekonomi dalam menopang praktiknya. Semakin tinggi kapital budaya yang dimiliki berkorelasi positif dengan kapital ekonomi atau luas skala usahanya.
7. Ikatan batin yang dekat antara rentenir dengan nasabah membuat urusan mekanisme transaksi kredit menjadi sangat mudah dan cepat, serta angsurannya yang dirasakan tidak ketat. Meski bunga yang dibebankan kepada nasabah cukup tinggi, tetapi mereka membayar kredit itu sebagai kewajiban sosial mereka.
9. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, yang pada intinya bertujuan menekan praktik pelepas uang informal sehingga lapisan bawah tidak terjebak dalam jeratan *lintah darat*, akan profesi tersebut tetap beroperasi dalam masyarakat, tidak ada tanda-tanda surut dan bahkan dalam berbagai kondisi dan lingkungan berkembang sejalan dengan aktivitas ekonomi.

10. Adalah suatu pekerjaan yang sulit dalam menjawab secara *hitam putih*, apakah pelepas uang dengan berbagai aktivitasnya merupakan mahluk yang bersifat parasitis atau sebetulnya menguntungkan di bidang perkembangan ekonomi. Jawabannya adalah dua-duanya, disatu sisi menarik bunga tinggi, akan tetapi pada tingkat tertentu membantu ekspansi pasar dalam perkembangan ekonomi dalam masyarakat *transisi*, sebuah masyarakat yang tengah berubah dari perekonomian *subsistensi* menuju masyarakat yang berorientasi pada pasar.
11. Dari temuan di lapangan memperlihatkan, terdapat jaringan kerja antara bank-rentenir-nasabah. Ketidakmampuan bank-bank resmi menjangkau nasabah yang tidak memiliki agunan (*collateral*) dijembatani oleh rentenir. Dengan kata lain, seolah-olah ada kesepakatan dalam *sharing of risk* antara bank dan rentenir. Rentenir mengambil kredit dengan jumlah besar di sebuah bank (puluhan juta rupiah) kemudian diecerkan dalam bentuk paket-paket kecil (dari puluhan ribu, ratusan ribu hingga jutaan rupiah) pada nasabahnya. Temuan empirik ini merupakan sebuah bukti, bahwa pelepas uang informal juga memberikan andil dalam ekspansi pasar, terutama dalam mendorong proses monetisasi, komersialisasi dan konsumsi.

12. Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelepas uang, yakni *Geldscheiters Ordonantie*, tanggal 12 September 1938, S.1938 - 523 atau Undang-Undang Riba, yaitu *Woeker Ordonantie*, S.1938 - 524. Dalam *Geldscheiter Ordonantie* tahun 1938, terdapat larangan bagi pelepas uang yang melakukan aktivitasnya. Kendatipun secara yuridis terdapat larangan terhadap praktik rentenir, akan tetapi secara sosiologis aktivitas rentenir tetap saja berlangsung di Kartasura tidak ada tanda-tanda surut, bahkan memperlihatkan mobilitas yang tinggi.

B. Saran-Saran

Secara sosiologis, bahwa di dalam masyarakat dengan segala karakteristik dan sifat-sifatnya selalu saja muncul kesempatan bagi para pelepas uang untuk beroperasi. Terlepas dari implikasi yang dapat dinilai negatif dari pelepas uang, akan tetapi secara empirik menunjukkan adanya kontribusi positif bagi usaha masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki taraf hidupnya. Hal yang demikian bukan berarti eksistensi pelepas uang perlu dilindungi, karena pada dasarnya masyarakat masih memandang, bahwa di dalam praktik terkandung unsur penghisapan manusia atas manusia, maka upaya untuk menghilangkannya dilakukan secara terus menerus.

Ada dua langkah yang dapat dilakukan. *Pertama*, memberikan akses kepada pelepas uang ke dalam sistem perbankan modern. Apabila para pelepas uang memiliki akses ke dalam sistem perbankan modern tersebut, maka akan terjadi kompetisi dalam *supply* kredit, sehingga akan menurunkan suku bunga. *Kedua*, bank-bank resmi seyogyanya belajar dari pelayanan yang diberikan oleh pelepas uang. Manakala hal ini dapat dilakukan, maka persaingan penawaran kredit akan berlangsung ketat dalam masyarakat, sehingga menurunkan suku bunga.

Disamping itu, ada sebuah catatan penting yang perlu dicontoh oleh institusi finansial formal atas sepak terjang para rentenir dalam merangkul para nasabah dari berbagai lapisan adalah sifat pengakaran (*embeddedness*) praktiknya dalam budaya ekonomi masyarakat. Seandainya bank-bank belajar dari praktik rentenir mungkin di kemudian hari rentenir perlahan-lahan akan tergusur atau terpaksa bersaing dengan bank dengan cara menurunkan suku bunga sehingga yang diuntungkan adalah masyarakat luas.

- Colter, Yusuf M. 1984. *Masalah Perkreditan dalam Pembangunan Pertanian*, dalam Faisal Karyono (Penyunting), *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Castle, Lance. 1982. *Religion, Politics, and Economic Behavior in Java: The Kudus Cigarette Industry*, diterjemahkan J. Sirait, S.Th, Jakarta: Sinar Harapan.
- Clarck, Robert P. 1991. *Power and Policy in the World*, Fourth Edition, New York: Macmillan Publishing Company.
- Dukesbury, John M, James, Christopher. 1988. *Credit in Support of Rural: An Evaluation of the Credit Component of the Indonesian Provincial Area Development Program*, Washington: Development Alternative, Inc.
- Dale W. Adams. 1989. *Taking a Fresh Look at Informal Financial* dalam Economic and Sociology Occasional Paper No. 1592, Study in Rural Finance, July 17 1989, Agriculture Finance Program, Departement of Agriculture Economics and Rural Sociology, The Ohio State University.
- Dale W. Adams dan Dauglas H. Graham. 1971. *The Study of Financial Dualism Dates Back to Hla Mynt*, dalam *Economics Theory and Underdevelopment Countries*, Oxford University Press.
- De Soto, Hernando. 1992. *Masih Ada Jalan Lain, Revolusi Tersembunyi di Negara Dunia Ketiga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Darmojuwono, Subardjo dan Subagyo, Pangestu. 1986. *Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah*, dalam Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, (Penyunting), *Kredit Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1989. *Kredit Rakyat Dimasa Depresi*, Jakarta: LP3ES.
- Elbrow, Martin. 1989. *Birokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Engelbrecht, NA. 1954. *Geldscheiters Ordonantie 1938*, dalam *De Wetboeken Wetten En Verordeningen Benvens De Voorlopige Grondwet Van De Republiek Indonesie*, Leiden-Awsijthhoff S - Uitgeversmij N.V.

- Fuadi, Munir. 1974. *Hukum Bisnis, Dalam Teori dan Praktek*, Buku Kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asah Asuh.
- Gordon, Donald. 1976. *Credit for Small Farmers in Developing Countries*, Colorado: Westview Press Boulder.
- Geertz, Clifford. 1986. *The Social History of an Indonesia Town*, diterjemahkan Pustaka Grafitipers, Jakarta: Pustaka Grafitipers.
- 1973. *The Interpretation of Cultures*, Basic Books, diterjemahkan oleh Fransisco Budi Hardiman, Yogyakarta: Kanisius.
- 1986. *The Social History of an Indonesia Town*, diterjemahkan Pustaka Grafitipers, Jakarta: Pustaka Grafitipers.
- 1973. *Peddlers and Prince: Social Development and Economic Change in two Indonesia Town*, diterjemahkan S. Supomo, Jakarta Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Indonesia.
- 1979. *Perubahan Sosial dan Modernisasi di dua Kota di Indonesia*, dalam Taufik Abdullah (ed), *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES.
- 1992. *Kebudayaan dan Agama*, Yogyakarta: Kanisius.
- 1989. *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- 1983. *Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Ghate, P.B. *Some Issues for the Regional Study on Informal Credit Markets, A Background Discussion Paper for the Design Workshop*, Manila, May 28 to 30, 1986.
- Hatta, Mohammad. 1985. *Pengantar Ke Jalan Ekonomi Sosiologi*, Jakarta: Inti Idayu Press.

- Hartono, C.F.G Sunarjati. 1993. *Konsep Martabat dan Kualitas Manusia Menurut Hukum*, dalam Sofian Effendi, Sjafri Sjairin, M.Alwi Dahlan (Penyunting), *Membangun Martabat Manusia, Peranan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Heryanto, Ariel. 1989. *Memperjelas Sosok yang Samar, Sebuah Pengantar*, dalam Richard Tanter dan Kenneth Young, *Politik Kelas Menengah di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Hayami, Yujiro dan Kikuchi, Masao. 1987. *Dilema Ekonomi Desa, Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hans Dieter Seibel dan B.P. Shresta. 1988. *Dhikuti: The Small Businessman's Informal Self Help Bank in Nepal*. Milan: Finafrika.
- Hamid, Edy Suandi. 1986. *Rekaman dari Seminar dalam Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, Kredit Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE.
- Hadikusuma, Hilman. 1982. *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Alumni.
- Hoselitz, Bertz F. (ed).1988. *Panduan Dasar Ilmu-Ilmu Sosial, Pemer kaya Pendekatan Antar Disiplin dan Bacaan Awal Sebelum Memilih Spesialisasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Irawan dan Suparmoko. 1995. *Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: BPFE.
- Indonesia Rural Credit Survey, Indonesia Programs Division, July, 1982.
- Kerlinger, Fred N. 1990. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kim Si Dam. *Some Issues in the Study Informal Credit Market, Resource Paper for the ADB Workshop*, 1986.
- Kui, Ng Beoy. 1985. *Some Aspects of the Informal Financial Sektor in SEACEN Countries*, The SEACEN Research and Training Centre, Staff Paper No. 10.

Koentjaraningrat. 1991. *Ciri-ciri dari Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, dalam Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan*, Jilid I, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

————— 1990. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Rajawali.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka.

Lev, Daniel S. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES.

Licaros, Gregorio S. *A Study the Informal Rural Financial Markets in Three Selected Province of the Philippines*, December, 1980.

Lipton, Michael. 1976. "Agriculture Finance and Rural Credit in Poor Countries", dalam *World Development*, Vol. 4 No. 7.

Lipton, Michael dan Moor, Mick. 1990. *The Methodology of Village Studies in Less Developed Countries*, diterjemahkan dan disunting oleh Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta.

Laporan Monografi Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Keadaan bulan Juli 1996.

Laporan Monografi Kelurahan Kartasura, Keadaan bulan Oktober 1996.

Laporan Perkembangan Badab Kredit Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, 1971 s/d 1996.

Moleong, Lexy J. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cetakan Kelima.

Muhaimin, Yahya A. 1991. *Bisnis dan Politik, Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950 - 1980*, Jakarta: LP3ES.

Mintoro, Abunawan. 1976/1977. et.al. *Aspek-aspek Kelembagaan dalam Pembangunan Pertanian*. Bogor: Survey Agro Ekonomi.

Mubyarto, Edy Suandi Hamid. (eds). 1986. *Kredit Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE, UGM.

M u b y a r t o. 1983. *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*, Jakarta: Sinar Harapan.

----- 1991. *Etos Kerja dan Kohesi Sosial: Masyarakat Sumba, Rote, Sabu dan Timor di Propinsi Nusa Tenggara Timur*, Yogyakarta: P3PK, Universitas Gadjah Mada.

----- dkk. 1987. *Laporan Akhir Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan di Propinsi Jawa Tengah*, Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan, bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Jakarta.

Musiyam M. dan Khudzaifah Dimiyati. 1992. *Bank Titil dan Perekonomian Desa*, dalam Suara Merdeka, tanggal 10 Agustus 1992.

Muhaimin, Yahya A. 1991. *Bisnis dan Politik, Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950 - 1980*, Jakarta: LP3ES.

M u b y a r t o . 1986. *Mempercepat Pewujudan Keadilan Sosial Melalui Pengembangan Sistem Kredit Pedesaan*, dalam Mubyarto dan Edy Suandi Hamid (Penyunting), *Kredit Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE.

N a s i k u n. 1991. *Sistem Sosial di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Nugroho, Heru. 1996. *Praktek Rentenir dan Ekspansi Pasar*, dalam Kompas, Nomor 013, Tahun Ke-32, 10 Juli.

Prijono, Yumiko M. dan Tjiptoherijanto, Prijono, 1983. *Demokrasi di Pedesaan Jawa*, Jakarta: Sinar Harapan.

Partadiredja, Ace. 1974. *"Rural Credit: The Ijon System"*, dalam Bulletin of Indonesian Economics Studies, Vol. 10, No. 3, Nopember 1974.

----- 1982. *Kredit Pedesaan: Sistem Ijon*, dalam Sajogjo (Penyunting), *Perekonomian Desa - Obor - YAE*.

Polanyi, Karl. 1944. *The Great Transformation*, New York: Rinehart & Company.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqur'an dan Terjemahannya, 1979. Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta.
- Alexander, Jennifer dan Alexander, Paul. *Finance and Credit in A Rural Javanese Market: An Antropological Perspective*, Prepared for Conference on Financial Research in Indonesia, Sponsored by Directorate of Domestic Monetary Affairs of the Departement of Finance/HIID, Held at Cipanas, West java 25 - 27th August 1986.
- Abdullah, Irwan. 1994. *The Muslim Businessmen of Jatinom, Religious Reform and Economic Modernization in a Central Javanese Town*, Universiteit Van Amsterdam.
- Agricultural Credit, World Bank Paper - Rural Development Series, August, 1974.
- Andreski, Stanislaw. 1989. *Max Weber on Capitalism, Bureaucracy and Religion*, diterjemahkan Hartono Hadikusumo, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Alexander, Jennifer Helen. *Batas Minimum Kredit untuk Pedagang Kecil*, dalam Prisman Nomor 7, Juli 1987.
- Abdullah, Taufik (ed). 1979. *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES.
- B o e k e, J.H. 1983. *Prakapitalisme di Asia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Babbie, Earl R. 1979. *The Practice of Social Research*. Second Edition, Belmont, California Wardworth Publishing, Company Inc.
- Black, Donald. *Batas-Batas Sosiologi Hukum*, dalam Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Yayasan Bantuan Hukum Indonesia.
- B u r g e r, D.H. 1983. *Perubahan-Perubahan Struktur Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Biro Pusat Statistik, Kantor Statistik Kabupaten Sukoharjo, tahun 1995.

- Padgorecki, Adam dan Whelan, Christopher J. 1987. *Sociological Approaches To Law*, diterjemahkan oleh Rnc. Widyaningsih dan G. Kartasaputra, Jakarta: Bina Aksara.
- Priyambodo, daru, dan Suyanto Bagong, *Pemanfaatan dan Pelayanan Kredit Usaha Kecil, Penelitian di tiga Kecamatan Propinsi Jawa Timur*, dalam Prisma, No. 11, 1991, Jakarta: LP3ES.
- Pilot Project Linking Banks and Self - Help Groups, Technical Cooperation Between the Government of Republic of Indonesia and the Government of the Federal of Germany, Cooperative and Small Credit Departement, Bank Indonesia.
- Panglaykim, J. dan Palmer I. 1991. *Perkembangan Sebuah Perusahaan Cina di Indonesia*, dalam Yoshihara Kunio, *Konglomerat Dei Tiong Ham, Kerajaan Bisnis Pertama di Asia Tenggara*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Redfield, Robert. 1985. *Masyarakat Petani dan Kebudayaan*, Jakarta: Rajawali.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia* Bandung: Alumni.
- 1986. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- Rahman, Bustami. 1994. *Nilai Kultural dan Diferensiasi Agraria di Pedesaan Jawa*, Disertasi untuk memperoleh derajat Doktor dalam Ilmu Sosiologi, pada Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (tidak diterbitkan)
- Sjahdeini, Sutan Remi. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Subekti R. dan Tiptosudibio. 1979. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- S u b e k t i. 1979. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: P.T. Inter-masa.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soetrisno, Lukman dan Sumodiningrat, Gunawan. 1986. *Lumbung Pitih Nagari di Sumatera Barat*, dalam Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, *Kredit Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE.

Soetrisno, Lukman. 1986. *Pengembangan Program Kredit Pedesaan Melalui Sistem Manajemen dari Bawah*, dalam Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, (Penyunting), *Kredit Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE.

Sumodiningrat, Gunawan. 1990. *Peranan dan Prospek Perkreditan Rakyat dalam rangka Kebijakan PAKTO*. Makalah Seminar 6 Januari 1990, Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.

Lembaga Dana dan Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat, disajikan dalam Seminar Sehari Kredit Pedesaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Jakarta, 15 Januari 1987.

Scott, James C. 1981. *The Moral Economy of The Peasant, Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*, diterjemahkan oleh Hasan Basari, Jakarta: LP3ES.

Sosrodihardjo, Soedjito. 1987. *Aspek Sosial Budaya dalam Pembangunan Pedesaan*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, Cetakan Ketiga.

Soegiarto, Heru N. 1993. *The Embeddedness of Money, Moneylenders and Moneylending in A Javanese Town, A Case Study of Bantul-Yogyakarta Special Province*. Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doctors der Sozialwissenschaften an der Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld.

Soegiarto, Heru N. dan Vidhyandika Moeljarto. 1994. *Debitur Potensial di Pedesaan Jawa, Kasus Penerimaan Masyarakat Terhadap Pelepas Uang*, dalam Prisma, Nomor 9, Jakarta: LP3ES.

Scott, James C. 1981. *The Moral Economy of The Peasant, Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*, diterjemahkan oleh Hasan Basari, Jakarta: LP3ES.

Sumodiningrat, Gunawan. 1990. *Peranan dan Prospek Perkreditan Rakyat dalam rangka Kebijakan PAKTO*. Makalah Seminar 6 Januari 1990, Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.

Singarimbun, Masri. 1976. *Population and Poverty in Rural Java: Some Economic Arithmetic from Sriharjo*, diterjemahkan Sulaiman Krisnadhi, Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

_____. 1996. *Penduduk dan Perubahan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Seibel, Hans-Dieter. *The Role of Self-help Promoting Institutions in Rural Finance, The Example of Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Chief Executive Conference on Banking with Self-help Groups, Kuning, China, 15 - 16 Oktober 1990.

Saroso, Suyowiyoto. 1978. *Mengenal Sejarah Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah*, (tanpa penerbit).

Trenk, Martin. 1990. *The Discovery of the Oriental Money lenders*, dalam *Economic, A Biannual Collection of recent German Contribution to the Field of Economic Science*, Vol. 41, Edited by Institut for Scientific Cooperation, Tubingen.

The Financial Cost of Agricultural Credit: A Case Study of Indian Experience, World Bank, Syaff Working Paper No.296, October, 1978.

Van Lannen, Jan T.M. *Diantara De Javasche Bank dan Ceti-ceti Cina: Perbankan dan Kredit di Indonesia pada Zaman Kolonial*, dalam Anne Both, William J.O' Malley, Anna Weiddemann, *Sejarah Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES.

Zanten, Wim van. 1982. *Statistika Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Gramedia, Cetakan Kedua.